KEMENTERIAN AGAMA RI
2025

EKOTEOLOGI

Mengamalkan Iman
Melestarikan Lingkungan

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

HAK MILIK KEMENTERIAN AGAMA RI
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

EKOTEOLOGI

Mengamalkan Iman
Melestarikan Lingkungan

KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2025

EKOTEOLOGI
Mengamalkan Iman, Melestarikan Lingkungan
@Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025

Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia:
Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, MA

Kata Pengantar Kepala Badan Moderasi Beragama dan PSDM:
Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., M.T.

Penyusun:
Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM

TIM PENYUSUN
Penulis:
Prof. Dr. M. Alie Humaedi, M.Ag., M.Hum.(Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Dr. Budhy Munawar Rachman (Penasihat Ahli Menteri Agama RI dan Dosen STF Driyarkara Jakarta)
Testriono, M.A., Ph.D. (PPIM UIN Jakarta dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia)
Abi S Nugroho (Lakpesdam PBNU)
Deva Alvina Br. Sebayang, M.A. (Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama)

Kontributor:
Haris Burhani, S.E., M.A.P
Ws. Sugiandi Surya Atmaja, S.Kom., M.Ag.
Siky Hendro Wibowo, S.Kom., M.Pd.
Gusti Ngurah Panji, S.I.Kom
Mohammad Ishaq
Dimas Ahmad Rizal, S.Pd.
Nisfu Amalia, S.H.
Muhammad Faridl Al Hasan, S.Ag.
Tri Admoko, S.Pd.
Rifda Nida'ul Labibah, S.Mat.
Mutiara Laila S.Pd.

Penyunting:
Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag (Sekretaris BMBPSDM)
Prof. Dr. M. Alie Humaedi, M.Ag., M.Hum. (Peneliti Utama BRIN)
Deni Muliya Barus, M.I.Kom (Praktisi Media Digital/Editor)

Penata Desain:
Abdul Syakur

Cetakan 1, Oktober 2025
xx + 133, 176 x 250 mm

ISBN: 978-602-293-281-9

Diterbitkan oleh :
Kementerian Agama RI

Dikeluarkan oleh :
Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama RI
Gedung Kementerian Agama
Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10340
Telp. : +62-21-3920663 atau +62-21-3920668
Email: balitbangdiklat@kemenag.go.id
Website :http://bmbpsdm.kemenag.go.id

Kata Pengantar

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, sumber segala kehidupan dan penjaga semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, teladan paripurna yang telah mengajarkan arti kasih sayang bukan hanya kepada sesama manusia, melainkan juga kepada seluruh ciptaan.

Dengan rasa syukur dan haru, saya bahagia lahirnya sebuah karya penting: Buku Ekoteologi Kementerian Agama. Buku ini hadir di tengah situasi dunia yang sedang mencari jalan keluar dari krisis ekologi global. Buku ini seolah menjawab rasa kekhawatiran yang saya alami secara pribadi. Pada rentang tahun 1971-1974, saat saya menempuh pendidikan di Pesantren As'adiyah Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, hamparan Danau Tempe beserta rindang pepohonan sekitarnya masih indah dan menyejukkan.

Kini, di sana sini, air danau menggenangi ratusan rumah penduduk dan memasuki jalan-jalan besar Sidrap-Wajo atau Bone-Wajo. Pohon-pohon di sekitar pun telah banyak ditebang. Perubahan lingkungan benar-benar terjadi dan menjadi ancaman nyata bagi masyarakat. Dengan kondisi itu, saya pun mengitikadkan diri bahwa pesantren dan lembaga keagamaan harus hadir menjaga dan melestarikan lingkungan.

Saat ini, kita hidup di zaman yang penuh paradoks. Di satu sisi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kemudahan luar biasa. Tetapi di sisi lain, kemajuan itu sering mengabaikan batas alam. Kita menyaksikan pemanasan global, deforestasi, polusi udara dan air, serta kepunahan ribuan spesies.

Di Indonesia, kita menghadapi banjir di musim hujan, kekeringan panjang di musim kemarau, kebakaran hutan, pencemaran laut, dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. Semua ini adalah tanda bahwa relasi kita dengan alam sudah tidak seimbang lagi. Krisis ekologi bukan hanya krisis teknis. Ia adalah krisis moral, krisis spiritual, bahkan krisis peradaban. Kita terlalu lama memandang bumi hanya sebagai sumber daya untuk dieksploitasi, bukan rumah bersama yang harus dijaga.

Di sinilah ekoteologi menemukan relevansinya. Ekoteologi mengajak kita untuk memandang bumi dengan mata iman. Bahwa bumi bukan benda mati, tetapi ciptaan Tuhan yang penuh makna spiritual. Merawat bumi bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan ibadah.

Ekoteologi menegaskan tiga hal pokok: pertama, Iman – keyakinan bahwa menjaga alam adalah amanah Tuhan; kedua, Ilmu – pengetahuan ilmiah yang memberi kita data dan fakta kondisi bumi; dan ketiga, Amal – aksi nyata yang menjembatani iman dan ilmu agar tidak berhenti pada wacana.

Iman tanpa amal hanya akan menjadi retorika. Amal tanpa ilmu berisiko salah arah. Ilmu tanpa iman bisa kehilangan makna. Karena itu, ketiganya harus bersatu. Inilah inti ekoteologi: kesatuan iman, ilmu, dan amal dalam menjaga, memperbaiki, dan merawat alam. Sebenarnya, ekoteologi bukan hal baru. Akar-akar ajaran ekologis telah lama tertanam dalam semua agama. Dalam Islam, manusia disebut khalifah fil ardh, pemimpin di bumi yang bertugas menjaga keseimbangan. Al-Qur'an mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut akibat ulah manusia, dan Allah memerintahkan kita untuk menjaga dan memperbaikinya. Dalam Kristen dan Katolik, tertera jelas dalam kitab suci: "Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu (Kejadian 2: 15)". Ayat ini menyiratkan mandat penciptaan yang menegaskan bahwa manusia harus mengelola bumi dengan kasih, bukan merusaknya.

Hindu mengajarkan Tri Hita Karana sebagai Dasar Hubungan Harmonis manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Ajaran ini pun menjadi basis dari Gerakan Punia untuk Lingkungan (Green Dharma). Buddha menegaskan ajaran Bhuvana Smrti (Pali: Bhuvana Sati) yang menjadi landasan kesadaran manusia terhadap kelestarian dan keselarasan dengan alam semesta. Ada tekanan penting pada interbeing, yaitu saling keterhubungan semua makhluk. Jika alam rusak, manusia pun akan menderita.

Dalam agama Khonghucu mengajarkan konsep Sancai menjaga hubungan harmonis antara langit (Tian), bumi (Di), dan manusia (Ren). "Bila terselenggara Tengah (Zhong) dan Harmonis (He), maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara" (Zhong Yong/Tengah Sempurna Bab Utama: 5).

Selain itu, Nusantara memiliki kearifan lokal yang kaya. Sasi di Maluku melarang mengambil hasil laut dalam periode tertentu agar alam pulih. Subak di Bali

mengatur pembagian air sawah dengan tata spiritual dan sosial. Masyarakat adat Kalimantan menjaga hutan larangan sebagai wilayah sakral. Semua ini menunjukkan leluhur kita sangat memahami pentingnya merawat alam.

Ekoteologi hadir untuk menyatukan semua tradisi itu dalam satu visi: bumi adalah rumah bersama yang harus kita rawat demi generasi mendatang. Secara pribadi, selain mengupayakan menanam pohon di mana pun saya berada, saya berusaha untuk tidak mengkonsumsi makanan yang menyebabkan peningkatan emisi global. Ikhtiar ini setidaknya menjadi amal kebaikan saya untuk bumi yang saya tinggali.

Buku Ekoteologi Kementerian Agama ini bukan sekadar karya tulis. Ia adalah instrumen kebijakan resmi Kementerian Agama, bagian dari implementasi Asta Protas 2025–2029 dan sejalan dengan RPJMN 2025–2029. Artinya, buku ini menjadi panduan operasional. Ia bisa dipakai untuk menyusun regulasi internal, membuat road map seperti Eco-Office Kemenag atau Kantor Kementerian agama dan KUA Hijau, road map integrasi ekoteologi ke dalam pendidikan agama hingga menyusun SOP layanan yang ramah lingkungan.

Lebih dari itu, buku ini memberi legitimasi teologis: merawat bumi adalah bagian dari iman dan ibadah. Dengan demikian, kebijakan ekologis tidak lagi dipandang sebagai agenda teknis semata, melainkan bagian dari panggilan religius.

Buku ini merumuskan Peta Jalan Praksis Ekoteologi. Ada beberapa tahapan penting:

Komitmen Belajar – memperdalam ajaran agama tentang lingkungan, mengintegrasikan ilmu lingkungan dalam kurikulum, serta membangun literasi ekologis berbasis iman.

Transformasi Spiritualitas – menghubungkan aksi lingkungan dengan nilai spiritual, menumbuhkan kesadaran merawat bumi adalah bagian dari ibadah.

Penerapan Aksi Nyata – misalnya rumah ibadah ramah lingkungan, gerakan konservasi lintas iman, hingga pengembangan ekonomi hijau berbasis pesantren dan komunitas.

Penguatan Kebijakan dan Budaya – mendorong lahirnya regulasi ramah lingkungan, mengintegrasikan ekoteologi dalam RPJMN, serta menghadirkan festival budaya lintas agama bertema ekologi.

Evaluasi dan Pengembangan – melakukan survei nasional kesadaran lingkungan, memonitor capaian tahunan, serta memperluas program ke berbagai daerah.

Dengan tahapan ini, ekoteologi menjadi gerakan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Ekoteologi hanya akan berhasil jika menjadi gerakan kolektif. Kementerian Agama tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh keterlibatan semua pihak: ormas keagamaan, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, komunitas adat, akademisi, LSM, dan masyarakat luas.

Rumah ibadah bisa menjadi teladan ekologis: bebas plastik, hemat energi, hijau dengan pepohonan. Sekolah dan madrasah bisa menanamkan literasi ekologi sejak dini. Ormas dapat memobilisasi umat untuk aksi konservasi. Pemerintah menyediakan regulasi dan pembiayaan. Komunitas adat menjaga kearifan lokal.

Media dan seniman bisa menyebarkan pesan ekologis dengan cara yang indah.

Dengan kerja bersama lintas sektor, ekoteologi akan tumbuh menjadi gerakan nasional, bahkan global.

Saya berharap Buku Ekoteologi Kementerian Agama ini benar-benar menjadi kompas moral, spiritual dan operasional. Indikator capaian yang sudah disusun—seperti jumlah rumah ibadah hijau, modul pembelajaran ekoteologi, jejaring komunitas peduli lingkungan, dan regulasi ramah lingkungan—harus dipantau secara serius.

Saya ingin melihat khotbah di masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng yang mengajak umat menjaga bumi. Saya ingin melihat rumah ibadah tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga pusat teladan ekologis. Saya ingin melihat generasi muda Indonesia tumbuh dengan keyakinan bahwa iman sejati adalah iman yang menghadirkan rahmat bagi seluruh ciptaan.

Jika hal ini terwujud, maka Indonesia dapat tampil sebagai teladan dunia. Dunia akan melihat bahwa agama bukan penyebab konflik, tetapi sumber inspirasi untuk merawat bumi. Bumi adalah amanah Tuhan. Ia adalah rumah bersama bagi semua makhluk. Merawatnya adalah kewajiban kita, bukan pilihan. Krisis ekologi adalah ujian besar bagi iman kita.

Melalui Buku Ekoteologi Kementerian Agama, mari kita ubah paradigma kita: dari eksploitatif menjadi penuh kasih, dari sikap abai menjadi peduli, dari acuh menjadi merawat Bumi. Mari kita jadikan iman sebagai cahaya, ilmu sebagai kompas, dan amal sebagai langkah nyata untuk merawat bumi.

Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, membimbing langkah kita. Semoga upaya ini menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya, demi anak cucu kita kelak.

Wallahu al-Muwaffiq ila Aqwamit Thariq.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menteri Agama Republik Indonesia

Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A.

Pengantar

KEPALA BADAN MODERASI BERAGAMA DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., M.T.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku panduan Ekoteologi ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan wujud nyata komitmen Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mendukung visi Menteri Agama, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, untuk menjadikan ekoteologi sebagai pilar strategis dalam memadukan nilai-nilai keagamaan dengan pelestarian lingkungan.

Krisis ekologi global, sebagaimana diungkapkan dalam laporan Intergovernmental Panel on Climate Change tentang kenaikan suhu bumi dan dampak nyata di Indonesia seperti deforestasi, polusi udara, dan masalah sampah plastik, menuntut solusi yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan praktis. Ekoteologi menjadi jawaban untuk memperkuat kesadaran menjaga bumi adalah bagian dari amanah keimanan. Dengan jaringan keagamaan yang mencakup rumah ibadah, lembaga pendidikan, pesantren, penyuluh agama, dan organisasi masyarakat keagamaan, Kementerian Agama memiliki peran sentral dalam menggerakkan umat untuk mewujudkan harmoni antara praktik keagamaan dan pelestarian lingkungan.

Proses penyusunan buku ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data, penulisan, Focus Group Discussion (FGD), hingga pembacaan ulang, dengan kontribusi dari analis kebijakan Kementerian Agama, akademisi, peneliti, aktivis lingkungan, tokoh agama, dan mitra lintas sektor seperti Kementerian Lingkungan

Hidup, Kementerian Kehutanan serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, para ahli, dan semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya buku ekoteologi ini.

Buku panduan ini dirancang sebagai alat strategis bagi satuan kerja Kementerian Agama, pendidik, penyuluh agama, dan mitra lintas sektor untuk mengimplementasikan ekoteologi dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui program seperti Eco-Masjid, KUA Hijau, inisiatif penanaman 1 juta pohon matoa pada Hari Bumi 2025, dan berbagai inisiatif yang dilakukan. Kami berharap buku ini dapat menjadi pendorong gerakan nasional yang mengedepankan kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai keimanan. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan panduan ini guna memperkuat pengetahuan, etika, dan praktik ekologis. Sehingga pelestarian lingkungan menjadi wujud nyata dari ibadah umat beragama dan menjadi jalan penghubung komunikasi interaksi secara lintas agama.

Buku ini merupakan upaya memanggil kembali (Recalling) kesadaran iman umat beragama untuk melihat tanah, air dan udara bukan sekadar sumber daya yang dieksploitasi. Untuk menyapa kembali ingatan terdalam tentang tanah air yang merindukan kedaulatannya. Kedaulatan tanah air berarti kedaulatan ekologis, yaitu kemampuan bangsa Indonesia untuk menjaga, mengelola, dan melindungi bumi tempat pijakan hidupnya. Dalam semangat Ekoteologi, kedaulatan atas tanah air menjadi panggilan iman untuk kembali merawat bumi Indonesia sebagai rumah bersama yang aman, sebagai warisan suci dan sejahtera bagi generasi penerus Indonesia mendatang.

Semoga buku ini menjadi langkah awal menuju Indonesia lestari yang selaras dengan nilai-nilai spiritual dan keagamaan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Jakarta, Oktober 2025

Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Agama Republik Indonesia,

Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., M.T.

DAFTAR ISI

hal

Halaman Sampul i
Sambutan Menteri Agama iv
Pengantar Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia viii

BAB I. PENDAHULUAN 12
A. Krisis Ekologi Global 12
B. Krisis Lingkungan Tingkat Nasional beserta Isu Strategis Penanganannya 22
C. Nilai Universal Kosmologi Penciptaan: Menghadirkan Daya Tahan 29
D. Krisis Spiritual sebagai Akar Masalah Ekologi 32
E. Lahirnya Pemikiran Ekoteologi 36
F. Pemantik Daya Tahan Keagamaan: Penanganan Krisis Ekologi 39

BAB II. FRAMEWORK DAN RUANG LINGKUP EKOTEOLOGI 44
A. Membangun Konsepsi Ekoteologi 44
B. Penjabaran Dua Definisi Ekoteologi 47
C. Prinsip dan Dasar Hukum Ekoteologi 49
D. Landasan Ekoteologi Agama-Agama 52
E. Penetapan Formal Nilai Ekoteologi 61
F. Dimensi dan Indikator Ekoteologi 62

BAB III. PRAKTIK BAIK EKOTEOLOGI 66
A. Membangun Landasan Praktik Baik 66
B. Energi Sosio-Politik dan Peta Aktor Gerakan Ekoteologi 67
C. Ekoteologi dalam Konteks Global 87
D. Anatomi Jejaring dan Kolaborasi Ekoteologi 89
E. Paradigma Ekoteologi dalam Praktik 92
F. Arah dan Tantangan Masa Depan Ekoteologi 95

BAB IV. STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKOTEOLOGI 97
A. Potensi Penggerak Implementasi Ekoteologi 97
B. Menerjemahkan Ekoteologi pada Kebijakan 98
C. Tujuan Kebijakan Ekoteologi 98
D. Strategi Implementasi Kebijakan Ekoteologi 100
E. Pilar-Pilar Implementasi Ekoteologi 101
F. Road Map Strategi dan Milestones Implementasi Ekoteologi (2025–2029) 104
G. Capaian Sementara Gerakan Ekoteologi 105
H. Rencana Program Strategis Ekoteologi 108
I. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Ekoteologi 118

BAB V. PENUTUP 122

Lampiran 126
Daftar Pustaka 131

Daftar Gambar Dan Tabel

hal

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Definisi Ekoteologi Kementerian Agama 47
Gambar 2. Prinsip Ekoteologi 51
Gambar 3. Nilai Ekoteologi 61
Gambar 4. Dimensi Ekoteologi 63
Gambar 5: Model Sistem Iklim-Sosial 91
Gambar 6. Penerjemahan Ekoteologi dari Definisi Operasional Kebijakan 99
Gambar 7. Strategi Implementasi Ekoteologi 101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Ekoteologi 64
Tabel 2. Praktik Baik Ekoteologi Kementerian dan Lembaga Negara 70
Tabel 3. Praktik Baik Ekoteologi Organisasi Sosial Keagamaan 74
Tabel 4. Praktik Baik Ekoteologi Komunitas Adat 77
Tabel 5. Praktik Baik Ekoteologi Gerakan Perempuan 80
Tabel 6. Aktivitas Ekoteologi oleh NGO di Indonesia 83
Tabel 7. Aktivitas Ekoteologi Lembaga Penelitian 85
Tabel 8. Peta Komprehensif Aktor, Inisiatif, dan Model Ekoteologi di Indonesia 86
Tabel 9. Roadmap & Milestone Gerakan Ekoteologi Nasional (2025-2029) 104
Tabel 10. Penjabaran Dimensi,Tujuan,Indikator dan Rencana Program Ekoteologi .. 109
Tabel 11. Strategi kerja SDM (Aparatur) Kementerian Agama RI 112
Tabel 12. Strategi Kerja Pilar Pendidikan Kementerian Agama RI 114
Tabel 13. Strategi Kerja Ekoteologi dalam Pilar Lembaga Keagamaan 115
Tabel 14. Strategi Program Ekoteologi dalam Pilar Kemitraan Kemenag RI 117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Krisis Ekologi Global

Krisis ekologi hari ini terasa seperti denyut yang tak pernah mereda: panas tahunan yang memecahkan rekor, banjir yang melampaui peta, kekeringan yang meretakkan tanah, lautan yang semakin asam, dan udara yang menyimpan partikel halus tak kasatmata. Data memperlihatkan percepatan yang tidak wajar. Tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas sejak pengukuran modern, dengan suhu rata-rata global sekitar 1,55 °C di atas tingkat pra-industri.

Rentang lima tahun terakhir juga menjadi yang terpanas dalam catatan, menandai perubahan yang bukan lagi kebetulan statistik melainkan tren sistemik yang berkelanjutan. Di atas papan indikator ini, komunitas ilmiah mengingatkan bahwa jendela untuk menjaga pemanasan pada 1,5 °C menyempit sangat cepat. Situasi ini bukan sekadar deretan angka. Ia merupakan cermin dari cara kita mengatur energi, pangan, kota, perdagangan, dan imajinasi tentang kemajuan.

Ketika dukungan kebijakan, aliran investasi, dan perilaku konsumsi tetap bertolak belakang dengan tujuan jangka panjang, maka krisis lingkungan bermetamorfosis menjadi krisis pembangunan dan keadilan global. Dalam bingkai tersebut, bagian ini berupaya membacakan lanskap bukti mutakhir, mengurai tren global, merumuskan kerangka analitis yang jernih, sekaligus mengajukan kritik dan langkah lanjut. Setidaknya ada tiga diagnosa terkait krisis lingkungan global.

KITAB SUCI

Diagnosa pertama menyangkut iklim. Organisasi Meteorologi Dunia menegaskan 2024 sebagai tahun terpanas dengan anomali sekitar 1,55 °C, rangkaian 2015–2024 menjadi satu dekade terpanas, dan prakiraan 2025–2029 memperlihatkan peluang sangat besar bahwa setidaknya satu tahun akan melampaui rekor tersebut kembali. Lebih penting lagi, tak hanya termometer yang bicara. Siklus hidrologi terguncang.

Hanya sekitar sepertiga cekungan sungai global mengalami kondisi “normal” pada 2024, selebihnya ekstrem. Adanya banjir di satu wilayah, kekeringan di wilayah lain. Keadaan ini telah mengganggu produksi pangan, infrastruktur, dan kesehatan publik. Data global juga menunjukkan melelehnya gletser berturut-turut dan kenaikan muka laut yang semakin pasti. Gambaran serentak ini menguatkan tesis bahwa darurat ekologi bukan sekadar “perubahan cuaca”, melainkan pergeseran iklim yang menyentuh fondasi sosial-ekonomi dan menuntut adaptasi lintas sektor yang jauh lebih serius daripada yang selama ini dibayangkan.

Diagnosa kedua menyentuh “kesenjangan emisi”. Laporan Emissions Gap 2024 menyatakan bahwa untuk menjaga peluang 1,5 °C, emisi global perlu turun sekitar 42% pada 2030 dan 57% pada 2035 dibandingkan skenario kebijakan saat ini. Namun, hampir tidak ada pembaruan komitmen nasional besar yang mengubah lintasan emisi global sejak penilaian sebelumnya. Keadaan ini membuat celah antara janji dan realisasi tetap menganga.

Pada saat yang sama, laporan “Production Gap” menunjukkan pemerintah Indonesia masih berencana memproduksi fosil pada 2030 sekitar dua kali lipat dari yang kompatibel dengan 1,5 °C. Pilihan kebijakan seperti ini menjadi sebuah paradoks yang menempatkan posisi pedal “gas dan rem kebijakan afirmasi” diinjak bersamaan. Di hulu rencana produksi, di hilir target penurunan emisi, jurang koordinasi ini memperbesar biaya transisi dan memperpendek waktu bertindak.

Diagnosa ketiga berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Penilaian global IPBES mengingatkan, sekitar satu juta spesies terancam punah. Realitas tersebut menjadi cermin dari fragmentasi habitat, eksploitasi berlebih, polusi, dan perubahan iklim yang saling menumpuk dampaknya. Sebagai respons, dunia menyepakati Kerangka Keanekaragaman Hayati Kunming-Montreal, dengan salah satu target paling simbolik: melindungi 30% daratan dan lautan pada 2030 (“30x30”), sekaligus menekankan keadilan tata kelola termasuk pengakuan wilayah adat sebagai pilar konservasi yang efektif.

Kini kabar baik datang dari samudra lepas. Berkat 60 ratifikasi per September 2025, Perjanjian Laut Lepas (BBNJ) dipastikan berlaku pada Januari 2026, membuka peluang pembentukan kawasan lindung lintas batas di dua pertiga wilayah laut dunia. Upaya ini merupakan sebuah instrumen penting untuk mewujudkan 30x30 di ruang yang sebelumnya nyaris tanpa payung hukum. Namun sebagaimana semua kebijakan internasional, efektivitasnya akan bergantung pada implementasi, pendanaan, dan kepatuhan pelayaran.

Diagnosa keempat terkait polusi plastik. Mandat global untuk merundingkan traktat plastik yang mencakup seluruh siklus hidup bahan ini belum berujung kesepakatan final. Sesi lanjutan di Jenewa, Agustus 2025 kembali buntu, terutama pada isu pembatasan produksi hulu dan pengaturan zat adiktif beracun. Kemandekan ini menunjukkan tarik menarik antara kepentingan industri petrokimia dan koalisi negara yang mendorong pengurangan dari hulu,

bukan sekadar daur ulang di hilir. Sementara itu, arus sampah lintas negara dibatasi oleh kebijakan domestik sejumlah negara Asia, tetapi tanpa standar global yang mengikat, kebocoran tetap besar dan beban cenderung berpindah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain.

Setelah menyusun empat diagnosis, kita beralih ke dinamika transisi energi. Di satu sisi, pertumbuhan energi terbarukan melesat. Pada 2024 mencetak rekor penambahan kapasitas baru secara global dan lintasan hingga 2030, yang didukung oleh kebijakan kombinasi kebijakan dari 140 negara. Artinya, kesepakatan dunia itu telah berpotensi pada pencapaian target pelipatgandaan kapasitas di ujung dekade, sebagaimana yang ditetapkan oleh agenda COP28 untuk “melipatgandakan tiga” kapasitas terbarukan dan “melipatgandakan” laju efisiensi energi.

Di sisi lain, kemajuan ini masih tertahan oleh bottleneck jaringan, perizinan lahan, pembiayaan proyek di negara berpendapatan menengah-bawah, dan pasokan mineral kritis yang berkelanjutan. Tanpa kebijakan sistemik pada transmisi, penyimpanan, dan respons beban, tambahan gigawatt akan kalah cepat oleh "kemacetan" grid. Dimensi kebijakan fiskal dan harga karbon memberi gambaran campuran. Di satu sisi, instrumen harga karbon kian meluas; sekitar 28% emisi global kini tercakup, dengan penerimaan fiskal melebihi 100 miliar dolar AS pada 2024, modal penting untuk mendanai transisi adil dan adaptasi.

Namun, harga efektif masih jauh dari rentang yang dibutuhkan untuk menggeser investasi secara tegas, dan celah cakupan di sektor pertanian serta penggunaan lahan tetap besar. Di sisi lain, subsidi fosil (dalam pengertian eksplisit dan implisit) masih sangat masif, setara 7 triliun dolar AS pada 2022 menurut IMF, menjadi "gravitasi" kebijakan yang menahan laju peralihan. Menariknya, laporan teknis dan analisis kebijakan menunjukkan penghapusan subsidi yang tidak efisien bisa sekaligus memperbaiki fiskal, menekan polusi lokal, dan memperkuat sinyal harga bersih, sejauh disertai kompensasi sosial yang cermat untuk rumah tangga rentan.

Menimbang tren-tren di atas, ada tiga variabel penjelas yang perlu diawasi secara ketat. Variabel pertama adalah konsistensi kebijakan lintas hulu-hilir. Selama rencana produksi fosil meningkat sementara target emisi menurun, ketidaksesuaian struktural akan menghasilkan biaya transisi lebih tinggi, stranded assets, dan resistensi politik di wilayah yang bergantung pada pendapatan fosil.

Variabel kedua adalah kecepatan koordinasi infrastruktur: transmisi listrik lintas wilayah, sistem penyimpanan, efisiensi bangunan, serta elektrifikasi transportasi dan panas industri. Tanpa itu, penambahan kapasitas terbarukan akan berujung pada curtailment dan kekecewaan pasar.

Variabel ketiga adalah keadilan pembiayaan: dari dana kerugian-kerusakan hingga penguatan modal lembaga multilateral, akses kredit murah untuk negara berpendapatan menengah dan rendah menjadi kunci agar transisi tidak hanya terjadi di OECD, melainkan benar-benar global. Di sinilah keputusan COP28 untuk mengoperasionalkan skema kerugian-kerusakan patut diapresiasi, namun skala kebutuhannya beberapa ratus miliar dolar per tahun pada 2030, sementara janji dan realisasi masih terpaut jauh.

Metode berpikir yang rapi menuntut kita menelusuri hubungan sebab-akibat: mengapa kebijakan global tampak "setengah hati"? Pertama, ada asimetri kepentingan ekonomi-politik: keuntungan privat dari eksploitasi sumber daya bersifat terfokus dan jangka pendek, sedangkan manfaat publik dari stabilitas iklim bersifat tersebar dan jangka panjang. Kedua, ada persoalan distribusi, baik dalam ruang (negara kaya vs rentan) maupun waktu (generasi kini vs mendatang). Ketiga, ada keterbatasan tata kelola: hukum internasional bergantung pada kepatuhan sukarela, sementara sanksi atas pelanggaran lingkungan lintas batas lemah. Analisis ini bukan alasan untuk pesimis, melainkan justru menunjukkan di mana tuas perubahan paling efektif.

Di tataran narasi, krisis ekologi juga menjadi krisis imajinasi. Selama "kemajuan" ditakrifkan semata sebagai pertumbuhan PDB tanpa batas, indikator-indikator non-moneter, kesehatan ekosistem, kualitas udara, ketahanan pangan, akan menjadi "catatan pinggir". Di sini kritik terhadap fetish angka tunggal menjadi relevan. Kita memerlukan matriks tujuan yang setara: emisi turun, energi bersih naik, keanekaragaman hayati pulih, ketimpangan mengecil, dan ketahanan sosial menguat. Rachel Carson, seorang pemikir ekologi awal yang terkenal

ASTA

MASJID HIJAU

SEKOLAH RAMAH LINGKUNGAN

MODERASI BERAGAMA
UNTUK EKOLOGI

PROTAS

mengingatkan dengan tajam, “Di alam, tak ada yang berdiri sendiri.” Itu bukan sekadar seruan puitik, melainkan rumusan ilmiah tentang keterkaitan sistem yang seharusnya menuntun kebijakan.

Berdasarkan empat diagnosa krisis ekologi di atas, setidaknya ada tiga asumsi sederhana yang dapat diajukan:

1. Realitas ekologis bersifat sistemik: iklim, keanekaragaman hayati, air, tanah, dan laut saling berkait dalam umpan balik yang bisa memperkuat atau melemahkan kerentanan.
2. Tren global digerakkan oleh kombinasi teknologi, kebijakan, dan ekonomi politik; karena itu data energi dan pembiayaan iklim sama pentingnya dengan catatan suhu atau tutupan hutan.
3. Penilaian kebijakan harus meletakkan keadilan sebagai variabel inti: siapa yang menyebabkan kerusakan paling besar, siapa yang paling terdampak, dan siapa yang memegang kendali atas alat transisi.

Tiga asumsi ini membimbing penalaran pada proses: refleksi atas diagnosa lingkungan berbasis data, evaluasi penjelas kausal, hingga proposisi langkah yang layak secara teknis, ekonomis, dan etis. Pertanyaannya, bagaimana menerjemahkan pemahaman ini menjadi langkah? Jawabnya perlu ditarik seperti benang tenun, rapi, menyambung, dan berkekuatan. Berikut penjelasannya:

1. Perlu mempercepat “hulu transisi”: melibatkan instrumen kebijakan yang menyentuh produksi, bukan hanya konsumsi. Pembatasan lisensi ekstraksi baru, skema penurunan produksi yang dapat diverifikasi lintas negara, dan peta jalan dekarbonisasi untuk BUMN energi akan mengurangi “overhang” fosil yang mengunci emisi masa depan. Produksi Gap menunjukkan tanpa koreksi hulu, target 1,5 °C menjadi retorika; mengoreksinya akan memperjelas sinyal ke pasar modal dan mempercepat biaya modal turun untuk alternatif bersih.
2. Kunci pada “infrastruktur pendukung”: target melipatgandakan terbarukan harus dibarengi reformasi perizinan yang memangkas hambatan tanpa mengorbankan perlindungan sosial dan lingkungan; investasi besar pada jaringan transmisi lintas provinsi dan negara; pembaruan pasar listrik agar fleksibilitas dan penyimpanan memperoleh model bisnis yang bankable; dan dorongan efisiensi energi dua kali lipat melalui standar bangunan, peralatan, serta audit industri. Laporan IEA menunjukkan, pada lintasan sekarang, peluang mengejar target masih terbuka, tetapi jendela persiapannya, khususnya untuk jaringan sangat sempit.
3. Memperkuat “keadilan finansial”: perluasan instrumen harga karbon yang kredibel mesti sejalan dengan pengurangan subsidi fosil yang tidak efisien; penerimaan fiskal diarahkan untuk melindungi kelompok rentan, membiayai transportasi publik, perumahan hemat energi, dan adaptasi berbasis alam. Data Bank Dunia dan IMF memberi arah: cakupan harga karbon mendekati sepertiga emisi global dan penerimaannya besar, tetapi sinyal bersihnya sering tertutup oleh subsidi energi yang masif. Koreksi struktur insentif, bukan hanya tarif, akan menggeser perilaku ekonomi dengan lebih efisien.
4. Mengggalang “koalisi implementasi” untuk alam. Keberlakuan Perjanjian Laut Lepas pada 2026 harus diikuti peta kawasan lindung berpemandu sains, pengawasan kapal berbasis satelit, dan mekanisme pembiayaan biru yang adil. Sejalan dengan GBF, pengakuan hak masyarakat adat dan mekanisme bagi hasil yang transparan merupakan syarat efektivitas

> ***Mencintai Tuhan harus diwujudkan dengan merawat ciptaan-Nya. Menggiatkan para santri menanam***

konservasi, bukan tambahan kosmetik. Di darat, target 30x30 perlu dilihat bukan sekadar angka tutupan, melainkan kualitas konektivitas habitat dan tata kelola yang inklusif.

5. Memperbarui "tata kelola barang bersama". Kemandekan traktat plastik menunjukkan bahwa model konsensus total bisa memiskinkan ambisi. Opsi prosedural, misalnya pemungutan suara berbobot atau koalisi yang menetapkan standar minimum lalu memfasilitasi aksesi bertahap, dapat dieksplorasi. Sembari proses global berjalan, negara dan kota dapat mengadopsi kebijakan domestik tegas pada produksi, desain, dan adiktif beracun, agar arsitektur masa depan traktat tidak dibangun di ruang hampa, tetapi di atas praktik yang sudah terbukti.
6. Memperkuat "imajinasi publik". Kebijakan yang benar sering kali gagal tanpa dukungan sosial. Cerita bersama tentang kota yang sejuk dan teduh, pangan yang sehat, udara yang bersih, dan laut yang pulih, menjadi energi politik untuk melewati biaya transisi jangka pendek. David Attenborough pernah berujar, "Tak seorang pun akan melindungi apa yang tak mereka pedulikan; dan tak seorang pun akan peduli pada apa yang tak pernah mereka alami." Pendidikan ekologi yang menghadirkan pengalaman langsung, kebun sekolah, transportasi aktif, dan pariwisata alam yang beretika memupuk kedekatan yang diterjemahkan menjadi pilihan konsumsi dan suara politik.

Kritik perlu diarahkan pada tiga jebakan. Pertama, "solusi semu" yang hanya memindahkan beban: mengekspor limbah ke negara lain, menebus polusi lokal dengan kredit murah yang kualitasnya meragukan, atau mengandalkan teknologi yang belum matang sebagai alibi menunda pengurangan emisi nyata. Kedua, "elitisme hijau" yang membebankan biaya transisi kepada rumah tangga miskin melalui kebijakan energi yang tidak dirancang dengan perlindungan sosial memadai. Ketiga, "defisit koordinasi" yang membuat proyek baik tumbang di hadapan regulasi yang saling bertentangan atau proses perizinan yang lama tanpa nilai tambah. Menghindari tiga jebakan ini menuntut tata kelola yang transparan, evaluasi dampak yang jujur, dan partisipasi bermakna.

Pada akhirnya, darurat ekologi di tingkat global dan dampaknya ke tingkat nasional dan lokal adalah ujian moral. "Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang; kita meminjamnya dari anak-cucu," ujar sebuah pepatah yang sering dinisbatkan kepada hikmah penduduk asli Amerika. Tekanan waktu kini nyata: World Meteorological Organization (WMO) memperkirakan peluang besar bahwa setidaknya satu tahun antara 2025–2029 akan melampaui ambang 1,5 °C, bukan melanggar target Paris secara struktural, tetapi sinyal jelas bahwa setiap tahun tanpa perubahan menggerus sisa ruang gerak.

Dari sini, rasionalitas kebijakan yang bersandar pada bukti harus berjalan beriringan dengan keberanian etis untuk mengubah arah. Ketika emisi turun cepat, jaringan listrik dipercepat, ekosistem dilindungi dengan tata kelola yang adil, dan pembiayaan mengalir ke tempat yang paling membutuhkan, kita tidak sekadar "mengurangi risiko", melainkan "menciptakan masa depan" yang dapat dihuni secara bersama.

Bahasa yang kita pilih ikut menentukan masa depan yang dibangun. Jika pembangunan didefinisikan sebagai perayaan kehidupan, bukan sekadar akumulasi barang, maka kompasnya menjadi jelas, yaitu menjaga integritas sistem penyangga kehidupan seraya meningkatkan martabat manusia. Dari kota yang teduh sampai pesisir yang tahan gelombang, dari hutan yang tegak

SCHOOL

hingga sekolah yang menanam kebun, dari pasar listrik yang fleksibel sampai undang-undang yang melindungi hak generasi yang belum lahir.

Keadaan darurat ini memanggil tindakan yang tenang, jujur, dan terukur. Jalan itu berat, tetapi bukan mustahil. Tanpa romantisasi, namun juga tanpa sinisme, kita dapat menempuhnya dengan sains sebagai peta, kebijakan sebagai rute, dan imajinasi bersama sebagai bahan bakar. Dalam kata-kata seorang perintis pemikiran ekologi yang sudah dikutip di atas, Rachel Carson, "Di alam, tak ada yang berdiri sendiri." Di era saling-terhubung (interbeing, dalam istilah Buddhisme), kalimat itu adalah definisi baru tentang kepentingan diri: menjaga yang lain adalah cara terbaik menjaga diri. Bila demikian, darurat ekologi bukan akhir dari cerita, melainkan halaman yang menentukan apakah kita, sebagai peradaban, mampu beranjak dari kebiasaan lama menuju cara hidup yang lebih sesuai dengan rumah satu-satunya yang kita miliki.

B. Krisis Lingkungan Tingkat Nasional beserta Isu Strategis Penanganannya

Krisis lingkungan berskala global di atas juga menerpa negara-negara di dunia, termasuk pada tingkat lokal kedaerahannya. Perubahan iklim seolah menjadi diksi yang meruang-lingkupi semua krisis lingkungan yang terjadi. Padahal tidak semua krisis lingkungan disebabkan dari perubahan iklim. Banjir rob di pesisir, kebakaran lahan gambut, gagal panen saat musim tak menentu, beban kesehatan akibat udara kotor, dan bencana hidrometeorologi sering kali dinisbatkan sebagai gejala yang menyatu dari perubahan iklim. Namun, krisis lingkungan bukan sekadar itu, tetapi realitas yang mewujud di sekitar kehidupan kita, mulai dari lingkungan terkecil di tingkat keluarga hingga berskala nasional.

Sampah rumah tangga yang melimpah dan limbah plastik yang menjalar panjang di aliran sungai hingga garis pantai, dan bahkan masuk tenggelam ke dalam lautan luas, merupakan krisis lingkungan berskala nasional yang diawali dari lingkungan terkecil sekitar, yaitu keluarga. Demikian juga peningkatan emisi dan polusi udara, sering kali tanpa sadar disebabkan oleh perilaku harian anggota keluarga, yang memantik industri-industri besar untuk mengolah sumber daya alam menjadi produksi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ibarat pola supply and demand, industri akan merespon kebutuhan pasar dengan memaksimalkan produksi, sekalipun harus memenuhi udara dengan polusi dan emisi.

Kehadiran pabrik-pabrik di wilayah pantai Utara Jawa, pedalaman pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menjadi bukti nyata bahwa lingkungan terkecil pun dapat menciptakan industri yang menciptakan krisis ekologi. Pemenuhan kebutuhan industri direspon secara jeli oleh perkebunan sawit, karet, kayu, tebu, dan lainnya, serta peternakan dalam skala besar. Pemenuhan atas kebutuhan industri memungkinkan pembukaan hutan secara besar-besaran, dan pada akhirnya beralih fungsi menjadi pencipta dan pembibitan emisi tinggi. Untuk menggerakkan sektor industri, pembukaan tambang batu bara, minyak, nikel, timah, emas dan lainnya ikut mengiringinya.

Pada akhirnya, industrialisasi yang ada bukan sekadar memenuhi kebutuhan hidup keluarga dalam lingkungan terkecil, tetapi melampaui kepentingan nasionalnya. Lintasan mata rantai pasok trans nasional memungkinkan proses pembukaan hutan dan penambangan dilakukan secara besar-besaran. Krisis lingkungan nyata terjadi, bukan hanya oleh rakyat kecil pada area sampah dari

Penanaman Pohon Mangrove di sekitar pantai untuk mencegah abrasi air laut

rumah tangga, tetapi juga elemen industri yang memantik keterlibatan para pihak untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.

Krisis lingkungan dan perubahan iklim di Indonesia sudah bergeser dari wacana jauh di horizon menjadi denyut yang kita rasakan di tubuh kebijakan, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Di balik gejala krisis lingkungan, ada struktur persoalan: ketergantungan energi pada batu bara, tata kelola lahan yang belum sepenuhnya pulih, pembiayaan transisi yang timpang, dan koordinasi kebijakan yang belum serempak.

Dokumen ini menyajikan kerangka analitis yang sederhana namun ketat: menetapkan asumsi, menelusuri variabel utama, menguji data kebijakan terkini, lalu merumuskan langkah yang layak secara teknis, ekonomis, dan etis untuk kepentingan pelestarian lingkungan. Tujuannya bukan sekadar menambah informasi, melainkan menajamkan arah. Seperti diingatkan Rachel Carson, “Di alam, tak ada yang berdiri sendiri.” Kalimat itu bukan hanya indah, melainkan peta berpikir: sektor-sektor saling terhubung; keputusan di energi mengguncang pangan, kesehatan, dan laut.

Kerangka kerja yang dipakai bertumpu pada tiga asumsi. Pertama, krisis iklim bersifat sistemik: atmosfer, hutan, air, dan ekonomi saling memberi umpan balik; serta kebijakan yang tidak sinkron mudah menghasilkan “biaya kebijakan” yang tinggi. Kedua, keberhasilan ditentukan oleh konsistensi hulu–hilir: produksi fosil, bauran energi, jaringan listrik, efisiensi, hingga perilaku konsumen harus bergerak seirama. Ketiga, keadilan adalah variabel inti: siapa yang paling terdampak, siapa yang paling beremisi, dan siapa yang memegang kendali atas alat transisi.

Dengan asumsi ini, isu strategis nasional dapat dibaca sebagai anyaman antara mitigasi (menahan emisi), adaptasi (mengurangi risiko), dan transformasi kelembagaan (membenahi insentif, data, dan tata kelola). Dalam bahasa yang lebih lugas: sains memberi peta, kebijakan memberi rute, pembiayaan memberi bahan bakar, dan keadilan memastikan kendaraan ini tidak meninggalkan siapa pun.

Di tingkat komitmen, Indonesia telah meningkatkan target penurunan emisi melalui Enhanced NDC: 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030 dibanding skenario bisnis-seperti-biasa. Dokumen resmi juga menandai agenda kunci di darat: FOLU Net Sink 2030, yaitu tekad agar sektor kehutanan dan tata guna lahan menjadi serapan bersih pada 2030, dengan sasaran operasional berupa penurunan deforestasi, restorasi gambut, rehabilitasi hutan, dan penegakan hukum kebakaran (–140 MtCO e pada 2030 dalam rancangan operasional).

Pada level kebijakan fiskal dan pasar, landasan harga karbon sudah diletakkan melalui Perpres 98/2021, yang mengatur nilai ekonomi karbon, skema perdagangan, pembayaran berbasis kinerja, dan pungutan karbon. Pijakan pasar domestik diperkuat dengan peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada September 2023 di bawah pengawasan OJK, disertai aturan teknis perdagangan unit karbon. Ini semua merupakan “infrastruktur kebijakan” yang tak bisa diabaikan dalam rancangan strategis nasional beberapa tahun ke depan.

Fondasi rancangan itu rupanya tak sama dengan bangunan, sehingga menimbulkan beberapa tantangan. Tantangan pertama, dan yang paling penentu berada di sektor energi listrik. Perpres 112/2022 memerintahkan

Sinergy of Nation and Religion

percepatan energi terbarukan, penetapan peta pensiun dini PLTU, dan prioritas pembelian listrik dari pembangkit bersih. Di atas kertas, RUPTL terbaru (2025–2034) memang memproyeksikan lonjakan investasi pembangkitan dan jaringan, dengan porsi besar untuk EBT, penyimpanan energi, serta gas sebagai penyangga. Laporan industri dan pemberitaan menunjukkan ambisi penambahan EBT puluhan gigawatt dalam satu dekade, sejalan dengan ajakan global untuk "melipatgandakan tiga" kapasitas EBT dan melaju dua kali lipat efisiensi.

Namun, pengamat juga mencatat adanya ketegangan: rencana kenaikan produksi listrik fosil yang signifikan dalam RUPTL 2025–2034 ditengarai tak sepenuhnya selaras dengan jalur JETP. Sementara isu "PLTU captive" untuk kawasan industri dapat menihilkan capaian emisi bila tanpa pagar kebijakan yang kuat. Di titik ini, isu strategisnya jelas: bagaimana memastikan peralihan sistem tenaga, dari izin, jaringan, hingga kontrak, mendahului dan mengunci arah dekarbonisasi, bukan sekadar menempel di belakang.

Tantangan kedua yang sama krusial adalah pembenahan tata kelola lahan dan hutan. Kebijakan FOLU Net Sink 2030 memberi sinyal yang benar: pemulihan gambut, penghentian pembakaran, rehabilitasi mangrove, dan penguatan penegakan hukum sebagai mesin serapan bersih. Sejumlah laporan internasional memperlihatkan Indonesia menekan laju kehilangan hutan beberapa tahun terakhir dibanding puncak sebelumnya, namun kerentanan tetap tinggi saat El Niño mengeringkan lahan gambut atau saat harga komoditas terguncang.

Karena itulah integrasi antara target FOLU, perencanaan ruang, ekonomi desa, serta skema pendanaan berbasis hasil (results-based payment) menjadi haluan yang diikat dalam satu "kontrak kebijakan". Kepastian tenurial dan pengakuan wilayah adat bukan lampiran idealis, melainkan syarat efektif untuk menjaga hutan tetap tegak. Pada tahap implementasi, indikator kinerja perlu dipindah dari "hektar ditanam" ke "hektar pulih dan berfungsi" agar anggaran mengikuti hasil yang nyata.

Tantangan ketiga adalah pembiayaan transisi. Perpres 98/2021 membuka jalan untuk berbagai instrumen nilai karbon, sementara peluncuran bursa menyediakan etalase bagi kredit dari berbagai sektor. Tetapi kunci sesungguhnya ada pada orkestrasi fiskal: konsolidasi pajak, penataan subsidi energi, dan desain harga karbon yang memberi sinyal bersih. Fakta di lapangan: pajak karbon yang diamanatkan UU HPP dengan tarif awal Rp30.000 per ton CO_e telah beberapa kali ditunda dan dalam berbagai pernyataan kebijakan disebutkan mulai berlaku bertahap pada 2025, meskipun dinamika politik fiskal belakangan menambah ketidakpastian.

Pelajaran yang perlu diserap ialah bahwa ketegasan arah, bukan sekadar besaran tarif awal, yang menggerakkan pasar: peta jalan kenaikan bertahap, cakupan sektor yang makin luas, serta alokasi penerimaan untuk melindungi rumah tangga rentan dan membiayai infrastruktur hijau. Tanpa itu, sinyal harga akan kalah oleh "gravitasi" subsidi fosil dan kontrak lama. Transisi energi yang adil menuntut mekanisme pensiun dini PLTU yang nyata, bukan jargon. Di sini, JETP Indonesia dan proyek percontohan ETM ADB pada PLTU 660 MW Cirebon-1 memberi pembelajaran: desain keuangan campuran (blended finance), penghitungan manfaat kesehatan udara, serta penanganan dampak sosial bagi pekerja dan daerah.

Strategi nasional perlu memperbanyak proyek percontohan menjadi portofolio, mencakup PLTU on-grid dan captive, dengan kriteria transparan: usia, intensitas emisi, posisi pada jaringan, dan alternatif pengganti. Dampak sosial harus dihitung sejak awal, bukan pasca-penutupan. Secara institusional, hal ini menuntut satuan tugas lintas kementerian dan daerah, serta keterlibatan PLN sebagai penghela jaringan. Jika tidak, kita akan terjebak pada paradoks "dekarbonisasi di atas kertas" sementara beban kesehatan dan biaya sistem tetap menumpuk.

Demikian pula kerentanan pesisir Indonesia sangat tinggi. Kajian kebijakan terbaru memperingatkan eksposur jutaan penduduk terhadap banjir permanen akibat kenaikan muka laut pada paruh kedua abad ini, serta lonjakan kerugian banjir perkotaan sebelum 2030 jika infrastruktur tak dirancang ulang. Pemerintah sebenarnya telah memiliki RAN-API dan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon & Ketangguhan Iklim, serta proses pembaruan rencana adaptasi dengan dukungan internasional.

Tantangan kita kini ialah "menyeberangkan" rencana ke proyek: mengubah peta bahaya menjadi rancang ulang drainase kota, ruang terbuka hijau, standar bangunan, proteksi pesisir berbasis alam, diversifikasi pangan tahan iklim, dan sistem peringatan dini yang ramah warga. Ukurannya jelas: penurunan kerugian tahunan, jumlah penduduk yang terlindungi, dan jeda pemulihan ekosistem. Adaptasi yang baik selalu konkret dan dapat diaudit.

Agar seluruh agenda tersusun rapi, kita memerlukan "tulang punggung" data dan tata kelola. Prinsipnya sederhana: apa yang diukur dan dikelola. Neraca karbon nasional harus tersambung dengan neraca emisi korporasi dan daerah, inventarisasi emisi sebaiknya menggunakan metodologi yang kompatibel dengan pasar karbon dan audit independent, dan data kualitas udara, kelembaban gambut, sehingga faktor emisi jaringan listrik harus tersedia terbuka. Warga, akademisi dan pelaku usaha pun bisa menilai kinerjanya. Integrasi data ini bukan urusan teknis belaka, melainkan prasyarat kepercayaan. Ketika angka mudah diverifikasi, sengketa klaim berkurang, dan biaya modal proyek hijau ikut turun karena risiko kebijakan mengecil. Di titik ini, bursa karbon, otoritas keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Bappenas, dan PLN harus berbagi papan kontrol yang sama, dan bukan saling bertukar PDF yang datang terlambat.

Dalam politik kebijakan, koherensi harus dijaga dari godaan "solusi semu". Mengklasifikasikan sebagian investasi PLTU captive sebagai "transisi" boleh jadi menjawab kebutuhan sementara kawasan industri, tetapi berisiko mengunci emisi jangka panjang kalau tidak disertai batas tegas umur operasi, intensitas emisi, dan rencana penggantian dengan energi bersih. Pembiayaan pajak hijau yang longgar akan membingungkan pasar, menyulitkan bank, dan menggerus reputasi kebijakan. Prinsip kehati-hatian perlu ditegakkan, seperti pada investasi transisi yang harus punya garis akhir kredibel dan jadwal menurun, bukan pada ruang abu-abu yang mengulur waktu.

Dari sisi kelembagaan, tiga variabel pengungkit patut dijaga. Pertama, konsistensi hulu–hilir energi, seperti pembatasan proyek fosil baru, percepatan izin Energi Baru Terbarukan (EBT), reform pasar listrik untuk fleksibilitas dan penyimpanan, serta pembangunan transmisi antar-pulau yang memberi akses ke potensi surya, hidro, dan panas bumi. Kedua, keadilan fiscal, berupa pengalihan bertahap subsidi fosil ke perlindungan sosial yang tepat sasaran dan infrastruktur rendah emisi di kota-kota lapis kedua, tempat beban polusi paling terasa. Ketiga, kemitraan internasional yang disiplin, yaitu dengan

mendorong Just Energy Transition Partnership (JETP) dan pendanaan iklim harus mengalir ke proyek prioritas yang jelas dampak emisinya, bukan sekadar daftar keinginan, dengan tolok ukur tahunan.

Kita memerlukan tata kelola yang bisa menjawab pertanyaan sederhana, seperti emisi turun berapa, kesehatan membaik sejauh mana, dan biaya listrik stabil di level berapa. Tanpa matriks hasil, kebijakan mudah berubah jadi retorika. Di atas semua itu, komunikasi publik memegang peran sentral. Kebijakan yang benar sering tidak populer di awal. Dengan demikian, cerita bersama tentang kota yang sejuk, udara yang bersih, laut yang kembali kaya, sawah yang tahan kering, dan tagihan listrik yang stabil harus dibangun sejak awal. “Tak seorang pun melindungi apa yang tidak ia pedulikan; dan tak seorang pun akan peduli pada apa yang tidak ia kenal,” ujar Sir David Attenborough.

Tidak hanya dalam soal kebijakan energi, tetapi kesadaran lingkungan pun dapat dikembangkan dari aspek-aspek afektif dan kognitif. Aspek ini bisa tercakup pada pendidikan iklim yang menghadirkan pengalaman, kebun sekolah, jalur sepeda yang aman, dan ruang belajar energi surya di desa, sesungguhnya dapat melahirkan pilihan konsumsi dan suara politik yang menopang transisi. Pilihan ini bukan romantisme, tetapi sebuah strategi. Secara teknokratis, apa indikator sukses lima tahun ke depan? Pada listrik: realisasi kapasitas EBT terpasang sesuai rencana, laju pembangunan transmisi dan penyimpanan, dan penurunan intensitas emisi jaringan. Pada PLTU, misalnya akan terlihat pada perubahan jumlah unit yang masuk skema pensiun dini berikut jadwal dan pembiayaan, plus mitigasi sosial bagi pekerja.

Pada FOLU (Forestry and Other Land Use) dapat terlihat penurunan deforestasi permanen, luasan gambut/mangrove yang pulih dan fungsi hidrologinya, serta penurunan titik panas di musim kering. Pada pembiayaan: volume perdagangan karbon domestik terverifikasi, tarif pajak karbon dan cakupan sektor, serta besaran subsidi fosil yang dialihkan ke program adaptasi dan transportasi publik. Pada adaptasi perkotaan dan pesisir, misalnya akan terlihat pada aspek penurunan kerugian tahunan akibat banjir dan panas ekstrem, luas ruang terbuka hijau fungsional, serta cakupan peringatan dini. Indikator-indikator ini tidak glamor, tetapi dapat diaudit, itulah esensi akuntabilitas.

Ada pula sisi politik yang tak boleh dipungkiri. Dinamika fiskal, pergantian pejabat, dan tekanan industri terus hadir. Keputusan fiskal terbaru, termasuk pernyataan pemerintah terkait horizon pajak baru, mengingatkan bahwa desain kebijakan iklim harus tangguh terhadap pergantian. Aturan yang memuat peta jalan multi-tahun, kewajiban laporan, dan pengawasan publik memberi daya tahan terhadap siklus politik. Seperti dikatakan Antonio Guterres, “Darurat iklim adalah perlombaan yang sedang kita kalah, tetapi masih bisa kita menangkan.” Menang di sini berarti merancang kebijakan yang tetap berjalan ketika headline berubah; menyandarkan diri pada data, bukan semata pidato.

Pada akhirnya, isu strategis nasional penanganan krisis iklim, bukan soal memilih antara ekonomi atau lingkungan. Ini soal memilih bentuk ekonomi yang sanggup bertahan. Dengan memperkuat koherensi kebijakan energi, mengunci capaian FOLU, menata pembiayaan dan harga karbon yang kredibel, menumbuhkan adaptasi ke dalam desain kota dan pesisir, menegakkan integritas data, serta menempatkan keadilan sebagai sumbu, Indonesia dapat memaknai transisi sebagai strategi pembangunan, bukan sekadar kewajiban global.

Jalan di atas menuntut kedewasaan, yaitu berani menutup yang kotor, berani membangun yang bersih, dan berani menjaga yang rapuh. “Kita tidak mewarisi bumi dari leluhur; kita meminjamnya dari anak cucu,” demikian kearifan yang kerap diingatkan. Jika manajemen negara yang modern bertemu dengan nurani yang jernih, maka transisi bukan lagi mimpi, melainkan manajemen risiko yang baik. Proses dan harapan capaian inilah yang diharapkan, dan pilihan inilah yang menjadi inti dari kenegarawanan. Lansiran pilihan dalam isu lingkungan inilah yang kemudian diberikan kerangka pikirnya sebagai ekoteologi, yaitu adanya tanggung jawab moral dan keagamaan dalam pelestarian lingkungan.

C. Nilai Universal Kosmologi Penciptaan: Menghadirkan Daya Tahan

Sejak manusia pertama kali menatap langit malam yang penuh bintang, pertanyaan paling mendasar muncul: dari manakah segala sesuatu berasal, dan ke manakah semua akan kembali? Pertanyaan tentang asal-usul jagat raya itu sejatinya bukan hanya milik para filsuf atau ilmuwan, melainkan juga menjadi inti dari hampir semua tradisi keagamaan. Kosmologi penciptaan adalah bahasa yang dipakai agama-agama untuk berbicara tentang hubungan manusia dengan kosmos, dengan sang Pencipta, dan dengan makna kehidupan.

Kosmologi tidak sekadar menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk, tetapi juga menjadi jendela untuk memahami nilai-nilai universal yang dijunjung manusia. Dengan menelisik kisah-kisah penciptaan dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Khonghucu, dan tradisi lokal Nusantara, kita dapat menemukan benang merah yang menghubungkan semuanya. Hal itu terkait pandangan keberadaan manusia bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari tatanan kosmik yang lebih besar, penuh makna, dan menuntut tanggung jawab moral.

Dalam kitab suci Kristen dan Katolik, khususnya dalam Kitab Kejadian, kosmologi penciptaan dituturkan sebagai kisah enam hari penciptaan. Tuhan menciptakan langit, bumi, cahaya, air, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Narasi ini menggambarkan keteraturan ilahi. Aspek terpenting bukan hanya kronologi, melainkan penekanan bahwa alam semesta ini “sungguh amat baik.” Kosmos dipandang sebagai karya seni Ilahi, yang mengandung kebaikan mendasar dan harmoni. Penciptaan manusia “menurut gambar dan rupa Allah” menegaskan martabat luhur manusia, tetapi sekaligus menghadirkan tanggung jawab untuk merawat ciptaan. Dalam pandangan Kristen, kosmologi adalah ajakan untuk menjaga bumi, bukan sekadar memanfaatkannya.

Dalam Islam, al-Qur’an menuturkan penciptaan dalam berbagai ayat yang penuh kedalaman simbolis. Allah disebut sebagai Rabb al ‘Alamin, Tuhan semesta alam. Kosmos diciptakan bukan dengan main-main, melainkan dengan tujuan. “Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia” (QS. Shaad: 27). Alam semesta adalah tanda-tanda (ayat) yang mengarahkan manusia kepada sang Pencipta. Dalam Islam, penciptaan Adam dari tanah liat lalu ditiupkan ruh, menekankan dua sisi manusia: fisik yang rendah hati karena berasal dari tanah, dan ruh ilahi yang mengangkat martabatnya. Kosmologi ini mengajarkan kesadaran manusia adalah khalifah di bumi, yang harus menjaga keseimbangan antara langit dan bumi, antara jasmani dan rohani.

Sementara dalam Hindu, kisah penciptaan digambarkan dengan kekayaan mitos dan simbol. Salah satunya adalah Purusha Sukta dalam Rigveda, yang menuturkan alam semesta lahir dari pengorbanan kosmik Purusha, manusia

kosmik. Dari tubuhnya lahirlah para dewa, bumi, langit, dan seluruh tatanan sosial. Konsepsi ini menegaskan pandangan bahwa kosmos adalah satu tubuh besar, di mana setiap makhluk adalah bagian darinya. Prinsip dharma lahir dari kosmologi ini, yaitu kewajiban untuk menjaga keteraturan kosmik. Kehidupan manusia tidak boleh terlepas dari keseimbangan universal. Dalam Hindu, penciptaan bukan peristiwa sekali jadi, melainkan siklus tanpa henti antara penciptaan (srishti), pemeliharaan (sthiti), dan peleburan (pralaya), yang diatur oleh trinitas Brahma, Wisnu, dan Siwa.

Kosmologi Buddha terkait penciptaan dan evolusi alam semesta menurut ajaran Buddha didasarkan pada kemampuan penglihatan waskita seorang Buddha, atau makhluk suci seperti Bodhisatwa maupun Arahat yang tertulis dalam Kitab Suci agama Buddha. Adapun seluruh alam semesta terdiri dari lima elemen dasar yaitu elemen tanah, air, api, udara dan ruang.

Ajaran Buddha meyakini adanya hubungan erat antara moralitas manusia dan lingkungan alam. Gagasan ini kemudian disistematisasikan dalam konsep tentang lima hukum alam (Pali: pańcaniyāma, pańcaniyāmadhamma, pańcavidhaniyāma) yang terdiri dari:

(i) Utu Niyāma: hukum tertib kosmis keteraturan musim (fisika);

(ii) Bīja Niyāma: hukum tertib kosmis keteraturan benih atau genetika (biologi);

(iii) Kamma Niyāma: hukum tertib kosmis keteraturan sebab akibat perbuatan (kausal); (iv) Citta Niyāma: hukum tertib kosmis keteraturan batin (psikologi); dan

(v) Dhamma Niyāma: hukum tertib kosmis keteraturan fenomena (dhamma).

Dalam Buddhisme, meskipun tidak menekankan penciptaan oleh Tuhan personal, tetapi kosmologi hadir dalam bentuk siklus samsara dan konsep alam eksistensi. Jagad raya dipahami sebagai tanpa awal dan tanpa akhir yang bersifat absolut. Namun, bukan berarti kosong dari makna. Penciptaan dipandang sebagai proses terkait dengan hukum Karma Niyāma berdasarkan siklus upāda – muncul, hiti – bertahan sementara, bhanga – luruh/Lenyap. Nilai universal yang bisa ditarik adalah kesadaran tentang ketidak-kekalan (anitya), yang mengajarkan manusia untuk tidak terikat pada ilusi keabadian siklus samsara, melainkan menapaki jalan menuju pencerahan.

Menurut Agańńa Sutta, alam semesta tidak diciptakan oleh Tuhan, melainkan melalui proses evolusi alami yang tak berawal dan tak berakhir, dimulai dari keadaan cahaya di alam Brahma sebelum kemudian membentuk dunia dengan air dan tanah. Perkembangan lebih lanjut dipicu oleh keserakahan manusia untuk mengumpulkan makanan dan harta, yang akhirnya menyebabkan hilangnya cahaya tubuh, munculnya perbedaan sosial, penetapan hukum, dan terbentuknya sistem kekuasaan tertentu.

Dalam Khonghucu, kosmologi berpangkal pada prinsip Tian, langit yang melahirkan dan menopang segala sesuatu. Konsep Dao dan Yin-Yang menggambarkan dinamika kosmos yang penuh harmoni. Alam semesta dipandang sebagai cermin keteraturan moral. Hubungan manusia dengan kosmos bersifat etis: manusia dituntut untuk meneladani keseimbangan alam dalam kehidupan sosial dan pribadi. Dengan demikian, kosmologi bukan sekadar pengetahuan tentang langit dan bumi, tetapi pedoman hidup yang menekankan harmoni, keselarasan, dan tanggung jawab moral.

Di Nusantara, tradisi lokal juga kaya akan kosmologi penciptaan. Masyarakat Jawa, misalnya, mengenal mitos asal-usul manusia dari hubungan kosmik

antara langit dan bumi. Suku Batak memiliki kisah penciptaan yang menekankan turunnya manusia pertama dari Banua Ginjang (dunia atas) ke Banua Tonga (dunia tengah), yang melahirkan kewajiban menjaga hubungan selaras antara manusia, alam, dan roh leluhur. Di Bali, ada konsep rwa bhineda, dualitas kosmik yang saling melengkapi seperti terang dan gelap, baik dan buruk.

Dalam masyarakat Dayak, kosmologi diceritakan melalui mitos tentang burung enggang yang menjadi perantara antara langit dan bumi. Semua itu menunjukkan bahwa religi tradisional Nusantara pun menempatkan manusia dalam jaringan kosmik yang suci, di mana keseimbangan dan harmoni adalah kunci kehidupan.

Jika ditelaah secara mendalam, semua kosmologi penciptaan ini mengandung nilai universal:

1. Alam semesta bukanlah kebetulan, melainkan memiliki tujuan, makna, dan keteraturan.
2. Manusia bukan sekadar penonton, melainkan bagian aktif dari kosmos, dengan tanggung jawab moral.
3. Kosmologi selalu berhubungan dengan etika: bagaimana manusia hidup, bagaimana mereka memperlakukan alam, sesama, dan Sang Pencipta. Dengan kata lain, kosmologi bukan sekadar tentang asal-usul, melainkan tentang orientasi hidup.

Namun di tengah modernitas, kosmologi penciptaan sering kali dianggap mitos belaka, kalah oleh narasi ilmiah tentang Big Bang atau evolusi kosmik. Sains memberi penjelasan yang akurat tentang mekanisme terbentuknya alam semesta, tetapi ia tidak mampu menjawab pertanyaan mengapa ada sesuatu dan bukan ketiadaan, atau apa makna keberadaan. Di sinilah kosmologi agama tetap relevan. Ia tidak harus bertentangan dengan sains, melainkan melengkapinya. Seperti kata Einstein, “Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh.” Sains menjelaskan cara, agama menjawab makna.

Kritik yang perlu diajukan adalah kosmologi agama ketika dipahami secara sempit dan dogmatis, sering kali menjadi sumber konflik antar-agama. Kisah penciptaan yang seharusnya menuntun pada kesadaran universal malah dijadikan alat untuk menegaskan klaim kebenaran eksklusif. Padahal, jika kita membaca lebih dalam, setiap agama menekankan nilai yang sama: keteraturan, harmoni, tanggung jawab, dan tujuan hidup yang lebih tinggi. Tugas kita hari ini adalah membuka ruang dialog kosmologis antar-agama, untuk menemukan nilai-nilai universal yang bisa memperkuat solidaritas manusia di tengah krisis global, terutama krisis ekologi yang mengancam bumi.

Kosmologi penciptaan mengajarkan bahwa alam semesta adalah suci. Ia bukan sekadar sumber daya untuk dieksploitasi, melainkan rumah bersama yang harus dirawat. Dalam dunia yang terancam oleh perubahan iklim, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, kesadaran kosmologis antar-agama bisa menjadi fondasi etika ekologis global. Manusia perlu kembali memahami dirinya sebagai bagian dari kosmos, bukan penguasa tunggal. Kesadaran bahwa kita semua berasal dari debu kosmik yang sama, dan kembali ke sana, seharusnya menumbuhkan kerendahan hati sekaligus solidaritas universal.

Pada akhirnya, kosmologi penciptaan dari berbagai agama bukanlah cerita yang terpisah-pisah, melainkan harmoni polifonik yang saling melengkapi. Mereka adalah upaya manusia sepanjang zaman untuk memahami misteri terbesar: mengapa ada jagat raya ini, dan apa makna keberadaan kita di dalamnya. Jika

kita mampu melihat nilai universal di dalamnya, maka kosmologi penciptaan bukan hanya menjadi bagian dari iman, melainkan juga sumber kebijaksanaan untuk membangun dunia yang lebih adil, damai, dan selaras dengan kosmos. Seperti kata Rumi, "Kamu bukan setetes air di samudera, kamu adalah seluruh samudera dalam setetes air." Kosmologi penciptaan, pada akhirnya adalah cermin dari kesadaran bahwa manusia dan alam semesta adalah satu dalam keabadian misteri sang Pencipta.

D. Krisis Spiritual sebagai Akar Masalah Ekologi

Krisis ekologi tidak semata disebabkan oleh motif pemenuhan kebutuhan manusia. Di dalamnya ada motif internal yang jauh melampaui kebutuhan. Keinginan ekonomi berlebih menciptakan kerakusan, menjadi aspek kepudaran spiritualitas paling kentara dari penyebab kerusakan lingkungan. Novel Momo yang ditulis oleh Michael Ende pada tahun 1973, menghadirkan alegori kuat tentang manusia modern yang diperdaya oleh "tentara abu-abu"—makhluk yang mencuri waktu, kesadaran, dan makna hidup-, manusia lalu menukarnya dengan uang, ketenaran, dan apapun yang diminta.

Kisah di atas mencerminkan disorientasi eksistensial manusia di era modern: kehilangan kedalaman spiritual, terjebak dalam logika efisiensi, dan menjadi budak waktu. Fenomena ini sejajar dengan kritik teologi Minjung yang dikembangkan oleh Byung-Mu Ahn dan Suh Nam-Dong di Korea Selatan pada dekade 1970-an. Teologi ini menolak modernitas yang menuhankan percepatan produksi, industrialisasi, dan urbanisasi, karena semua itu melahirkan keterasingan spiritual dan sosial. Dalam pandangan mereka, manusia modern kehilangan ruang untuk refleksi iman dan kesadaran kosmik yang menyatukan diri dengan sesama serta alam.

Indonesia yang dikenal dengan nasionalisme ketuhanan (Godly nationalism) memiliki populasi umat beragama 279 juta jiwa (cut off BPS, 2024-2025). Namun Indeks Kesalehan Sosial (IKS) 2024 sebesar 83,83, dan skor "Melestarikan Lingkungan" masih rendah di angka 72,16. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan relasi individu dengan negara (90,38) dan Etika (87,18). Rendahnya nilai pelestarian lingkungan terlihat juga pada peringkat Indonesia yang menjadi negara paling berpolusi di Asia Tenggara pada 2024. Tingkat polusinya berdasarkan IQAir menunjukkan angka konsentrasi pada PM2,5 35,5 µg/mł, dan berdasarkan data SIPSN KLHK terjadi timbunan sampah nasional 2023 yang mencapai 31,9 juta ton. Sejumlah 11,3 juta ton (35,67%) tidak atau belum terkelola dengan baik.

Krisis spiritualitas umat beragama, sebagaimana dihipotesiskan dalam buku ekoteologi dan sejalan dengan pandangan akademisi, menjadi penyebab kesenjangan antara idealisme agama dan realitas krisis lingkungan. Realitas ini mencerminkan tantangan besar dalam harmonisasi nilai agama dengan pelestarian lingkungan.

Dengan demikian, akar dari krisis ekologis bukan hanya pada rusaknya ekosistem, melainkan pada hilangnya kesadaran spiritual yang menempatkan manusia dalam jaring kosmos kehidupan yang saling bergantung. Ia berakar pada kehilangan rasa hormat terhadap kehidupan. Ketika manusia melihat dirinya sebagai pusat dan penguasa tunggal, maka alam direduksi menjadi obyek, mesin produksi, dan komoditas. Dalam cara pandang ini, air hanyalah sumber energi, hutan hanyalah kayu dan lahan, hewan hanyalah daging, dan tanah hanyalah bahan bangunan.

Pandangan yang antroposentris ini meniadakan rasa hormat terhadap kesucian kehidupan. Alam kehilangan statusnya sebagai bagian dari tubuh kosmik yang hidup dan bermakna. Hilanglah kesadaran bahwa semua itu adalah bagian dari tubuh kosmik yang hidup, penuh makna, dan suci. Fenomena inilah yang mengarah pada krisis spiritual: hilangnya kesadaran bahwa dunia adalah rumah bersama yang harus dijaga. Pemulihan ekologis karenanya tidak dapat dilepaskan dari pemulihan spiritual—mengembalikan iman sebagai ruang refleksi, menumbuhkan kembali rasa takzim pada ciptaan, serta memandang dunia bukan sebagai mesin produksi, melainkan sebagai rumah suci kehidupan bersama.

Agama-agama besar di dunia sejak awal telah memberi manusia peta untuk memahami dirinya di tengah kosmos, seperti telah sedikit dikemukakan di atas. Gereja Katolik dalam Laudato Si', Paus Fransiskus menegaskan bahwa alam bukan sekadar objek yang dapat dikuasai, melainkan sesama ciptaan yang memiliki nilai intrinsik. Ensiklik ini, yang terinspirasi dari spiritualitas Santo Fransiskus Asisi, mengajak manusia untuk memandang alam sebagai "saudari" dan "saudara"—seperti "Saudari Air" dan "Saudara Matahari"—yang patut dihormati dan dirawat dengan kasih serta tanggung jawab, sebab seluruh ciptaan merupakan anugerah Allah yang saling terhubung.

Pandangan ini sejalan dengan ajaran Kristen sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Suci Kejadian 2:4, yang menegaskan kesatuan eksistensial manusia dengan semesta: "Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan." Ayat ini mengandung makna teologis mendalam bahwa manusia bukan entitas terpisah dari ciptaan, melainkan bagian dari "riwayat" yang sama—cerita besar kehidupan yang menghubungkan langit, bumi, dan seluruh makhluk di dalamnya. Dengan demikian, relasi antara manusia dan alam bukan hubungan kuasa, tetapi relasi kekerabatan kosmik yang menuntut penghormatan, perawatan, dan tanggung jawab spiritual.

Kekristenan menegaskan bahwa bumi dan seluruh isinya adalah ciptaan yang "sungguh amat baik" (Kejadian 1:31)—sebuah pernyataan yang menempatkan alam dalam posisi suci dan layak dihormati, bukan dieksploitasi. Dalam kerangka ini, spiritualitas Sabat menjadi simbol teologis yang amat penting. Sabat bukan hanya hari perhentian bagi manusia, tetapi juga bagi bumi dan seluruh ciptaan. Dalam Keluaran 23:10–12 dan Imamat 25:4, diperintahkan agar tanah dibiarkan beristirahat pada tahun ketujuh, agar bumi pun memperoleh waktu pemulihan. Ini menunjukkan bahwa ritme kehidupan tidak hanya milik manusia, melainkan juga bagian dari siklus kosmis yang dijaga oleh Allah.

Prinsip di atas mencapai puncaknya dalam Tahun Yobel (Imamat 25:8–12), ketika tanah yang dijual harus dikembalikan, utang dihapuskan, dan relasi sosial dipulihkan. Tahun Yobel merupakan momentum pembaruan ekologis dan sosial: bumi dipulihkan dari eksploitasi, dan manusia diingatkan akan batas moral dalam kepemilikan serta penggunaan sumber daya alam. Melalui Sabat dan Yobel, kitab suci menegaskan bahwa keadilan ekologis dan spiritual berjalan seiring—bahwa menjaga keseimbangan ciptaan berarti menghormati Allah sebagai Sang Pencipta. Dengan menghayati prinsip-prinsip ini, manusia diundang untuk hidup dalam kesadaran ritmis yang selaras dengan bumi, memberi ruang bagi ciptaan untuk beristirahat, tumbuh, dan bernapas bersama seluruh kehidupan.

Islam memberikan gambaran serupa. Manusia disebut sebagai khalifah di bumi, “Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah di bumi” (QS. Fathir: 39). Peran khalifah adalah menjaga, bukan merusak. Al-Qur’an menekankan pentingnya keseimbangan: “Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan neraca (keseimbangan), supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu” (QS. Ar-Rahman: 7–8). Peringatan lain berbunyi, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya” (QS. Al-A’raf: 56). Upaya berbuat adil kepada kesemestaan, termasuk lingkungan, selalu ditegaskan dalam berbagai ayat. Ajaran Islam menegaskan merusak alam bukan hanya persoalan praktis, melainkan pelanggaran moral terhadap hukum ilahi.

Dalam Hindu, kisah Purusha Sukta dalam Rigveda menggambarkan bahwa alam semesta lahir dari pengorbanan kosmik Purusha. Dari tubuhnya lahir langit, bumi, para dewa, dan manusia (Rigveda X:90). Upanishad mengajarkan, “Segala yang ada di dunia ini diliputi oleh Tuhan” (Isha Upanishad 1). Kosmos adalah tubuh suci, sehingga merusak alam berarti melukai wujud Yang Ilahi. Prinsip dharma menuntut manusia untuk menegakkan keteraturan kosmik. Kosmos berjalan dalam siklus penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Jika manusia mengabaikan ritme ini, maka kekacauanlah yang lahir.

Buddhisme melihat kosmos dalam kerangka hukum sebab-akibat. Semua makhluk saling bergantung, tak ada yang berdiri sendiri. Krisis lingkungan adalah akibat dari pikiran yang dikuasai oleh keserakahan. Jalan keluar hanya mungkin bila manusia memurnikan batinnya.

“Sekalipun kepadatan penduduk bertambah karena tingkat kematian menurun atau harapan hidup manusia meningkat, alam akan selalu cukup memenuhi kebutuhan hidup semua penghuninya, akan tetapi tidak pernah cukup untuk memenuhi keinginan dari satu orang serakah.....”

(Cakkavatti Sihanada Sutta, Digha Nikaya III: 75). (D.iii.75)

“Hentikanlah keburukan, lakukanlah kebajikan, sucikanlah pikiran. Itulah ajaran para Buddha” (Dh.183). Kesadaran spiritual ini menuntun pada laku hidup sederhana, penuh welas asih, dan sadar bahwa semua perbuatan berdampak. Dalam konteks pelestarian alam, Kutadanta Sutta mengajarkan bahwa perbuatan merusak lingkungan seperti membunuh banyak binatang untuk pengorbanan, membuang sampah sembarangan, dan perburuan liar akan mendatangkan bencana alam, sementara memelihara alam seperti hutan, taman, dan sumber air akan mendatangkan kebajikan. Buddha menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari praktik Dhamma dan kebajikan spiritual umat Buddha.

Dalam kosmologi Khonghucu menekankan keselarasan antara langit, bumi, dan manusia (Tian 天, Di地, Ren 人) disebut Sancai 三才. “Pohon-pohonan dipotong hanya bila tepat waktunya. Burung, hewan dipotong hanya bila tepat pada waktunya.” Nabi bersabda: “Sekali menebang pohon, sekali memotong hewan, tidak tepat pada waktunya, itu tidak berbakti.”(Kitab Li Ji ( ) XXI (Ii): 13). Ayat ini menekankan pada pelestarian alam.

Di Nusantara kaya akan kearifan ekologis. Sebut saja misalnya di Bali, Tri Hita Karana mengajarkan harmoni dengan Tuhan, sesama, dan alam. Di Maluku, praktik sasi membatasi penangkapan hasil laut agar alam punya waktu untuk pulih. Di Jawa, ada hutan larangan yang dianggap suci dan tak boleh diganggu. Di Sumatra dan Kalimantan, masyarakat adat menjaga tanah ulayat dan hutan

sebagai bagian dari dunia roh. Semua ini adalah spiritualitas ekologis yang tumbuh dari pengalaman panjang hidup bersama alam.

Namun modernitas datang membawa paradigma baru. Kapitalisme global memandang bumi sebagai sumber daya tak terbatas. Pertumbuhan ekonomi dijadikan tujuan akhir, seakan bumi bisa menopang produksi tanpa batas. Nilai kehidupan direduksi menjadi harga pasar. Alam kehilangan martabat, manusia kehilangan rasa cukup. Hilangnya kesadaran spiritual inilah yang melahirkan gaya hidup konsumtif yang merusak.

Padahal, hampir semua tradisi spiritual menekankan kesederhanaan. Dalam Islam ada qana'ah, sikap merasa cukup. Dalam Hindu ada santosha, kepuasan batin. Dalam Buddhisme ada jalan tengah, menolak ekstrem. Dalam Kristen dan Katolik ada Sabat, Tahun Yobel, jeda dari produksi eksploitasi. Dalam tradisi lokal (Minangkabau) ada pepatah "alam takambang jadi guru." Semua nilai ini menunjukkan bahwa kebahagiaan lahir bukan dari menumpuk barang, melainkan dari hidup dalam harmoni.

Dengan demikian, pemulihan ekologi memerlukan pemulihan spiritual. Pada tingkat pribadi, manusia perlu belajar kembali membedakan kebutuhan dan keinginan. Batas bukan belenggu, melainkan jalan menuju kebebasan sejati. Pada tingkat komunitas, rumah ibadah dan lembaga adat bisa menjadi pusat pembelajaran ekologis. Doa harus diwujudkan dalam aksi nyata: menanam pohon, mengurangi sampah, dan mengelola energi. Pada tingkat kebijakan, spiritualitas harus diterjemahkan ke dalam hukum yang adil: perlindungan kawasan suci ekologis, penghentian eksploitasi berlebihan, dan perlindungan masyarakat adat yang menjaga hutan.

Namun kita juga harus berhati-hati. Tidak semua yang disebut spiritual otomatis baik. Ada bahaya romantisme yang memuja "kembali ke alam" tanpa memperhatikan keadilan. Bila pola hidup sederhana hanya dapat diakses kelompok tertentu, spiritualitas bisa menjadi elitisme. Ada risiko agama dipakai sebagai slogan hijau tanpa kebijakan nyata. Spiritualitas sejati justru menghadapi kenyataan keras: konflik kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan ketegangan antara kebutuhan hari ini dan keberlanjutan esok.

Spiritualitas ekologis adalah pertemuan antara doa dan tindakan. Ia tidak berhenti di ruang sunyi, melainkan diwujudkan dalam keberanian menentang sistem yang merusak. Ia bukan hanya renungan pribadi, melainkan juga solidaritas sosial. Ia bukan hanya kata-kata, melainkan gaya hidup baru: cara kita makan, bepergian, bekerja, membangun kota, dan memandang bumi.

Krisis spiritual yang melahirkan krisis ekologi adalah undangan untuk pulang. Pulang bukan berarti mundur ke masa lalu, melainkan kembali pada cara memandang dunia dengan hormat. Bumi bukan gudang, melainkan rumah. Alam bukan mesin, melainkan saudara. Manusia bukan tuan, melainkan penjaga. Bila kesadaran ini hidup, maka tindakan sehari-hari, mengurangi sampah, menanam pohon, dan menggunakan energi seperlunya, menjadi doa dalam perbuatan.

Syair Jalaluddin Rumi sebagaimana di atas, "Kamu bukan setetes air di samudera, kamu adalah seluruh samudera dalam setetes air" merangkum inti spiritualitas ekologis. Krisis ini adalah cermin dari krisis batin, tetapi juga peluang lahirnya peradaban baru yang lebih rendah hati, penuh kasih, dan selaras dengan kosmos. Bila manusia berani berubah, bumi pun akan pulih. Pada akhirnya, bumi akan sebaik hati manusia yang menjaganya.

E. Lahirnya Pemikiran Ekoteologi

Krisis ekologi yang kian nyata dalam beberapa dekade terakhir bukan hanya masalah teknis atau ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi batin manusia. Polusi udara, pemanasan global, deforestasi, dan kepunahan spesies adalah gejala lahiriah dari pandangan dunia yang menempatkan manusia sebagai pusat, sementara alam direduksi menjadi sekadar objek yang bisa dieksploitasi tanpa batas.

Dari sinilah lahir kebutuhan untuk meninjau kembali warisan spiritual dan religius, untuk mencari dalam teks suci dan tradisi agama sumber daya moral yang dapat menuntun manusia keluar dari kebuntuan ekologis. Proses ini kemudian dikenal sebagai ekoteologi, yakni pemikiran yang mengaitkan iman dengan tanggung jawab ekologis. Ekoteologi tidak muncul tiba-tiba, melainkan lahir dari dinamika sejarah, refleksi filosofis, dan kesadaran religius yang tumbuh menghadapi krisis global.

Menteri Agama RI, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A.

Dalam tradisi Kristen dan Katolik, lahirnya ekoteologi tidak bisa dilepaskan dari kritik Lynn White Jr. dalam artikelnya yang terkenal, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis (1967). White menuduh bahwa interpretasi dominan terhadap Kitab Kejadian, khususnya perintah untuk "berkuasa" atas bumi (Kejadian 1:28), telah melahirkan sikap antroposentris yang melegitimasi eksploitasi alam. Pandangan ini memicu diskusi panjang dalam teologi Kristen dan Katolik. Sejumlah teolog kemudian mengajukan reinterpretasi, dengan menekankan mandat itu sebenarnya adalah panggilan untuk merawat ciptaan, bukan merusaknya.

Misalnya, Jürgen Moltmann mengembangkan Theology of Creation yang menekankan hubungan saling ketergantungan antara manusia, alam, dan Allah. Ia menegaskan bahwa ciptaan bukan milik manusia, melainkan milik Allah, dan karenanya harus dihormati. Pandangan ini membawa teologi Kristen ke arah yang lebih kosmosentris, menempatkan alam bukan sekadar latar bagi drama manusia, tetapi bagian integral dari keselamatan.

Islam juga memiliki tradisi spiritual yang kaya untuk membangun ekoteologi. Al-Qur'an berulang kali menekankan konsep keseimbangan (mīzān). "Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan neraca (keseimbangan), supaya

kamu jangan merusak keseimbangan itu" (QS. Ar-Rahman: 7–8). Manusia diposisikan sebagai khalifah, wakil Allah di bumi, dengan tugas utama menjaga amanah ciptaan (QS. Fathir: 39).

Dari sinilah para pemikir Muslim kontemporer seperti Seyyed Hossein Nasr menekankan bahwa krisis ekologi adalah akibat dari krisis spiritual modernitas yang memisahkan manusia dari alam dan Tuhan. Ekoteologi Islam, dengan demikian mengajak untuk melihat alam sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan (ayat kauniyah) yang harus dihormati. Dalam tradisi sufi, relasi dengan alam bahkan lebih intim: angin, air, dan batu bukan hanya materi, tetapi cermin dari kehadiran Ilahi. Jalaluddin Rumi menulis, "Setiap daun pohon adalah halaman kitab yang mengajarkan tentang Tuhan".

Dalam Hindu, konsep ekoteologi berakar pada pemahaman kosmik tentang Brahman sebagai sumber segala sesuatu. Isha Upanishad menegaskan, "Segala yang ada di dunia ini diliputi oleh Tuhan" (Isha Upanishad, mantra 1). Dengan demikian, merusak alam berarti melukai dimensi ilahi. Prinsip dharma mengajarkan keteraturan kosmik yang harus dijaga. Kitab Bhagavad Gita III. 14–15 menyebutkan bahwa kehidupan bergantung pada makanan, makanan berasal dari hujan, hujan lahir dari pengorbanan, dan pengorbanan bersumber dari hukum kosmik. Rangkaian ini menegaskan siklus saling ketergantungan. Karenanya, ekoteologi Hindu tidak hanya berbicara tentang etika ekologis, tetapi juga tentang spiritualitas yang menuntut keharmonisan dengan ritme kosmos. Tidak mengherankan jika ritual-ritual Hindu, seperti upacara yajńa, sering dikaitkan dengan penghormatan pada elemen alam: api, air, bumi, dan udara.

Dalam Dhammapada disebutkan, "Hentikanlah keburukan, lakukanlah kebajikan, sucikanlah pikiran" (Dhammapada 183). Ajaran sederhana ini, bila diterapkan pada konteks ekologi, mengarah pada gaya hidup sederhana, penuh perhatian, dan berwelas asih terhadap semua makhluk.

Buddhisme menekankan kesadaran Bhuvana Smrti (Pali: Bhuvana Sati) terhadap prinsip hukum pratītyasamutpāda yang berarti tidak ada suatu makhluk atau fenomena yang eksis secara terpisah. Krisis ekologi dalam perspektif Buddhis, merupakan akibat langsung dari tiga racun batin: keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Ajaran Buddhadasa, seorang biksu Thailand, mengembangkan gagasan Dharmic Socialism, di mana masyarakat ideal adalah yang hidup selaras dengan hukum alam. Dalai Lama juga menegaskan bahwa ekologi bukanlah isu sekuler semata, melainkan inti dari praktik welas asih universal.

Pohon-pohon dan manusia berada dalam lingkup hukum interdependensi-sebab musabab yang saling mempengaruhi (Hukum Paticcasamupada) yang disebut sebagai Jala Indra (Jaring Indra, Permata Indra atau Mutiara Indra), manusia bagaikan pohon dan udara, belukar dan awan. Bila pepohonan tidak dapat hidup, manusia tidak dapat hidup pula. Manusia saling tali-temali, itulah tatanan alam semesta antarmakhluk dan lingkungannya (Avatamsaka Sutra).

Jalaindra merupakan sebuah mitologi dalam agama Buddha yang merupakan sebuah metafora yang digunakan untuk menggambarkan konsep Shunyata (kekosongan) dan hukum Pratītyasamutpāda (sebab-musabab yang saling bergantungan).

Terkait dengan kesadaran ekologi bahwa lingkungan fisik suatu daerah tertentu menentukan pertumbuhan dan perkembangan komponen biologisnya, baik flora maupun faunanya. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi pola

pikir orang-orang yang berinteraksi dengannya. Cara berpikir menentukan standar moral. Proses interaksi yang berlawanan juga mungkin terjadi. Moral manusia mempengaruhi tidak hanya susunan psikologis orang-orang tetapi juga lingkungan biologis dan fisik daerah tersebut. Dengan demikian, kelima hukum pańcaniyāmadhamma menunjukkan bahwa manusia dan alam terikat bersama dalam hubungan kausal timbal balik dengan perubahan pada satu hal yang tentu saja akan menyebabkan perubahan pada hal lainnya terjadi.

Agama Khonghucu pun memiliki dasar kuat untuk melahirkan ekoteologi, menekankan harmoni antara Langit (Tian 天), Bumi (Di 地), dan manusia (Ren 人). Dalam kitab Zhong Yong (Tengah Sempurna III: IV) dapat dimaknai sebagai berikut, hanya mereka yang mampu sepenuhnya mengikuti Jalan Suci (Dao), merekalah yang dapat membentuk satu tubuh dengan Langit dan Bumi. Prinsip ini mengajarkan bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian dari harmoni kosmik yang lebih besar.

Di Nusantara, lahirnya ekoteologi tidak bisa dilepaskan dari kearifan lokal yang diwariskan masyarakat adat. Di Bali, misalnya, dikenal konsep Tri Hita Karana, harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Konsep ini secara langsung menuntun pada praktik ekologis: irigasi subak bukan hanya sistem teknis, tetapi juga ritus religius yang memastikan keseimbangan. Di Maluku, praktik sasi membatasi eksploitasi laut dan hutan untuk menjaga keberlanjutan. Di Kalimantan dan Sumatra, masyarakat adat menjaga hutan larangan yang dianggap sakral. Semua ini menunjukkan bahwa spiritualitas lokal telah lama memiliki dimensi ekoteologi, meski tidak disebut dengan istilah itu.

Lahirnya pemikiran ekoteologi lintas agama menunjukkan bahwa agama-agama memiliki kapasitas besar untuk memberi arah moral dan spiritual dalam menghadapi krisis ekologi. Namun, ekoteologi tidak cukup berhenti pada refleksi teoretis. Tantangan terbesar adalah menerjemahkannya ke dalam praksis nyata. Di sinilah muncul kritik. Banyak institusi agama yang masih terjebak pada retorika hijau, sementara praktik sehari-hari mereka justru bertentangan dengan prinsip ekologi. Rumah ibadah yang boros energi, kegiatan keagamaan yang menghasilkan sampah plastik, dan minimnya kurikulum ekologi di lembaga pendidikan agama adalah contoh nyata kesenjangan ini.

Ekoteologi yang sejati menuntut keberanian untuk merombak gaya hidup, baik di tingkat pribadi maupun kelembagaan. Kritik ini penting agar ekoteologi tidak menjadi kosmetik, melainkan energi transformatif. Seperti yang dikatakan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si' (2015): "Kerusakan lingkungan adalah cermin dari kerusakan batin manusia." Kalimat ini menunjukkan bahwa ekoteologi bukan hanya tentang bumi, tetapi juga tentang manusia. Bila batin manusia dipenuhi keserakahan, maka bumi pun akan rusak. Sebaliknya, bila batin manusia dipenuhi welas asih, bumi pun akan pulih.

Lahirnya pemikiran ekoteologi dalam agama-agama harus dilihat sebagai babak penting dalam perjalanan spiritual umat manusia. Ia adalah undangan untuk pulang, kembali memandang alam bukan sebagai objek, melainkan sebagai sahabat, guru, dan saudara. Albert Schweitzer, filsuf dan teolog, pernah berkata, "Etika sejati hanya muncul dari penghormatan terhadap kehidupan". Dari penghormatan inilah ekoteologi tumbuh. Jika agama-agama mampu menghidupi visi ini, maka peran mereka dalam menyelamatkan bumi akan menjadi nyata.

Ekoteologi akhirnya adalah jembatan antara iman dan bumi. Ia menegaskan bahwa berdoa tidak cukup tanpa aksi ekologis, dan mencintai Tuhan tidak mungkin tanpa mencintai ciptaan-Nya. Ia adalah panggilan merawat taman dunia yang sedang terluka. Bila umat manusia menjawab panggilan ini, krisis ekologi bukanlah akhir, melainkan awal dari peradaban yang lebih rendah hati, penuh kasih, dan selaras dengan kosmos.

F. Pemantik Daya Tahan Keagamaan: Penanganan Krisis Ekologi

Isu ekologi kini tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan teknis semata, melainkan telah menjadi bagian strategis dari pembangunan nasional. Indonesia menghadapi tantangan besar berupa krisis iklim, kerusakan hutan, pencemaran laut, polusi udara, sampah, serta bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi. Kesadaran akan hal ini tercermin dalam dua dokumen penting: Asta Cita sebagai arah kebijakan nasional, dan Asta Protas (Arah Strategis Program Prioritas) yang disusun Kementerian Agama sebagai strategi sektoral. Keduanya menegaskan bahwa perlindungan lingkungan adalah fondasi keberlanjutan bangsa, bukan sekadar agenda tambahan. Asta Cita, yang menjadi landasan pembangunan Indonesia 2020–2024 memuat delapan prioritas strategis. Salah satunya adalah memperkuat ketahanan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam kerangka ini, pemerintah menekankan transisi energi bersih, pengendalian emisi, restorasi ekosistem gambut dan mangrove, serta pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Program pembangunan rendah karbon dan FOLU Net Sink 2030, yang menargetkan sektor kehutanan dan lahan agar menjadi penyerap karbon bersih, masuk sebagai instrumen utama. Asta Cita dengan demikian tidak hanya berbicara soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan itu tidak merusak daya dukung bumi. Keselarasan pembangunan dan konservasi menjadi mandat, sehingga pembangunan jalan, energi, atau pangan harus menghitung dampak ekologis sejak tahap perencanaan.

Di sisi lain, Kementerian Agama melalui Asta Protas (Arah Strategis Program Prioritas) memaknai isu lingkungan dari perspektif moral dan spiritual. Asta Protas menekankan bahwa agama tidak boleh diam dalam menghadapi krisis ekologi. Nilai-nilai keberagamaan harus diterjemahkan dalam tindakan nyata, seperti pendidikan ekoteologi di madrasah dan pesantren, pengelolaan rumah ibadah yang ramah lingkungan, hingga gerakan hemat energi dan pengurangan plastik sekali pakai di lingkungan kerja Kementerian Agama. Program moderasi beragama juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kerusakan alam adalah bentuk ketidakadilan antar-generasi. Dengan bahasa sederhana, Asta Protas mengingatkan bahwa mencintai Tuhan harus diwujudkan dengan merawat ciptaan-Nya.

Hadirnya dua visi utama di atas menunjukkan pendekatan ganda yang saling melengkapi. Asta Cita bekerja di ranah kebijakan makro: energi, ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola sumber daya alam. Asta Protas menembus ruang kehidupan sehari-hari umat, menghubungkan ajaran agama dengan praktik sederhana seperti penghijauan halaman sekolah atau pemilahan sampah di masjid. Bila keduanya dijalankan konsisten, terbentuklah jembatan antara kebijakan negara dan gerakan masyarakat.

Meski demikian, kritik perlu diajukan. Tantangan terbesar ada pada implementasi. Asta Cita sering tersendat oleh tarik-menarik kepentingan ekonomi, dan Asta Protas berisiko terjebak pada simbolisme jika tidak diikuti

instrumen pengawasan dan evaluasi. Selain itu, koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah masih lemah, membuat program lingkungan berjalan parsial. Oleh karena itu, keberhasilan dua arah strategis ini ditentukan oleh sinergi lintas sektor, transparansi anggaran, dan partisipasi aktif publik.

Pada akhirnya, baik Asta Cita maupun Asta Protas sama-sama mengingatkan bahwa keberlanjutan lingkungan adalah amanah. Negara hadir dengan kebijakan, agama hadir dengan nilai terkait pelestarian lingkungan. Jika keduanya bertemu dalam aksi nyata, maka cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan lestari bukanlah utopia, melainkan warisan yang dapat sungguh-sungguh diberikan kepada generasi mendatang.

Seperti sudah disebut di atas, krisis iklim sudah bukan prediksi, melainkan realitas. Tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas sejak pencatatan modern dengan anomali sekitar 1,55°C di atas pra-industri. Realitas ini merupakan sinyal keras bahwa tindakan makin menyusut dan dampak akan makin tidak linear bila tata kelola publik tidak berubah cepat.

Dalam konteks Indonesia yang rentan, ancaman bagi kota-kota pesisir diperparah oleh kombinasi kenaikan muka laut dan amblesan tanah. Di lepas pantai Jakarta laju kenaikan muka laut sekitar 4,2 mm/tahun menguatkan urgensi adaptasi yang berkeadilan. Satu pertanyaan strategis: apakah Kementerian Agama, dengan jejaring rumah ibadah, pendidikan, kelembagaan sosial keagamaan, dan perangkat kelembagaan, termasuk di dalamnya komunitas agama-agama, dapat menjadi pengungkit kebijakan iklim yang nyata dan pelestari lingkungan berkelanjutan? Asumsi ini secara eksplisit terjawab dengan realitas yang ada, sebagai berikut: (i) Kemenag memiliki otoritas normatif dan jangkauan kelembagaan yang luas, meski bukan regulator energi atau tata ruang; (ii) Perubahan perilaku, arsitektur fasilitas ibadah, dan filantropi adalah variabel yang bisa digerakkan oleh Kemenag lebih cepat daripada reformasi sektor energi; dan (iii) Keberhasilan harus terukur, tidak berhenti pada seremoni.

Kerangka kerja yang dipakai memetakan lima tuas pengungkit: (i) pembingkaian nilai lewat liturgi dan moderasi beragama; (ii) transformasi fisik infrastruktur layanan keagamaan; (iii) pendidikan dan literasi ekologi di lembaga pendidikan keagamaan (seperti madrasah–pesantren-seminari-Ashram dan lainnya); (iv) inovasi pembiayaan sosial-keagamaan (seperti zakat–wakaf hijau dan bentuk filantrofis lainnya); dan (v) diplomasi lintas iman untuk konsensus moral–politik yang lebih kuat.

Pada tuas pembingkaian nilai, Kemenag sudah memutuskan untuk menyusun materi khutbah atau mimbar-mimbar keagamaan bertema pelestarian lingkungan serta mengimbau para khatib dan pemuka agama lainnya mengangkat pesan ekologi dalam khutbah atau pertemuan dengan umat beragamanya. Skenario seperti ini sangat penting untuk menjembatani kebijakan, sains, realitas dan etika pada skala akar rumput.

Di lingkungan Kementerian Agama, kerja-kerja ekoteologi sejak lama sudah dilakukan oleh unit-unitnya. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha melalui kerjasama dengan Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI) misalnya, membuat Pelatihan Eco Enzyme di Kementerian Agama pada tahun 2023. MUI misalnya menetapkan Fatwa No. 86/2023 mengenai kewajiban perlindungan perubahan iklim global (termasuk pelarangan perusakan yang berdampak pada krisis iklim) serta Fatwa No. 30/2016 yang mengharamkan pembakaran hutan dan lahan.

Keduanya menyediakan rujukan keagamaan yang selaras dengan sains iklim. Di tingkat global, "Islamic Declaration on Global Climate Change" menegaskan panggilan moral umat Islam untuk meninggalkan emisi berbahaya dan beralih pada energi bersih. Dengan demikian, kerangka etis ini dapat memperkuat legitimasi religi bagi aksi adaptasi–mitigasi.

Daya dorong semakin kuat saat ekoteologi menjadi bagian dari Asta Protas Menteri Agama. Pada tuas transformasi fisik, Kemenag meluncurkan program Green KUA. Target 160 Green KUA dibangun pada 2026, dengan konstruksi dimulai Maret dan ditargetkan rampung Agustus, mematuhi standar Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau sebagaimana diatur Permen PUPR 21/2021. Desainnya menekankan efisiensi energi, panel surya atap, pembatasan pendingin ruangan yang tidak efisien, dan daur ulang sumber daya seperti pemanenan serta penyaringan air wudhu dan hujan melalui ground tank, menggeser KUA dari sekadar kantor layanan keagamaan menjadi etalase praktik keberlanjutan lingkungan secara publik. Inisiatif ini sejalan dengan pengarusutamaan "eco-masjid" yang Kemenag dorong melalui simposium dan penghargaan praktik baik, memperluas arena perubahan dari kantor layanan ke rumah ibadah sebagai simpul literasi energi–air komunal.

Pada tuas pendidikan, Indonesia memiliki modal sosial unik lewat jaringan pesantren dan lembaga pendidikan lainnya. Program ekopesantren yang berakar pada kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kemenag sejak akhir 2000-an menyediakan model integrasi ajaran Islam dan ilmu lingkungan dalam tata kelola kampus pesantren. Implementasinya kini bertumbuh dalam berbagai kolaborasi daerah dan universitas. Di sisi hulu kebijakan pendidikan agama, agenda moderasi beragama memberi ruang memasukkan ekoteologi sebagai kompetensi nilai. Integrasi modul hijau di madrasah pun dapat menjadikan lulusannya agen perubahan perilaku dan konsumsi.

Pada tuas pembiayaan sosial-keagamaan, ekosistem wakaf–zakat dan bentuk filantropi agama lain telah membuka kanal aksi iklim yang terukur. "Green Waqf Framework" yang digagas Badan Wakaf Indonesia dan mitra misalnya menunjukkan cara merancang portofolio wakaf untuk restorasi ekosistem, energi terbarukan, dan ketahanan pesisir. Kemenag tengah menggagas "hutan wakaf" dan menggalang dana untuk pengembangan awal. Di ranah zakat, inisiatif "Green Zakat" yang dikerjakan BAZNAS mendorong alokasi program ke rehabilitasi lingkungan dan pemberdayaan rendah karbon, membuka peluang sinergi antara Dirjen Bimas Islam, BAZNAS, dan pemerintah daerah untuk proyek adaptasi berbasis komunitas.

Pada tuas diplomasi lintas iman, peran Kemenag sebagai juru runding moral semakin relevan. "Deklarasi Istiqlal 2024" yang ditandatangani pimpinan Istiqlal bersama Paus Fransiskus menempatkan perubahan iklim sebagai agenda bersama antar-agama. Pesan ini paralel dengan inisiatif UNEP Faith for Earth yang memobilisasi organisasi keagamaan sebagai penjaga nilai dan pelaksana program lingkungan.

Bagaimana menilai efektivitasnya? Kita bisa menggunakan kerangka "input–throughput–outcome" yang sederhana namun ketat. Pada sisi input, ukur berapa kelembagaan keagamaan (seperti KUA, masjid, pesantren, gereja, dan rumah ibadah lain) yang menerapkan standar hijau dan menerima pelatihan ekoteologi. Pada throughput, pantau jam-jam ceramah keagamaan bertema ekologi, modul ajar pendidikan yang terintegrasi, serta volume dana filantropis yang tersalurkan untuk proyek berbasis bukti lingkungan berkelanjutan.

Pada outcome, ukur penurunan konsumsi listrik per meter persegi di Green KUA dan fasilitas pemerintah yang berafiliasi ke Kementerian Agama, kWh surya yang dibangkitkan, berapa meter kubik air wudhu yang didaur ulang, jumlah jamaah atau umat yang terpapar pesan ekologi, berapa hektare lahan yang direstorasi, dan indikator ketahanan kota–desa yang terdampak dari praktik-praktik ekoteologi itu.

Kuncinya adalah integrasi data. Sistem data terpadu (SIMAS) yang dimiliki Kementerian Agama dapat dikembangkan untuk kepentingan tersebut. SIMAS dapat ditautkan dengan indikator energi–air–sampah di rumah-rumah ibadah, fasilitas pemerintah dan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama dapat mengunggah jejak energi–air berdasarkan format Permen PUPR, dan dana sosial-keagamaan menerapkan pelaporan dampak standar. Tanpa indikator kuantitatif, risiko "greenwashing ritual" akan mengalahkan substansi perubahan.

Namun demikian, beberapa tantangan terkait upaya tata kelola dan pelestarian lingkungan berkelanjutan ini pun perlu disadari. Tantangan itu misalnya:

1) Green KUA atau fasilitas pemerintah di lingkungan Kementerian Agama tidak akan berarti bila tata kelola pengadaan, operasi, dan perawatannya tidak memenuhi prinsip transparansi, termasuk misalnya panel surya harus benar-benar mengurangi pembelian listrik fosil dan bukan sekadar simbol. Standar 24/7 matching berbasis PPA lokal atau skema setara perlu dipertimbangkan bersama PLN agar pengurangan emisi terukur, bukan hanya penghematan biaya tagihan.
2) Desain materi penyuluhan agama dan kotbah dan ceramah keagamaan bertema iklim dan tata kelola lingkungan berkelanjutan harus sadar konteks sosial, menghindari jargon sains, menghubungkan akhlak konsumsi dengan keadilan antar-generasi, serta menekankan bahwa larangan merusak bumi adalah maqashid syariah atau bagian tidak terpisahkan dari pokok-pokok keagamaan yang melindungi jiwa, keturunan, dan harta. Fatwa MUI, Ensiklik Laudato Si, Green Al Maun Muhammadiyah, Fatwa lingkungan Nahdlatul Ulama dapat menjadi landasan penting, tetapi praktik komunikasi publik tetap krusial untuk dapat menggeser opini dan perilaku ke arah kesadaran kognitif terkait pelestarian lingkungan.
3) Ekosistem filantropi keagamaan, semisal wakaf–zakat hijau, Green Dharma menuntut tata kelola proyek dan pengukuran dampak sosial–ekologis yang dapat diaudit, agar kepercayaan publik tumbuh dan skala pendanaan membesar, bukan sekadar proyek percontohan.

Di atas semua itu, kerja lintas kementerian perlu terus dikembangkan. Kemenag telah mengaitkan Green KUA dan eco-pesantren misalnya dengan kebijakan bangunan hijau dan program lingkungan lintas Kementerian. Dengan demikian, sinergi lebih erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kehutanan, dan pemerintah daerah akan mempercepat standar teknis, insentif fiskal, dan pendampingan teknis, dari audit energi, desain pasif-bangunan, hingga pengelolaan sumber daya air dan lingkungan sekitar rumah ibadah pun menjadi komponen penting afirmasi kebijakan dan program pro lingkungan.

Berdasarkan konteks pembahasan mengenai tata kelola dan pelestarian lingkungan pada semua dimensi dan termasuk tantangan global dan nasionalnya, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Kementerian Agama memiliki empat kekuatan yang sulit ditandingi oleh kementerian lain. Kekuatan itu terdiri dari:

(i) Mandat moral yang dipercaya warga,
(ii) Jaringan kelembagaan yang merata,
(iii) Kontrol atas kurikulum keagamaan, dan
(iv) Akses pada instrumen pembiayaan sosial-keagamaan.

Jika semua tugas ini dijalankan secara konsisten, dengan indikator yang dapat diaudit, pengawasan publik, dan sinergi regulasi, maka kontribusi mitigasi–adaptasi pada upaya pelestarian lingkungan bisa muncul cepat di wilayah yang selama ini diabaikan oleh kebijakan iklim. Di dalam empat kekuatan itu sarat dengan cakupan pola pikir, pola ibadah, dan pola konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat beragama di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam krisis yang didorong oleh perilaku kolektif, perubahan yang dipandu iman dan akal sehat bisa menjadi pembeda. Tugas berikutnya bukan menemukan slogan baru, melainkan memastikan setiap ceramah keagamaan, setiap bangunan rumah ibadah, setiap fasilitas pemerintah di lingkungan Kementerian Agama dan lingkungan kelembagaan lainnya, setiap lembaga pendidikan, dan setiap bentuk kedermawanan umat beragama dapat mendorong upaya penurunan risiko perubahan iklim dan mampu meningkatkan kesadaran dan praktik pelestarian lingkungan hidup di wilayahnya.

BAB II

FRAMEWORK DAN RUANG LINGKUP EKOTEOLOGI

A. Membangun Konsepsi Ekoteologi

Ekoteologi secara bahasa terdiri dari dua kata yang terpisah dan memiliki makna berbeda-beda. Dua kata ini kemudian membentuk satu phrase tersendiri dan memiliki satu kesatuan makna. Dalam hal ini ekoteologi berasal dari kata eko atau eco (oikos) dan teologi. Eko atau oikos menunjuk makna rumah/habitat atau diartikan secara sederhana sebagai lingkungan. Sedangkan teologi bermakna "ketuhanan".

Kata eko sering menjadi phrase "ekologi", di mana phrase itu menunjukkan pada makna proses interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan kesemestaan lingkungan yang ditinggalinya. Kata lingkungan mencakup semua aspek yang hidup (biotik dan organisme lainnya) ataupun segala sesuatu yang tidak hidup, baik bersifat fisik ataupun kimia seperti batu, tanah, mineral, dan lainnya.

Adapun kata teologi terdiri dari dua kata yang bergabung menjadi satu phrase dan memiliki makna tersendiri, yaitu theos (Tuhan) dan logi (ilmu atau pemikiran rasional). Dengan demikian, teologi diartikan sebagai ilmu yang berusaha mengungkap Tuhan (Keilahian) yang mencakup hakikat, sifat, dan hubungannya dengan makhluk beserta alam semestanya. Secara sederhana, teologi berarti ilmu tentang ketuhanan.

Sebenarnya konsep ekoteologi bukan hal baru. Terlebih ketika konsep ini diterjemahkan ke dalam banyak diksi tetapi memiliki landasan etis dan nilai yang sama, seperti "tauhid lingkungan", "etika lingkungan", "moral lingkungan", "ekospiritualitas", dan lainnya. Jika ditelisik secara utuh, ekoteologi merupakan

padanan kata oikos (lingkungan), theos (Tuhan), dan logos (Ilmu pengetahuan atau pemikiran rasional). Perpaduan tiga kata ini bermakna pada ilmu pengetahuan tentang lingkungan dan Tuhan. Namun, arti kata itu bukan yang dikehendaki dalam konsep ekoteologi dalam konteks kebijakan.

Kata ekoteologi di sini merujuk pada pemaknaan cabang teologi yang mempelajari hubungan antara agama dan lingkungan hidup, dengan tujuan memahami ajaran agama dan kepercayaan yang berkembang sebagai dasar dalam merawat dan menjaga alam semesta serta menanggapi krisis lingkungan melalui nilai-nilai spiritual dan etika. Konsep ini memandang lingkungan bukan sekadar ciptaan terpisah, tetapi bagian integral dari ciptaan Tuhan yang memiliki nilai moral dan spiritual, serta menganggap penjagaan alam sebagai tanggung jawab iman dan ibadah.

Definisi di atas sejalan dengan apa yang disebut dengan ekospiritualisme, yaitu pandangan dunia yang menekankan hubungan mendalam antara pengalaman spiritual manusia dengan alam semesta, di mana alam dianggap memiliki nilai intrinsik, kesakralan, dan dihargai sebagai ciptaan Ilahi yang perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya. Perspektif ini mendorong tindakan peduli, penghormatan terhadap kehidupan, serta pemahaman akan keterhubungan manusia dengan seluruh ekosistem untuk menciptakan harmoni dan kelestarian.

Dalam konteks ini, pandangan dunia (worldview) dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan, kepercayaan lokal yang berkembang, ataupun tradisi yang diterima secara turun temurun. Ekospiritualitas dalam konteks ini mencakup semua hakikat dan dimensi keagamaan dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Pengertian ekospiritualitas di atas sedikit berbeda dengan ekoteologi, di mana di dalamnya sarat dengan berbagai nilai keagamaan yang dianggap sebagai rujukan utama manusia berpikir, bersikap dan berperilaku.

Kata teologi yang tertera pada ekoteologi, menuntut nilai lebih dalam, utuh dan komprehensif, bahwa menjaga dan mengelola lingkungan menjadi tanggung jawab manusia yang mempercayai adanya Tuhan. Tuhan (yang di dalamnya dibaca dengan nilai keagamaan) menjadi sandaran yang tidak terbantahkan. Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan juga berkorelasi kuat terhadap tingkat keimanan dan kepercayaan serta perilaku ibadah seseorang terhadap Tuhan dan agamanya.

Penghubungan antara lingkungan dengan ketuhanan menunjukkan pentingnya komponen lingkungan dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pilihan ini juga menunjukkan keimanan tidak semata bersifat penyembahan atau ketundukan kepada Tuhan, tetapi juga kepeduliannya terhadap seluruh ciptaan Tuhan yang berada di alam semesta ini.

Sebagaimana dinyatakan oleh Andrianos, Tomren, et.al (2021), tradisi-tradisi besar di dunia seperti Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Khonghucu dan kepercayaan lainnya memiliki pemahaman tanggung jawab manusia terhadap alam termasuk dalam menghadapi krisis iklim dan kerusakan lingkungan, sehingga sangat penting adanya keadilan iklim (climate justice) dan pengelolaan lingkungan (environmental stewardship). Perspektif spiritual dan teologis ini dapat menjadi motor penggerak bagi tindakan nyata dalam melawan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan sebagai jawaban tantangan bersama umat manusia.

Berdasarkan konsepsi di atas, setidaknya ada tiga aspek penting yang perlu dicermati, yaitu: (i) Hubungan integral antara Tuhan, manusia, dan alam; (ii) Nilai

spiritualitas dan moral yang bersumber dari keagamaan dan kepercayaan, serta diwujudkan dengan keimanan dan tanggung jawab dalam tata kelola dan pelestarian lingkungan; dan (iii) Respons serius beserta mitigasi berbasiskan keimanan Ilahi atas persoalan lingkungan beserta krisis yang dialaminya.

Cakupan tiga aspek dalam ekoteologi inilah yang memungkinkan ruang lingkup dan penghargaan agama terhadap lingkungan sangat tinggi. Cakupannya setara dengan penghargaan terhadap perlindungan jiwa manusia (hifzul nafs) dan menjadi salah satu bukti keimanan manusia terhadap Tuhannya (Rappaport & Corbally 2023; Roszak, 2021).

Dalam konteks itu, ekoteologi merupakan langkah mencegah sifat kemanusiaan yang cenderung rakus dan merusak lingkungan sekitar, dengan menumbuhkan kesadaran dirinya adalah bagian tidak terpisahkan dari kesemestaan alam dan terikat pada penghambaannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua aktor di dalamnya saling terhubung dan saling menjaga, sehingga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam tetap hadir dan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara terukur dan berlanjut.

Tiga aspek di ataslah yang memungkinkan ekoteologi dapat dikembangkan bukan hanya sebagai praktik keimanan dari umat beragama ataupun berkepercayaan, tetapi juga sebagai konsep, landasan etik, dan praktik kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah. Harapannya, internalisasi nilai keagamaan terkait lingkungan menjadi landasan etis dalam aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepentingan keimanan dan tanggung jawab lingkungan itu dapat melekat pada dimensi pendidikan, sosial keagamaan, kesehatan, tata kelola sumber daya alam, ataupun ekonomi, dan bahkan pengembangan industri dan teknologi maju.

Konsepsi ekoteologi bukan sekadar wacana yang didiskusikan atau diperdebatkan, tetapi juga beraras praksis yang memungkinkan ia menjadi skenario strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembangunan secara berkelanjutan. Dengan memperhatikan pengertian dan cakupan di atas, kebijakan ekoteologi Kementerian Agama dapat didefinisikan dengan dua definisi yang saling terkait satu dengan lainnya.

Definisi pertama, definisi substantif, ekoteologi diartikan sebagai: “Arah dan kerangka kerja kebijakan dan program nasional yang berusaha mendorong peningkatan internalisasi nilai (iman), penumbuh-kembangan kesadaran (ilmu), dan terimplementasinya praktik baik (amal) tata kelola dan pelestarian lingkungan yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan yang diyakini masyarakat Indonesia untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia”.

Definisi kedua, definisi operasional, ekoteologi diartikan sebagai: “kebijakan yang menekankan partisipasi aktif dan tanggung jawab masyarakat, kolaborasi lintas pemangku kepentingan, dan penghormatan atas keberagaman agama dan budaya dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan (ekologis). Selain mengedepankan peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, kebijakan ini juga menjamin keadilan ekologis antar generasi, dengan mekanisme implementasi, pemantauan, dan evaluasi yang terukur demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan tercapainya kedaulatan atas tanah, air dan udara di Indonesia” (Gambar 1).

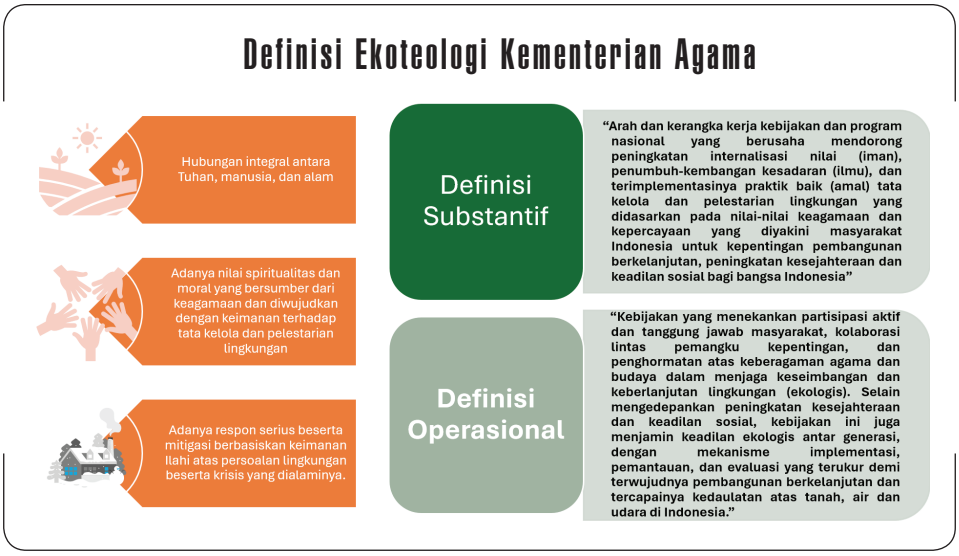

Gambar 1. Definisi Ekoteologi Kementerian Agama

B. Penjabaran Dua Definisi Ekoteologi

Sebagai sebuah pegangan, beberapa kata kunci penting dalam definisi ekoteologi menurut Kementerian Agama, perlu dipahami secara seksama dan menjadi perhatian dalam kebijakan dan program turunannya, yaitu:

1. Arah dan kerangka kerja kebijakan dan program nasional. Konteks ini memiliki makna pada perangkat substansi yang bersifat holistik dan integral berbagai kebijakan dan program yang diterbitkan oleh pemerintah, baik Kementerian Lembaga ataupun pemerintah daerah, dan lebih khusus adalah di lingkungan Kementerian Agama. Sebagai sebuah arah kebijakan nasional, ia menjadi semacam landasan etik substansi dari kerja-kerja pemerintahan, dan terdistribusikan kepada para pihak lain termasuk kelompok masyarakat, industri, dan media.
2. Peningkatan internalisasi nilai (iman), penumbuhkembangan kesadaran (ilmu), dan praktik baik (amal). Ketiga aspek ini menjadi sebuah proses pencapaian tujuan yang dikembangkan dari perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah. Internalisasi nilai merujuk pada upaya mentransmisikan dan menanamkan nilai-nilai ekoteologi ke masyarakat luas yang berasal dari sumber-sumber keagamaan dan tradisi kepercayaan yang berkembang. Adapun penumbuh-kembangan kesadaran merupakan mekanisme dan skenario mengembangkan dan mengelola nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari proses kesadaran ekoteologi kepada masyarakat. Kesadaran ini menjadi sangat penting, karena ia adalah basis pemikiran dan rasionalisasi atas rasa tanggung jawab dan perilaku yang akan dilakukan oleh individu, kolektif, dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara praktik baik, adalah desain arsitektur perilaku yang dikembangkan oleh pemerintah, pemangku kepentingan lain, masyarakat luas, organisasi, dan para pihak, secara personal ataupun kolektif kelembagaan. Desain arsitektur perilaku ini diharapkan dapat mewujud menjadi aktivitas-aktivitas dan tindakan nyata terkait pengembangan ekoteologi dalam semua aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi dan pengembangan teknologi di dalamnya.

3. Tata kelola dan pelestarian lingkungan. Aspek ini menjadi tujuan dari rangkaian kebijakan dan program yang ditetapkan pemerintah. Tata kelola lingkungan berhubungan dengan desain dan pola pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga kekayaan alam yang ada dapat lestari dan dapat dimanfaatkan lintas generasi secara baik untuk kebaikan umat manusia. Sistem tata kelola lingkungan secara baik menjadi prasyarat utama pencapaian kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Adapun pelestarian lingkungan terhubung pada aspek-aspek strategis dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, baik di lingkungan sekitarnya, ataupun lingkungan bersifat nasional dan global. Pelestarian lingkungan tidak dapat direduksi secara terbatas, tetapi menjadi satu kesatuan yang bersifat utuh dan global. Namun, proses pembelajarannya, bisa dimulai dari praktik-praktik baik yang berskala kecil ataupun perorangan, dan kemudian dikembangkan secara masif, kolektif dan berdampak besar.
4. Nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Aspek ini memiliki cakupan utama dari konsepsi ekoteologi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama. Nilai-nilai keagamaan yang dimaksud di sini adalah ajaran semua agama yang diyakini dan dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Termasuk di dalamnya kepercayaan dan tradisi yang lahir dan bertumbuh kembang secara turun temurun. Sekalipun dalam bentuk spiritualitas, nilai-nilai ekoteologi ini akan dianggap baik dan memiliki potensi untuk menjadi lansiran utama pengembangan ekoteologi dalam bentuk wacana, konsepsi dan praktik baik yang diinisiasikan oleh pemerintah.
5. Kepentingan pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, keadilan lingkungan (ekologis) dan kedaulatan atas tanah dan air bagi bangsa Indonesia. Tujuan akhir dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekoteologi yang didorong oleh Kementerian Agama sesungguhnya tertuju pada pencapaian pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya sarat dengan perhatian penuh terhadap kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan secara terkendali dan berkelanjutan. Tujuan terpenting setelah pembangunan berkelanjutan adalah peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelestarian lingkungan secara berlanjut memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya, secara ekonomis, tata kelola terhadap lingkungan yang baik menciptakan kondisi peningkatan kesejahteraan secara sosial dan ekonomi di satu sisi, dan di sisi lain ada proses penciptaan keadilan sosial yang nyata terjadi.

Hal ini tentu didasarkan pada realitas yang ada, bahwa perusakan lingkungan seringkali terjadi seiring dengan proses kapitalisasi dan industrialisasi yang berlebihan, dan menguntungkan para pemilik modal. Sementara masyarakat di wilayah lingkungan sekitar atau sumber daya alam sekitarnya hanya menjadi penonton saja. Jika pelestarian dan tata kelola lingkungan dapat diciptakan secara baik, maka pemanfaatannya tidak hanya tertuju oleh pemilik modal saja, tetapi juga kelompok masyarakat yang ada. Secara nasionalisme, akhir dari pencapaian pembangunan lingkungan berkelanjutan bermuara pada terciptanya kedaulatan atas tanah, air, dan udara yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Kelima kata kunci pada konsepsi ekoteologi di atas akan menjadi perangkat substansi dan dimensi yang dikembangkan dalam berbagai implementasi dan pengukuran keberhasilan kebijakan dan program ekoteologi Kementerian

Agama. Harapannya, masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat memahami secara baik kata-kata kunci dalam definisi ekoteologi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, sehingga dapat diterjemahkan secara utuh dan fokus pada proses dan pencapaian tujuan yang diharapkannya.

C. Prinsip dan Dasar Hukum Ekoteologi

Ekoteologi merupakan sebuah arah dan kerangka kerja kebijakan yang memungkinkan pemerintah dapat menginisiasi dan mendorong pelestarian dan tata kelola lingkungan dengan pendekatan keimanan secara masif, sistematis dan menyeluruh. Untuk kepentingan tersebut, ekoteologi dalam kerangka kerja Kementerian Agama, memiliki prinsip-prinsip dan dasar hukum sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Prinsip Dasar

1. Partisipatif (keterlibatan).

Prinsip keterlibatan dibuka sedemikian rupa dalam membangun dan mengimplementasikan kerangka kerja yang tercermin dalam kebijakan dan program ekoteologi beserta turunan dan penerjemahanya. Keterlibatan para aktor mencakup kelembagaan dan perorangan, baik dari Kementerian/ Lembaga, organisasi masyarakat, organisasi non-pemerintah (Ornop/LSM), dunia usaha, media, industri, dan kelompok masyarakat secara umum.

2. Keterbukaan.

Prinsip keterbukaan dimaknai sebagai suatu asas yang memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok keagamaan untuk menyampaikan nilai-nilai dan ajaran keagamaan yang menjadi argumentasi, beserta landasan etis terhadap upaya penerjemahan ekoteologi dalam berbagai dimensi kegiatan ataupun aktivitas kesehariannya, termasuk dalam penyusunan dokumen pembelajaran, naskah ceramah keagamaan, modul, buku, naskah penumbuh-kembangan kesadaran dan lainnya.

3. Pemberian ruang moderasi bagi nilai-nilai dan praktik ekoteologi lokal.

Prinsip ini mendasarkan diri pada keniscayaan perencanaan dan pelaksanaan kerangka kerja ekoteologi harus didasari pada penghargaan atas keyakinan, agama dan kepercayaan yang berbeda. Sebagaimana landasan etik (moral) dari ekoteologi, pemahaman dan penghargaan atas ajaran atau nilai agama dan kepercayaan yang melandasi kerangka kerja ekoteologi juga berkembang dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Relasi lintas agama dan kepercayaan akan sangat kental dalam aktivitas ini. Sangat dianjurkan, bahwa pelaksanaan ekoteologi dalam ragam kegiatan menjadi ruang-ruang perjumpaan kelompok-kelompok berbeda agama. Pilihan ini sangat strategis, karena mendorong pencapaian moderasi beragama sebagaimana visi Kementerian Agama di masa sebelumnya, dan visi kemasadepanan Kementerian Agama RI.

4. Inklusifitas, khususnya pada prinsip GEDSI (Gender equality, disability and social inclusion strategy).

Sebagaimana prinsip dasar dalam pembangunan berkelanjutan, yang di dalamnya sarat dengan kerangka aksi pelestarian dan tata kelola lingkungan yang berkeadilan, maka prinsip GEDSI perlu diletakkan juga sebagai prinsip utama ekoteologi. Di dalamnya ada prinsip kesetaraan gender, pengarusutamaan disabilitas, dan keadilan bagi kelompok rentan. Inklusifitas menjadi semangat utama dalam pembentukan keadilan,

pengarusutamaan dan keadilan terhadap lingkungan tersebut. Prinsip ini dapat menciptakan ekosistem dan habitus yang memadai untuk mempercepat internalisasi nilai, penyadar-tumbuhan kesadaran, dan aksi yang tepat dan holistik terkait ekoteologi dalam kehidupan keseharian masyarakat.

5. Nilai kedampakan lingkungan.

Prinsip utama dalam arah dan kerangka kerja kebijakan ekoteologi adalah prioritas pada nilai kedampakan lingkungan. Nilai ini tertuju pada upaya mengedepankan aspek lingkungan untuk kehidupan manusia secara berkeadilan, dan menjauhkan aras tujuan dari pencapaian ekonomi yang bersifat eksploitatif. Sekalipun demikian, prinsip ini tidak menafikan kepentingan ekonomi, tetapi memanfaatkan kedampakan lingkungan tersebut untuk menciptakan ekosistem ekonomi produktif secara berkelanjutan.

6. Pelestarian lingkungan secara holistik dan mendalam (deep ecology).

Salah satu prinsip dasar terpenting dari sistem dan mekanisme pelestarian dan tata kelola lingkungan adalah deep ecology. Prinsip deep ecology sebenarnya adalah suatu perspektif holistik dan integral yang menghubungkan antara pelestarian lingkungan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang berada di sekitarnya. Bangunan perspektif yang memadukan antara fisik material dan immaterial budaya dapat menjadi suatu prinsip dasar pengembangan ekoteologi sebagai kerangka kerja dan alur kebijakan yang dapat didistribusikan ke dalam berbagai dimensi pembangunan. Oleh karena itu, prinsip deep ecology ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan lingkungan dengan kepentingan manusia sekitarnya.

7. Pembangunan lingkungan berkelanjutan

Selaras dengan nilai kedampakan lingkungan dan deep ecology, prinsip dasar pembangunan lingkungan berkelanjutan merupakan prinsip penting yang perlu ditekankan dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan ekoteologi dalam berbagai dimensi kehidupan bangsa. Orientasi prinsip lingkungan berkelanjutan adalah “menjaga, merawat, dan mentransmisikan sistem lingkungan yang sehat, utuh, dan manfaatnya secara lintas generasi”, sehingga generasi manusia yang akan datang tetap menikmati lingkungan yang ada. Prinsip lingkungan berkelanjutan merupakan sebuah proses aktif, di mana inovasi dan kreatifitas dari kerja-kerja semua pihak diberikan ruang yang akomodatif di dalamnya. Pembangunan lingkungan berkelanjutan sebagai suatu kerja aktif memungkinkan proses keadilan ekologis dalam fase peralihan generasi akan bersifat terbuka dan saling penghargaan di dalamnya.

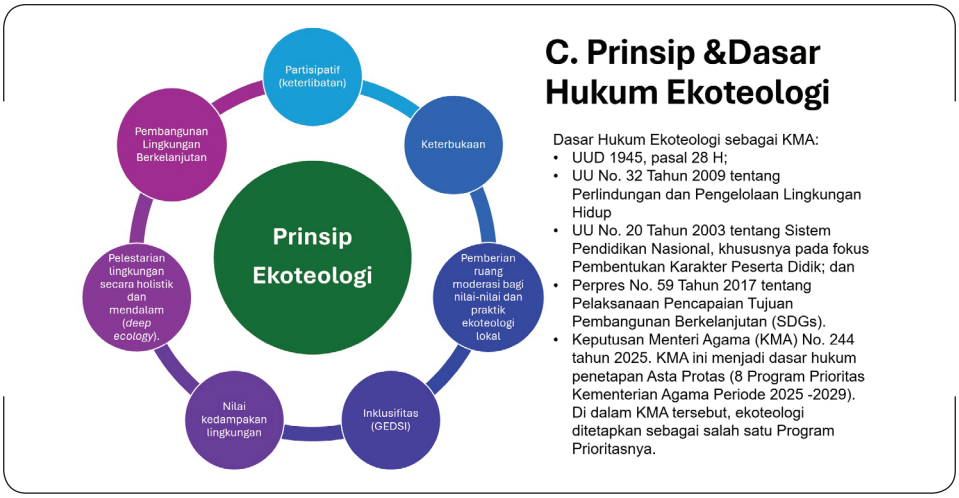

Gambar 2. Prinsip Ekoteologi

Dasar Hukum

Dasar hukum untuk menguatkan arah kebijakan ekoteologi di lingkungan Kementerian Agama dapat dikembangkan untuk beragam kebijakan dan program di berbagai kementerian dan lembaga. Ekoteologi dapat melansirkan diri pada UUD 1945, pasal 28 H (ayat 1), yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal ini semakin ditegaskan dengan pasal 33, ayat 3 dan 4, yang berbunyi: (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." (4): "Perekonomian nasional disusun berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan sistem perekonomian Pancasila sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan umum yang merata dan seimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat."

Dengan adanya dasar hukum yang kuat ini, jaminan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjadi legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan dan program ekoteologi yang di dalamnya sarat dengan upaya melindungi wilayah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dua pasal di atas sarat juga dengan pencapaian tujuan "keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia, dan adanya keseimbangan alam dengan derap pembangunan nasional".

Dari UUD di atas, ada beberapa regulasi turunannya, seperti; (i) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (ii) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada fokus Pembentukan Karakter Peserta Didik; dan (iii) Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Berdasarkan regulasi turunan ini, ekoteologi dapat dikembangkan dalam berbagai aspek, seperti pembelajaran, pendidikan, industri, dan kehidupan keseharian masyarakat. Bahkan, di dalamnya ada tuntutan untuk pelibatan jaringan, partisipasi sosial, kerjasama para aktor, agar gerakan pelestarian lingkungan dapat bersifat massif, sistematis dan menyeluruh.

Ruang lingkup di atas selaras dengan RPJMN 2025–2029. Di dalamnya sarat dengan upaya penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pencapaian nol emisi karbon bersih pada 2060. Pencapaian itu mempersyaratkan adanya penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, efisiensi energi, dan penguatan ketahanan ekologi. Selain itu, penguatan nilai keagamaan diintegrasikan dalam misi ketahanan sosial budaya dan ekologi, termasuk moderasi beragama. Bahkan agama dianggap sebagai modal sosial utama dalam mengawal transformasi sosial berkelanjutan untuk mendukung pembangunan inklusif.

Tujuan dan ruang lingkup di atas ditegaskan dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 244 tahun 2025. KMA ini menjadi dasar hukum penetapan Asta Protas (8 Program Prioritas Kementerian Agama Periode 2025-2029). Di dalam KMA tersebut, ekoteologi ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritasnya. Dalam konteks inilah, ekoteologi menjadi bagian dari pendekatan agama yang dianggap mampu menyelesaikan pemasalahan lingkungan. Hubungan timbal balik antara penganut agama dan alam sekitar menjadi bagian tidak terpisahkan dari relasi fungsional ekoteologi.

D. Landasan Ekoteologi Agama-Agama

Ekoteologi berpijak sepenuhnya pada ajaran agama dan kepercayaan, khususnya ajaran dan nilai yang berhubungan dengan lingkungan dan korelasinya dengan keimanan. Relasi antara keimanan dan lingkungan atau alam semesta diceritakan secara detail oleh berbagai agama. Semua agama pada umumnya melansirkan kebaikan manusia dan alam sekitarnya sebagai bukti penghambaan diri kepada Tuhannya. Pada bab 1, paparan mengenai landasan filosofis secara umum telah dijelaskan secara baik. Untuk melengkapi kerangka filosofis itulah, landasan tekstualis dan nilai-nilai moral yang dikembangkan oleh setiap agama dan kepercayaan terkait ekoteologi dijelaskan pada bab 2 ini.

Setiap agama di Indonesia memiliki landasan teologis untuk ekoteologi yang menegaskan menjaga alam adalah wujud penghambaan kepada Tuhan dan tanggung jawab terhadap ciptaan. Banyak studi agama mengungkap lansiran keagamaan terkait ekoteologi. Namun, sebagai buku pedoman ekoteologi, bukan porsi membahas secara detail dan mendalam terkait ekoteologi pada masing-masing agama dan kepercayaan. Bagian ini mengungkap pada nilai-nilai dasar dari landasan agama dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia terkait ekoteologi, dan menunjukkan adanya nilai universal dari semua ajaran agama dan kepercayaan.

1. Ekoteologi dalam Islam

Relasi antara keimanan dan lingkungan secara teologis telah banyak disampaikan para ulama dan ilmuwan Islam. Sayyed Hossen Nasr, misalnya menyebutkan keimanan dan teologi Islam sangat dekat dan memiliki tanggung jawab utuh terhadap lingkungan dan aspek-aspek kemanusiaan. Relasi ini bahkan menjadi penilaian terkait amal saleh dan ibadah sebagaimana yang ditetapkan dalam ajaran agama. Berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi secara tersebar banyak menyinggung soal iman, tuntutan amal saleh dan lingkungan. Al-Qur'an menyebut manusia sebagai khalifah yang bertugas mengelola bumi dengan amanah (QS. Al-Baqarah: 30). Ayat "Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik" (QS. Al-A'raf: 56) menegaskan larangan eksploitasi secara membabi buta dan berlebihan.

Secara tematik, ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan persoalan alam semesta beserta segala isinya, dan upaya menjaga kelestarian dan keseimbangan di dalamnya tersebar di berbagai surat. Gambaran mengenai proses penciptaan alam juga menjadi penanda bahwa ada ikatan kuat antara tujuan penciptaan dan eksistensi kehidupan manusia di dalamnya. Saling keterhubungan dan tuntutan untuk "bertanggung jawab" terhadap ciptaan Allah swt itu sering kali dikemas dengan kata-kata "adil, kemaslahatan, tidak berbuat aniaya, tidak melampaui batas, menjauhi keburukan, dan lainnya".

Dalam konteks inilah, ajaran Islam mengedepankan tata kelola lingkungan secara berkeadilan dengan kepentingan dan kehidupan manusia. Bahkan, posisi manusia sebagai khalifatu fil ardhi di dalam Al-Qur'an menjadi perdebatan para mufasir dan filosof Islam. Namun, keragaman pendapat itu tetap mengarah pada satu kesatuan pandangan mengenai posisi tugas manusia secara bertanggung jawab untuk menjaga alam semesta. Bahkan pelaksanaan tugas tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari ukuran amal kebaikan dan kesejatian diri sebagai seorang Muslim dan Mukmin.

Banyak Hadis Nabi juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan. Salah satunya: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia dan alam," yang di dalamnya sarat dengan tuntutan atas tanggung jawab ekologis. Banyak juga Hadits yang menyebutkan pelarangan untuk berbuat kerusakan pada tumbuhan, hewan, ataupun lingkungan sekitar.

Secara holistik, Islam memposisikan tanggung jawab manusia terhadap pelestarian lingkungan dengan melandaskan diri pada nilai-nilai tauhid (Allah yang menciptakan alam semesta, sehingga harus dijaga oleh manusia), khalifatu fi al-ardhi (tujuan awal penciptaan manusia yang menjaga alam dan seisinya), adil (perilaku berbuat adil bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada ciptaan Allah yang lainnya), dan mizan (keseimbangan dalam mengelola berbagai kepentingan dan tujuan).

Empat nilai utama di atas yang melandasi Fazlun Khalid (pendiri Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences, IFEES), mendefinisikan ekoteologi Islam sebagai penerapan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah untuk mengatasi krisis lingkungan. Ia menekankan konsep tauhid (keesaan Tuhan), di mana seluruh ciptaan, termasuk alam, adalah tanda-tanda kebesaran-Nya. Manusia memiliki peran sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi, yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan alam (mizan).

Karenanya, merusak lingkungan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah (adil). Upaya mendorong pelestarian lingkungan dengan empat nilai keagamaan telah memposisikan upaya tersebut ini sebagai jihad ekologis, sebagaimana yang dinyatakan oleh Fachruddin Mangunjaya (2011).

Nilai-nilai dasar ajaran agama Islam terkait ekoteologi dapat disarikan sebagai berikut:

1) Keimanan tidak semata tertuju pada Ilahi dengan menjalankan ibadah mahdah, tetapi juga ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah didefinisikan sebagai ibadah yang telah ditetapkan tata caranya, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Sementara ibadah ghairu mahdah adalah urusan dunia yang memiliki nilai ibadah jika diniatkan penghambaan kepada

Allah. Di dalamnya sarat ibadah yang berhubungan dengan kebaikan terhadap manusia dan alam semesta ataupun kebaikan jenis lainnya. Upaya melestarikan alam semesta adalah bagian dari ibadah kepada Allah swt.

2) Adanya keseimbangan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Keseimbangan itu masing-masing diwujudkan dengan peribadatan dan kebaikan, sehingga mencapai tingkat keimanan yang sempurna. Pelestarian lingkungan merupakan bagian penting dari menjaga keseimbangan itu. Dengan menciptakan lingkungan bersih dan sehat, pencapaian pada kebahagiaan kehidupan akhirat pun akan mudah dan terjaga baik.

3) Tuntutan membangun hubungan baik secara vertikal dan horizontal. Hubungan baik secara vertikal adalah segala Tindakan yang diberikan untuk bukti penghambaan kepada Allah Swt, dan hubungan baik secara horizontal adalah membangun kebaikan dan keadaban terhadap manusia dan lingkungan sekitar. Jika kepada manusia disebut sebagai keadaban publik maka untuk lingkungan dapat disebut dengan keadaban alam.

4) Kewajiban untuk menjaga alam semesta dengan baik, dan menjauhi perilaku yang merusak dan berlebih-lebihan saat mengeksploitasi alam semesta. Kewajiban ini dituangkan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan Hadits. Landasan ini memungkinkan nilai keimanan seseorang juga ditentukan pada amal kebaikan yang dilakukan terhadap lingkungan sekitarnya. Setidaknya pelestarian lingkungan terkait erat dengan empat nilai utama keimanan dan amal saleh manusia, yaitu tauhid, khalifah, adil dan mizan.

2. Ekoteologi Kristen dan Katolik

Ekoteologi menurut agama Kristen dan Katolik digambarkan dengan beberapa ajaran yang ditetapkan dalam Alkitab. Kitab Kejadian 2: 15 dianggap sebagai lansiran utama nilai ekoteologi dalam Kristen dan Katolik. "Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu". Kehadiran manusia bermula di sebuah lingkungan yang lestari (taman Eden), dan kewajiban mereka lah untuk menjaga lingkungan itu, sebagaimana awal kejadiannya. Lansiran ajaran ini pun diperkuat dengan Kitab Kejadian 1:31 yang menyatakan, ciptaan "sangat baik," dan manusia diperintahkan untuk "mengusahakan dan memelihara" bumi (Kejadian 2:15).

Dalam ajaran Alkitab, beberapa ayat mengungkap peristiwa dan keajaiban alam yang tidak terlepas dari kekuasaan Tuhan. Hal ini menunjukkan alam semesta atau lingkungan menjadi pembelajaran penting dari keimanan manusia kepada Tuhannya. Pembelajaran itu sering kali diberikan contohnya oleh Yesus dan para pengikutnya yang menunjukkan betapa pedulinya mereka terhadap upaya pelestarian lingkungan.

Tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Alkitab, Paus Fransiskus dalam Laudato Si' (2015) juga menyerukan ecological conversion, yaitu instruksi dan anjuran yang menekankan tanggung jawab umat untuk melindungi "rumah bersama" dari kerusakan. Dokumen Katolik ini menekankan bahwa hakikat ekoteologi dalam ajaran Kristen dan Katolik tidak sekadar cabang etika lingkungan, tetapi dimensi reformasi menyeluruh yang menembus doktrin, liturgi, dan praktik gereja.

Ekoteologi dalam hal ini mengandung kritik ganda, yaitu kritik agama terhadap budaya perusakan alam dan kritik ekologis terhadap kekurangan dari tradisi keagamaan yang terkadang masih memberi legitimasi pada eksploitasi alam. Oleh karena itu, Gereja dipanggil untuk mewujudkan "eco-mission" melalui tata kelola, pendidikan, liturgi, dan aksi nyata yang berpihak pada kehidupan, sehingga kepedulian ekologis bukan opsional namun sebagai wujud setia pada inti Injil yang memanggil umat untuk merawat, memulihkan, dan mengasihi seluruh ciptaan.

Dengan demikian, ekoteologi dalam agama Kristen dan Katolik dihubungkan dengan doktrin inti (Trinitas, Inkarnasi Kristus, Karya Roh Kudus, Penciptaan, Keselamatan, Kepenuhan, Teodisi dan Penderitaan Ciptaan, Gereja dan Sakramen), sehingga memberi landasan teologis yang kuat mengenai kepedulian lingkungan (Conradie, 2014). Bahkan dalam buku J.J. Johnson Leese, yang berjudul Christ, Creation and the Cosmic Goal of Redemption: A Study of Pauline Creation Theology as Read by Irenaeus and Applied to Ecotheology, menyebutkan pemahaman Paulus tentang penciptaan tidak hanya terbatas pada kosmologi awal, namun sangat erat dengan visi eskatologis mengenai penebusan seluruh ciptaan.

Surat-surat Paulus melalui lensa teologi Irenaeus menyoroti Kristus memiliki dimensi kosmik, yaitu tidak sekadar penyelamat jiwa manusia, melainkan pembaharu seluruh tatanan ciptaan (Bruner, et.al, 2014). Karenanya, ada praktik harapan yang tercermin dalam teks ekoteologi Kristen dan Katolik yang mengubah cara pandang, nilai, dan gaya hidup masyarakat terhadap bumi (Dalton dan Simmon, 2010).

Artinya, dalam ajaran Kristen dan Katolik terlihat ada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan ekoteologi sebagai berikut:

1) Pemeliharaan alam semesta adalah bagian tidak terpisahkan dari keimanan. Hal ini tercermin dari ayat-ayat dalam surat Kejadian.
2) Kehadiran Kristus, bukan saja menawarkan kebahagiaan atau penyelamatan jiwa manusia, tetapi juga menjadi pembawa pesan kebaikan untuk alam semesta, termasuk upaya melestarikan lingkungan dan ciptaan-Nya.
3) Teologi penciptaan dan penebusan tidak hanya menyangkut keselamatan manusia, tetapi juga pembaruan seluruh ciptaan. Hal ini memungkinkan umat Kristen dan Katolik harus memiliki kepedulian besar terhadap ciptaan Tuhan.

4) Ajaran cinta kasih tidak sekadar pada aspek kemanusiaan saja, tetapi juga mengisi ruang-ruang kesemestaannya, termasuk lingkungan hidup, makhluk lain, dan seluruh unsur yang ada di alam semesta.

3. Ekoteologi dalam Buddha

Kehidupan Buddha memiliki latar belakang kerindangan taman, hutan atau pohon yang kemudian pohon maupun tempat tersebut disucikan oleh penganutnya. Bhuvana Smrti– sadar lingkungan umat Buddha juga didasarkan pada riwayat kehidupan Guru Agung Buddha sebagai teladan umat Buddha. Sebagai seorang pangeran, Sidharta dikisahkan lahir di taman yang bernama Lumbini, mencapai pencerahan spiritual di bawah pohon "Bodhi", membabarkan ajaran pertama di taman Rusa Isipatana menyampaikan ajaran utama kode etik hidup kepertapaan di Hutan Bambu Velluvana, hingga wafat di bawah pohon Sala kembar di Kusinara.

Hal ini menunjukkan keselarasan ajaran Buddha dengan alam dan makhuk hidup. Demikian juga terkait pelatihan atau gladi spiritual, Buddha menasehatkan kepada para biarawan agar mencari tempat di tengah hutan, di kaki pohon, di gua, di alam terbuka, atau pembuangan mayat sebagai tempat yang baik untuk pertapaan. Udara yang bersih, lingkungan yang asri dan alami akan sangat mendukung dan layak dipertimbangkan sebagai sarana untuk pertumbuhan spiritual.

Sebagai agama "cinta kasih", agama Buddha begitu kaya dengan nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup. Bagi ajaran Buddha, menjaga lingkungan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kewajiban manusia sebagai bagian dari alam semesta. Terdapat banyak pesan simbolik dan pesan Dharma yang mengarah pada aksi nyata pelestarian alam. Seperti peristiwa unik yang terjadi setelah pertapa Sidharta mencapai pencerahan menjadi Buddha, untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat mendalam terhadap pohon Bodhi yang telah menaunginya sampai mencapai pencerahan dengan menatapnya selama satu minggu penuh.

Peristiwa unik tersebut kemudian tercatat dalam kitab suci sebagai peristiwa Animisa Sattaha dan untuk mengenangnya dibangun Cetiya Animisa. Ungkapan terima kasih terhadap pohon Bodhi ini menunjukkan relasi mendalam antara manusia dengan alam sekitarnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa alam, sebaliknya kelestarian alam juga dipengaruhi perilaku manusia. Hartawan Anatapidika mempersembahkan Hutan Jeta di pingiran Kota Savathi kepada Buddha dan Sangha yang dikhususkan untuk olah spiritual para Bhikkhu. Ada teks keagamaan Buddha yang cukup penting, sebagaimana tercantum di bawah ini.

Menjaga hutan, taman atau perkebunan, membangun jembatan, tempat minum dan sumur, dan mereka yang memberikan tempat tinggal. Jasa mereka selalu tumbuh siang dan malam. Teguh dalam prinsip, sempurna dalam perilaku, mereka akan menuju surga"

(Vanaropa Sutta, Samyutta Nikaya.1.47)

Teks Vanaropa Sutta di atas memuat perintah terkait "pelestarian taman (aramaropa) maupun hutan (vanaropa) sangat perlu dilakukan karena memiliki nilai kebajikan yang luhur laksana sang penolong". Teks ini jelas mengandung unsur perintah untuk aktif terjun dalam pelestarian alam dan memperindah indahnya alam.

Di dalam Bhuvana Smrti – sadar lingkungan umat Buddha menyerukan perlindungan terhadap kelestarian alam maupun semua makhluk berdasarkan semangat cinta kasih dan kasih sayang universal. Thich Nhat Hanh (2008) menegaskan keterkaitan manusia dengan alam. Buddha Dharma sebagai "jalan tengah" menghindari eksploitasi berlebihan demi kebahagiaan sejati (Nirvana).

Agama Buddha memandang semua kehidupan sebagai saling keterkaitan, sehingga apabila terjadi kerusakan pada satu bagian ekosistem maka akan berdampak pada keseluruhan jejaring kehidupan. Prinsip inti ajaran Buddha seperti pratityasamutpada (hukum sebab-akibat bergantungan), meitri (cinta kasih), dan karuna (belas kasih) merupakan unsur pembentuk etika ekologis yang relevan bagi krisis lingkungan kontemporer. Oleh karena itu terdapat potensi ajaran Buddha sebagai sumber motivasi spiritual untuk perubahan gaya hidup yang ramah lingkungan. Salah satu contoh penerapan nyata fondasi filosofis Buddha ini adalah gerakan Tree Ordination yang dilakukan di Thailand, sebuah inisiatif monastik dalam melindungi hutan, serta adaptasi ajaran Buddha dalam kampanye lingkungan global (Edelglass, 2021).

Hal di atas senada dengan tulisan Batchelor, et. Al (2022) dalam buku Buddhism and Ecology: Living the Dharma in a Time of Crisis yang menyebut ajaran dasar Buddha tentang keterhubungan, welas asih, dan pelepasan menjadi dasar yang kuat terkait etika lingkungan. Krisis ekologis tidak dapat diatasi hanya dengan teknologi dan kebijakan saja, melainkan memerlukan transformasi batin manusia untuk mengatasi akar keserakahan dan ketidakpedulian. Melalui ajaran Dharma inilah, manusia diajak melihat alam sebagai bagian dari diri sendiri, sehingga merawat bumi menjadi suatu bentuk praktik spiritual. Dari konsep filosofis hingga contoh nyata komunitas Buddha yang menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, sehingga menjadi gambaran bahwa Buddha mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam gerakan ekologis global.

Dari ajaran agama Buddha, setidaknya ada tiga nilai utama yang berkontribusi terhadap landasan ekoteologi:

1) Ajaran Kesaling-keterhubungan. Melalui prinsip hukum Kesaling-keterhubungan (Pratitya Samudpada) menjadikan landasan kesadaran manusia terhadap kelestarian dan keselarasan dengan alam semesta: "Jika alam rusak, keseluruhan ekosistem termasuk manusiapun akan menderita"
2) Ajaran Kebijaksanaan, Cinta Kasih dan Welas Asih. Ajaran Kebijaksanaan (prajna) mendorong kesadaran lingkungan dengan memandang alam sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Cinta kasih (meitri) universal bagi semua makhluk secara alami mencegah tindakan pencemaran atau eksploitasi alam. Welas asih (karuna) mendorong upaya meringankan penderitaan, termasuk penderitaan akibat kerusakan lingkungan, sementara kebijaksanaan (prajna) memampukan kita untuk memahami konsekuensi dari tindakan kita terhadap alam.
3) Ajaran pengendalian diri dan tanpa kekerasan. Pengendalian diri (Samvara) membantu untuk mengendalikan keinginan yang mendorong perilaku merusak, sedangkan ajaran tanpa kekerasan (Ahimsa) menghindari perburuan liar, penebangan pohon, dan pencemaran lingkungan secara aktif.

4. Ekoteologi dalam Hindu

Agama Hindu merupakan agama yang kental dalam persoalan lingkungan. Kedekatan ini terlihat jelas pada kepercayaan umat Hindu kepada sosok-sosok yang berdekatan dengan alam semesta, baik dalam bentuk alam, makhluk, ataupun elemen lain. Bahkan, ada satu konsep penting dalam agama Hindu yang menunjukkan betapa dekatnya ajaran agama ini dengan isu pelestarian lingkungan. Konsep yang dimaksud adalah Tri Hita Karana sebagai dasar hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Ada juga konsep Gerakan Punia untuk lingkungan (Green Dharma) yang muncul sebagai implementasi khusus keharmonisan manusia dengan alam dan lingkungan. Gerakan ini mencakup berbagai aspek yang melibatkan umat Hindu dalam pelestarian alam, pendidikan lingkungan, pengurangan dampak negatif terhadap alam, dan penerapan gaya hidup berkelanjutan.

Sekalipun tertuju pada elemen air sebagai nama lain dari “alam”, harmoni tiga elemen pada konsep Tri Hita Karana sangat luas dan menunjukkan adanya kewajiban manusia sebagaimana tuntutan iman kepada Tuhan untuk menjaga lingkungannya. Konsepsi ini menjadi “nilai peradaban besar” yang dipersembahkan agama Hindu untuk mendukung kelestarian lingkungan. Konsepsi Tri Hita Karana merupakan turunan dari isi Kitab Bhagavad Gita V.18 yang menegaskan adanya kesetaraan semua makhluk dan upaya membangun relasi yang baik untuk semuanya.

Konsepsi di atas secara praktik diterjemahkan oleh umat Hindu di Bali misalnya dengan tradisi subak. Di dalam tradisi ini mencerminkan sistem pengelolaan air yang berkelanjutan. Ekoteologi dalam praktik pada komunitas Hindu terlihat dari adaptasi Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah, yang mengintegrasikan pemujaan kepada Tuhan dan penghormatan terhadap alam.

Dengan demikian, ajaran agama Hindu sangat peduli terhadap keberlanjutan alam dan mendorong umatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga alam. Praktik keimanan ini akan menjadi bentuk punia (sumbangan

sukarela) yang bermanfaat bagi diri mereka, masyarakat, dan bumi ini secara keseluruhan.

Dengan mencermati ajaran agama Hindu terkait ekoteologi, setidaknya ada tiga nilai dasar yang menjadi landasan ekoteologinya, yakni:

1) Adanya konsep kesemestaan antara Tuhan, manusia dan alam. Konsep ini memungkinkan keimanan kepada Tuhan juga harus dibuktikan dengan kebaikan terhadap manusia dan alam semesta. Semua perilaku manusia harus memiliki kemanfaatan universal terhadap Tuhan dan lingkungannya. Jika ia tidak berkontribusi, ancaman terhadap eksistensi alam semesta akan nyata terjadi. Dalam konteks ini, manusia juga tidak menghargai ciptaan Tuhan.
2) Adanya keseimbangan dalam aksi-aksi kebaikan, baik kebaikan kepada Tuhan, kepada manusia dan kepada alam semesta. Keseimbangan ini memungkinkan proses keimanan seseorang harus berdampak nyata kepada lingkungan sekitarnya.
3) Semua varian, dimensi, dan unsur di alam semesta tidak terlepas dari keagungan Tuhan. Jika manusia tidak memperlakukannya dengan baik, ia berarti "tidak menghargai dan tidak berbakti" kepada Tuhannya.

5. Ekoteologi dalam Khonghucu

Kitab Zhong Yong 中庸 (Tengah Sempurna) mengajarkan harmoni (he 和) sebagai jalan suci (Dao 道), di mana manusia hidup selaras dengan alam. Mengzi (IVB: 7) menyerukan sikap tengah yang bijaksana, menghindari eksploitasi berlebihan. Konsep Yin Yang 阴阳 menegaskan keseimbangan antara manusia dan lingkungan sebagai hukum Tuhan. Hubungan Antara Tuhan Yang Maha Esa, Alam Semesta, dan Manusia merupakan prinsip pemuliaan hubungan dalam agama Khonghucu. Ketiganya dikenal dengan sebutan San Cai 三才, yakni Tian-Di-Ren 天 地 人 Jika ketiga hubungan ini dapat selaras dan berjalan beriringan dengan harmonis, maka semua makhluk akan tumbuh berkembang dan terpeliharanya berlaksana benda.

Ada tiga hubungan penting yang harus dijaga. Pertama, Jalan Suci Tian (Tian Dao 天道): Hubungan manusia dengan Pencipta; kedua, Jalan Suci Manusia (Ren Dao人道): Hubungan Sesama Kemanusiaan; dan ketiga Jalan Suci Bumi (Di Dao 地道): Hubungan Manusia (Ren 人) dengan Alam (Di 地). Khusus di bagian hubungan terakhir, dalam kitab Sishu 四口 pada bagian Mengzi 孟子 Jilid 1A: 4, dijelaskan bagaimana hubungan dan perlakuan manusia terhadap sumber daya alam, terutama saat rakyat mengerjakan sawah, menangkap hewan (ikan dan kura-kura) serta ekosistem di hutan.

"Janganlah mengganggu saat rakyat mengerjakan sawah, sehingga hasil bumi tidak kurang untuk dimakan; jangan diperkenankan penggunaan jala bermata rapat untuk menangkap ikan, sehingga ikan dan kura-kura tidak kurang untuk dimakan; dan pemotongan kayu di hutan harus ditentukan waktunya, sehingga kayu di hutan tidak kurang dipergunakan. Bila hasil bumi, ikan dan kura-kura tidak kurang untuk dimakan; kayu di hutan tidak kurang untuk dipergunakan, niscaya rakyat dapat memelihara keluarganya yang hidup dan dapat mengurus baik-baik bila ada kematian; sehingga mereka tidak menyesali".

Dalam upaya menciptakan hubungan harmonis antara Sang Pencipta, Manusia, dan Alam Semesta (yang diwakili oleh Bumi – Lingkungan Alam Sekitar), diperlukan kerja nyata berupa karya-karya yang berorientasi pada

ibadah, tenggang rasa dan kepedulian terhadap lingkungan. Upaya ini perlu didukung oleh pengetahuan tentang bagaimana mewujudkan suatu ibadah yang baik dengan berbagai tatacara yang meliputinya, mengenal sesama manusia dengan berbagai etika yang wajib dilakukan dan memahami alam dengan berbagai tanda tanda yang menyertainya.

Semua hubungan antara Tuhan-Manusia dan Alam tetap dilandasi oleh ajaran Khonghucu paling dalam, yaitu filosofi Yin Yang 阴阳. Filosofi ini berusaha menciptakan kesimbangan dan keharmonisan yang berkaitan dengan memuliakan hubungan; manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Sang Maha Pencipta (Tian 天). Penerjemahan konsep Yin Yang 阴阳 dalam bentuk perilaku hidup keseharian merupakan tuntutan utama ajaran Khonghucu.

Berdasarkan ajaran Khonghucu tersebut, setidaknya ada tiga nilai utama yang menjadi lansiran ekoteologinya:

1) Penghargaan terhadap kesemestaan (lingkungan sekitar dan makhluk hidup yang ada di dalamnya).
2) Adanya konsepsi keseimbangan Yin dan Yang yang mewajibkan manusia harus berada pada keseimbangan semesta yang telah diatur sedemikian rupa.
3) Adanya tiga hubungan penting: Tuhan-manusia-alam, yang di dalamnya sarat dengan konsekuesi dan kompensasi jika dalam pelaksanaannya sesuai atau tidak sesuai dengan ketetapan ajaran yang ada. Etika lingkungan menjadi poin penting dari hubungan tiga elemen ini.

6. Tradisi dan Kepercayaan Lokal

Selain ajaran ekoteologi yang didasarkan pada agama-agama yang ada, tradisi dan kepercayaan lokal pun menjadi sumber nilai yang perlu dicermati dengan baik. Pendekatan ekoteologi yang berakar pada epistemologi dan kosmologi adat menjadi penawaran strategis yang memandang bumi tidak hanya sekadar sumber daya, namun juga sebagai kerabat dan entitas sakral. Adanya teori kritis dan contoh konkrit dari berbagai wilayah seperti Indonesia, India, Pasifik, Afrika, dan Amerika Latin menunjukkan keberadaan masyarakat adat dengan segala nilai, tradisi dan kepercayaannya menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjuangan dan strategi pelestarian lingkungan.

Keyakinan atas kepercayaannya merupakan bagian dari perjuangan politik melawan kolonialisme, kapitalisme global, patriarki, rasisme, eksploitasi pemodal, dan kasta. Dengan menyakini agama dan kepercayaan tradisi berujung pada kebaikan, maka sumber-sumber nilai ekoteologi pada komunitas adat pun sama pentingnya untuk menjadi lansiran etik ekoteologi. Di dalamnya sama-sama menawarkan visi alternatif tentang hubungan manusia dengan alam dan sesama. Pemberian ruang atas nilai-nilai kepercayaan ini pun merupakan wujud nyata dari penerjemahan moderasi beragama dan prinsip dasar ekoteologi, khususnya terkait inklusif, keterbukaan dan partisipatif.

Definisi cinta bukan hanya dimensi personal, tetapi juga kosmik dan ekologis yang menjadi fondasi etis bagi praktik keberlanjutan dan keadilan. Kearifan lokal Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan di masyarakat adat Dayak, Badui, Kajang, Samin, Tau Taa Vana, Sasak dan lainnya yang tertuang dalam tradisi seperti sasi, subak, siduruk-duruk, batu hariri,

pelagandong, dan awig-awig, memperkuat landasan ekoteologi dengan mengatur pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Berdasarkan kerangka konsep dan jabaran nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan kepercayaan, serta dikembangkan oleh berbagai tradisi lokal di atas, tercermin kuat adanya pandangan, kesadaran dan praktik ekoteologi bagi umat beragama dan umat berkepercayaan. Artinya, secara lansiran sumber nilai, masyarakat beragama dan berkepercayaan di Indonesia telah memilikinya.

Namun, kepemilikan nilai tersebut sering kali tidak terbaca, tidak terpahami, dan tidak dikembangkan menjadi perilaku individual dan sosial. Beragam alasan terkait etos, merebaknya arus globalisasi dan kapitalisme hingga ke jantung pedesaan dan permukiman masyarakat adat menjadi komponen penting menjauhnya umat beragama dari pelaksanaan internalisasi nilai ekoteologi. Dengan demikian, pemberian ruang nilai-nilai kepercayaan terkait ekoteologi berarti memungkinkan upaya menghidupkan kembali tradisi dan kepercayaan yang tersebar pada kelompok-kelompok masyarakat adat di Indonesia.

E. Penetapan Formal Nilai Ekoteologi

Berdasarkan lansiran nilai-nilai agama dan tradisi kepercayaan yang berkembang terkait ekoteologi di atas, setidaknya ada lima poin penting yang menghubungkan nilai-nilai antara satu agama dengan agama lainnya. Lima poin ekoteologi inilah yang menjadi landasan Kementerian Agama dalam pengembangan ekoteologi sebagai arah dan kerangka kerja kebijakan dan program nasional.

Lima nilai ekoteologi itu sebagai berikut:

1. Alam semesta termasuk di dalamnya lingkungan merupakan manifestasi Tuhan. Dalam konteks filsafat, ia menjadi semacam "tajalli" (manifestasi) atau "cermin Ketuhanan". Karenanya, sebagai cermin Tuhan, memperlakukan

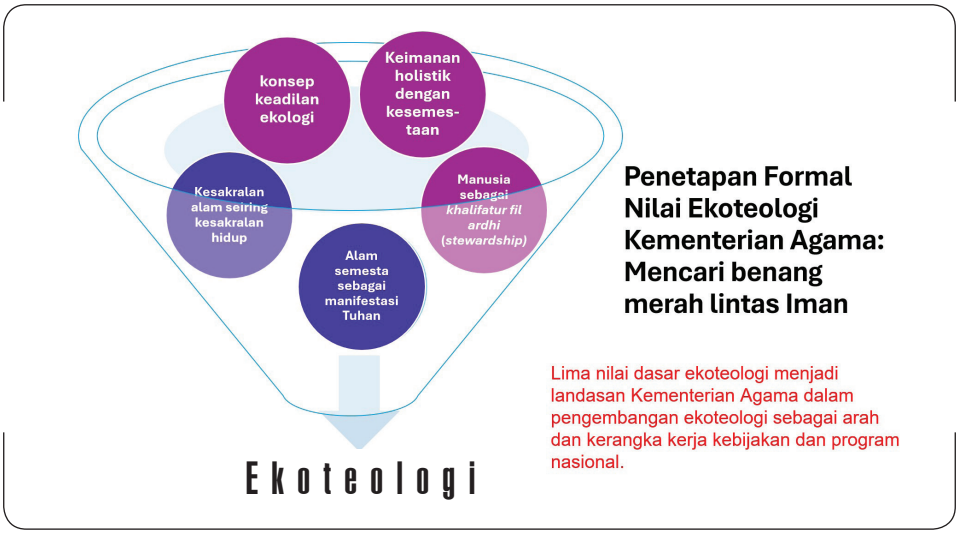

Gambar 3. Nilai Ekoteologi

lingkungan sama artinya dengan memperlakukan Tuhan. Ketika kita menjaga lingkungan secara baik, itu sama artinya dengan "memperlakukan Tuhan" dengan baik. Pengabdian kepada Tuhan salah satunya dapat diwujudkan dengan perlakukan yang baik terhadap lingkungan sekitar beserta segala isi di dalamnya. Namun, konsepsi ini jangan disalah-pahami sebagai upaya menyamakan Tuhan dengan alam semesta atau dimensi-dimensi tertentu dalam lingkungan.

2. Manusia sebagai khalifatu fil ardhi (pemimpin di bumi, stewardship). Dalam makna tersebut ada kewajiban yang melekat bahwa manusia menjadi "penjaga atau penatalayanan alam semesta" beserta segala isi di dalamnya. Tanggung jawab ini melekat pada setiap individu manusia di setiap wilayahnya berada. Sebagai seorang pemimpin, ia harus mengembangkan kepemimpinan yang baik. Menjadi pemimpin yang baik, adalah mereka yang mengedepankan kebaikan untuk wilayah dan penghuni di dalamnya. Dengan demikian, mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan berarti sama saja menjerumuskan kepemimpinannya pada jurang kehancuran.
3. Adanya kesakralan alam yang seiring bersama dengan kesakralan hidup. Ketika kehidupan manusia dianggap sakral, sehingga setiap manusia diwajibkan untuk menjaga jiwa dan harta bendanya (hifzul nafs, hifzul mal; hak asasi), ia juga menyakini alam semesta dan lingkungan sekitar yang dipijaknya juga sangat sakral (hifzul alam). Kesakralan itu hadir dari segala bentuk yang diberikan oleh lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Konsekuensinya, jika kehidupan manusia itu sakral, maka ruang (lingkungan) penyediaan atau pemenuh kebutuhan hidup manusia pun sama sakralnya. Konsepsi well-being sesungguhnya tidak hanya melekat pada manusia, tetapi juga kepada "well-being ekologis".
4. Adanya konsep keadilan ekologi. Keadilan ekologi yang dimaksud di sini adalah kesetaraan dan keberlanjutan hubungan manusia dengan lingkungan, dan di dalamnya ada tekanan utama bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem lingkungan dan harus bertanggungjawab untuk menjaganya. Sebagai bentuk dari keadilan ekologi, ia diterjemahkan dalam bentuk respon dan aksi manusia terhadap sistem pengelolaan lingkungan secara baik, menyeluruh, dan memberikan porsi-porsi yang sesuai dengan tatanan ekosistem yang ada.
5. Keimanan yang bersifat holistik yang berkorelasi kuat dengan tanggung jawab kesemestaan. Keimanan manusia atau seorang hamba tidak bersifat abstrak, individualis, dan berada pada ruang-ruang tertutup (privat). Keimanan di dalamnya diterjemahkan secara konkrit dalam bentuk kerja-kerja nyata, sosial kolektif dan memiliki korelasi tanggung jawab pada keselarasan ruang-ruang terbuka (publik). Pilihan ini memungkinkan, kepedulian terhadap tata kelola dan kelestarian lingkungan menjadi bagian tidak terpisahkan dari praksis keimanan seseorang.

F. Dimensi dan Indikator Ekoteologi

Kebijakan nasional terkait ekoteologi yang dirumuskan oleh Kementerian Agama mencakup beberapa dimensi penting yang harus dicermati untuk diturunkan dalam berbagai indikator. Ada lima dimensi ekoteologi yang ditetapkan beserta turunan indikatornya, yakni:

1. Dimensi Nasionalisme: Kedaulatan Tanah, Air, dan Udara. Dimensi ekoteologi dapat mencakup komitmen nasionalisme berupa kedaulatan tanah, air, dan udara. Komitmen ini mampu membangun nasionalisme dan

menciptakan kesadaran bernegara, khususnya dalam menjaga kedaulatan tanah, air, dan udara. Terlebih komitmen ini telah ditegaskan dalam UUD 1945 dan berbagai undang-undang lainnya.

2. Dimensi Keadaban Alam: Penghormatan terhadap Ciptaan. Dimensi keadaban alam adalah "memperlakukan alam secara beradab". Dimensi ini berdiri pada sikap terbuka terhadap kesucian alam sebagai ciptaan Tuhan, termasuk menghormati hak makhluk hidup lain (hewan, tumbuhan) dan ekosistem. Ini mencakup kesediaan berdialog lintas agama untuk pelestarian lingkungan dan mendukung inisiatif seperti wakaf hutan.

   Di dalam dimensi ini tersirat jelas upaya menolak tindakan yang merusak lingkungan, seperti deforestasi berlebihan, polusi, atau pembuangan sampah sembarangan. Cakupan dimensi ini terlihat dari partisipasi dalam aksi nyata, seperti penanaman 1 juta pohon matoa (Edaran Sekjen Kemenag No. 182/2025) atau pengelolaan sampah berbasis komunitas keagamaan.
3. Dimensi Kearifan Lokal: Mengangkat nilai-nilai dan praktik baik kearifan lokal untuk mendukung ekoteologi. Dimensi ini memberikan ruang bagi

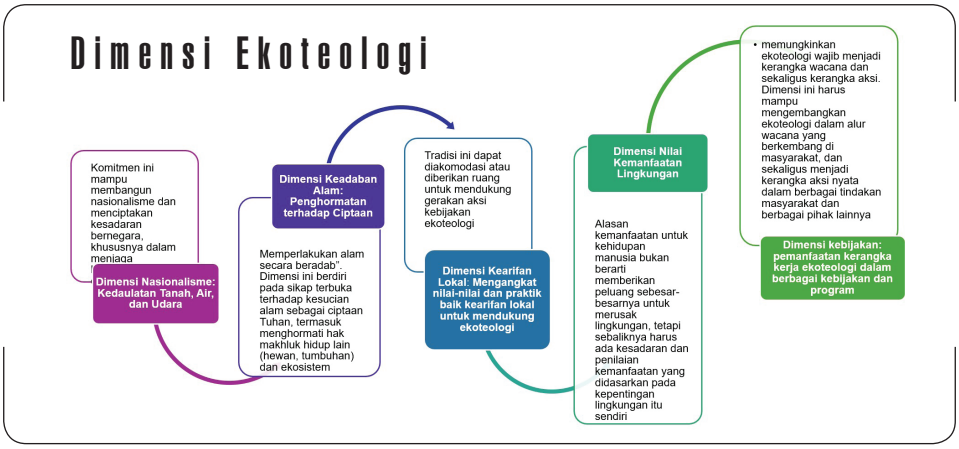

Gambar 4. Dimensi Ekoteologi

tradisi lokal yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti sasi, batu hariri, siduruk-duruk, subak, atau awig-awig. Tradisi ini dapat diakomodasi atau diberikan ruang guna mendukung gerakan aksi kebijakan ekoteologi. Salah satu contohnya: integrasi nilai ekoteologi dalam ritual Hindu seperti Puja Tri Sandhya, dan dakwah Islam berbasis lingkungan yang ada di sekitarnya.

4. Dimensi Nilai Kemanfaatan Lingkungan. Dimensi ini penting agar para aktor industri dan masyarakat tidak semena-mena dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Alasan kemanfaatan untuk kehidupan manusia bukan berarti memberikan peluang sebesar-besarnya untuk merusak lingkungan, tetapi sebaliknya harus ada kesadaran dan penilaian kemanfaatan yang didasarkan pada kepentingan lingkungan. Ibaratnya, perlu ada indikator "imbal jasa lingkungan" yang setara bagi lingkungan sekitarnya, ketika terjadi proses pemanfaatan sumber daya alam sekitar.

TABEL 1. DIMENSI DAN INDIKATOR EKOTEOLOGI

NO	DIMENSI (ASPEK)	TUJUAN	INDIKATOR
1	Dimensi Nasionalisme: Kedaulatan Tanah, Air, dan Udara	Penumbuhan rasa cinta tanah dengan dibuktikan dalam menjaga lingkungan tanah dan air	Pemahaman potensi lingkungan sekitar bagi kehidupan masyarakat Tumbuhnya sikap kritis terhadap segala bentuk ancaman kedaulatan atas tanah, air dan sumber daya
2	Dimensi Keadaban Alam: Penghormatan terhadap Ciptaan.	Penciptaan habitus desain perilaku yang menghormati dan menghargai lingkungan sekitar	Kesadaran umat dalam pelestarian lingkungan sekitar Sikap dan perilaku individu, sosial kolektif dan kelembagaan dalam upaya pelestarian lingkungan
3	Dimensi Kearifan Lokal: Mengangkat nilai-nilai dan praktik baik kearifan lokal untuk mendukung ekoteologi	Pemahaman dan pemberian ruang terhadap nilai-nilai dan praktik tradisi dan kearifan lokal dalam pengembangan ekoteologi	Adopsi tradisi dan kearifan lokal dalam pengembangan ekoteologi pada konteks masyarakat di wilayah tertentu Relasi antara agama (kepercayaan) dan kearifan lokal dalam mendorong wacana dan praktik ekoteologi
4	Dimensi Nilai Kemanfaatan Lingkungan	Pengarusutamaan nilai kemanfaatan lingkungan dalam pengembangan/ pembangunan	Adanya desain pengutamaan tata kelola dan pelestarian lingkungan dalam berbagai sektor; Kemampuan penerapan imbal jasa lingkungan bagi wilayah lestari lingkungan
5	Dimensi kebijakan: pemanfaatan kerangka kerja ekoteologi dalam berbagai kebijakan dan program	Perembesan ekoteologi dalam beragam kebijakan, program, aturan, dan kegiatan di berbagai sektor pembangunan	Tingkat perumusan dan penyusunan kebijakan, aturan, regulasi, program, kegiatan dan lainnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan dan lainnya yang mengakomodasi nilai-nilai ekoteologi; Implementasi ekoteologi dalam pengambilan keputusan dan perizinan

*Tabel bersifat sementara. Tujuan dan indikator dapat dikembangkan berdasarkan dimensi cakupannya.

5. Dimensi kebijakan: pemanfaatan kerangka kerja ekoteologi dalam berbagai kebijakan dan program. Dimensi ini dapat dikembangkan oleh pemerintah ataupun para pihak lain, baik Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah dan dunia industri. Semakin besar dan luas kerangka kerja ekoteologi ini digunakan atau menjadi basis kebijakan dan program, maka semakin besar potensi keberhasilannya.

   Dimensi ini memungkinkan ekoteologi wajib menjadi kerangka wacana dan sekaligus kerangka aksi pada program Kementerian Agama ataupun Kementerian lainnya. Dimensi ini harus mampu mengembangkan ekoteologi dalam alur wacana yang berkembang di masyarakat, dan sekaligus menjadi kerangka aksi nyata dalam berbagai tindakan masyarakat dan berbagai pihak lainnya.

   Lima dimensi ini membantu mengenali tingkat komitmen ekoteologi seseorang, komunitas, dan para pihak, sekaligus mendeteksi kerentanan terhadap sikap eksploitatif atau apatis terhadap krisis ekologi. Lima dimensi

ini juga menjadi alat penilaian terkait tingkat keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program dan kebijakan ekoteologi secara implementatif di lingkungan Kementerian Agama ataupun kementerian lainnya.

Lima dimensi di atas dapat dipetakan dan diturunkan dalam berbagai indikator ekoteologi yang bersifat terukur. Indikator ini menjadi instrumen penilaian yang bisa dikembangkan oleh pemangku kepentingan atas beberapa persoalan yang dianggap signifikan bagi pencapaian kerangka kerja ekoteologi.

BAB III

PRAKTIK BAIK EKOTEOLOGI

A. Membangun Landasan Praktik Baik

Ekoteologi sebagai suatu praktik baik sebenarnya telah berkembang jauh sebelum dibangunnya konsep dan kerangka kerja yang ditetapkan Kementerian Agama. Beragam pihak telah berperan dalam aktivitas ekoteologi, mulai dari kementerian dan lembaga negara, kelembagaan sosial keagamaan, komunitas adat, perempuan, organisasi non-pemerintah (NGO), jejaring lintas sektor seperti media dan perusahaan, tokoh agama, akademisi, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan agama, hingga kolaborasi lintas jaringan lainnya.

Peran mereka tidak hanya memperkuat kesadaran ekologis, tetapi juga melahirkan model ekoteologi yang relevan dengan kearifan lokal, ajaran agama, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Landasan nilai dari praktik baik ekoteologi dapat dipahami melalui tiga lapisan kerangka pikir yang saling berkaitan.

Pertama, transformasi cara pikir terhadap alam. Manusia tidak lagi dipandang sebagai penguasa mutlak, melainkan bagian dari jejaring kehidupan. Perspektif ini berakar pada tradisi ekoteologi (Lynn White, Thomas Berry, Sallie McFague), etika lingkungan, dan pandangan ekologis yang menekankan nilai intrinsik alam serta relasi sakral manusia dengan lingkungan. Pelestarian ekologi dipahami bukan hanya sebagai kewajiban moral, melainkan juga ekspresi spiritualitas.

Kedua, habituasi ramah lingkungan. Perubahan cara pikir bermakna bila diwujudkan dalam praktik sehari-hari yang konsisten. Mengacu pada teori praktik sosial (Bourdieu; Shove et al.), habituasi terbentuk melalui pertemuan nilai, kompetensi, dan sarana pendukung. Bentuknya meliputi pengelolaan

Menteri Agama RI, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A.

sampah, penggunaan energi bersih, konservasi sumber daya dan pola konsumsi berkelanjutan. Habituasi yang konsisten berpotensi membentuk norma kolektif dan budaya ekologis di tingkat komunitas sehingga kesadaran ekologis menjadi bagian dari habitus sosial.

Ketiga, advokasi lingkungan. Kesadaran dan habituasi ekologis perlu diperluas melalui gerakan sosial dan politik agar menghasilkan perubahan struktural. Mengacu teori advokasi dan gerakan lingkungan (Keck & Sikkink, 2022), advokasi menghubungkan nilai dan kebiasaan dengan kebijakan publik, tata kelola sumber daya dan transformasi pembangunan. Advokasi memungkinkan praktik baik ekoteologi melampaui tindakan moral individual. Berkembang menjadi agenda kolektif yang menekan negara, pasar, dan institusi global untuk mengambil langkah nyata.

Dengan kerangka ini, praktik baik ekoteologi dapat dilakukan oleh berbagai aktor di Indonesia, serta jejaring dan model ekoteologi terbentuk dalam konteks lokal maupun nasional, bahkan global. Praktik baik ekoteologi di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan dijalankan oleh berbagai aktor dan jejaring yang bekerja di tingkat negara, masyarakat sipil, komunitas adat, hingga individu. Bagian ini berusaha memetakan aktor utama yang berperan menjaga dan mengembangkan praktik ekoteologi, sekaligus menampilkan model ekoteologi yang lahir dari interaksi antara agama, budaya, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Ekoteologi di Indonesia tidak lahir begitu saja. Sebagaimana penjelasan bab sebelumnya, ia merupakan buah dari proses panjang perjumpaan antara penafsiran ulang nilai-nilai agama, revitalisasi kearifan lokal, dan respons mendesak terhadap krisis lingkungan global yang kian nyata. Lebih dari tren kultural atau keagamaan, ekoteologi di Indonesia telah bertransformasi menjadi sebuah energi sosio-politik yang signifikan.

Gerakan ini secara fundamental menantang paradigma pembangunan dominan yang bersifat eksploitatif, seraya menawarkan visi alternatif yang berakar kuat pada etika keagamaan, tradisi leluhur, dan prinsip keadilan ekologis. Ajaran agama tidak lagi hanya ditafsirkan untuk menegaskan moralitas individual, melainkan dibangkitkan kembali menyalakan kesadaran tanggung jawab kolektif manusia sebagai penjaga dan pemelihara alam semesta.

Pada titik ini, ekoteologi menjalankan fungsi ganda yang saling menguatkan: sebagai wacana normatif yang menyediakan landasan etis dan spiritual bagi aksi lingkungan, sekaligus sebagai praksis sosial yang mengikat komunitas-komunitas pada etika keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan ini tidak dimonopoli oleh satu aktor tunggal, melainkan sebuah arena dinamis tempat berbagai pihak. Mulai dari lembaga negara, organisasi keagamaan massal, komunitas adat, kelompok perempuan, hingga organisasi masyarakat sipil berkolaborasi, bernegosiasi, dan terkadang berkonflik dalam menafsirkan serta mengimplementasikan panggilan ekologis mereka.

B. Energi Sosio-Politik dan Peta Aktor Gerakan Ekoteologi

Para aktor yang terlibat dalam gerakan ekoteologi di Indonesia pada umumnya terhubung pada jaringan kolaboratif, sehingga dapat menghasilkan model ekoteologi yang sama ataupun model sintesa yang dihasilkan dari pengalaman kolektifnya. Sering kali ada keunikan tersendiri dalam wajah aktivitas ekoteologi di Indonesia di satu sisi, dan di sisi lain ada tautan erat dengan konteks global. Komparasi praktik baik ekoteologi di Indonesia dan gerakan serupa di Amerika Latin, Filipina, dan Tiongkok menjadi bagian tidak terpisahkan dalam perumusan model ekoteologi.

Melalui analisis berlapis tersingkap pemahaman utuh mengenai keyakinan spiritual dapat menjadi kekuatan transformatif, memperjuangkan masa depan bumi yang adil dan berkelanjutan. Gerakan ekoteologi di Indonesia digerakkan oleh konstelasi aktor yang beragam, masing-masing dengan peran, kapasitas, dan pendekatan khas. Interaksi di antara para aktor ini membentuk sebuah lanskap yang polisentris, di mana inisiatif tidak mengalir dari satu pusat, melainkan muncul dari berbagai simpul di masyarakat.

1. Konsolidasi Negara dan Institusi Publik: Pelembagaan dari Atas

Negara, melalui berbagai kementerian dan lembaga publiknya, memainkan peran sentral sebagai fasilitator, regulator, dan penjamin keberlanjutan praksis ekoteologi. Pendekatan yang diambil menunjukkan pergeseran strategis dari program lingkungan yang bersifat ad-hoc menjadi upaya pelembagaan yang terintegrasi dan sistematis. Alih-alih membiarkan gerakan ini berjalan secara organik semata, justru negara secara aktif berupaya menyerap dan mengarahkan energinya ke dalam kerangka birokrasi dan filantropi nasional. Strategi ini tidak hanya bertujuan mempercepat aksi lingkungan, tetapi juga menyelaraskan gerakan sosial yang kuat dan pembangunan nasional.

Kementerian Agama Republik Indonesia secara tegas menempatkan ekoteologi sebagai salah satu prioritas utama dalam kerangka program Asta Protas Kemenag Berdampak (2025–2029) tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 244 Tahun 2025. Langkah ini menandakan isu lingkungan bukan lagi agenda sampingan, melainkan telah menjadi bagian integral strategi jangka panjang kementerian. Komitmen ini diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, seperti penerbitan Surat Edaran Gerakan Penanaman Satu Juta Pohon Matoa, dan puncaknya adalah penetapan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 442 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pesantren Ramah Lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah lama berperan sebagai mitra teknis. Sejarah kolaborasinya terentang sejak era Menteri Emil Salim pada 1980-an yang aktif berdialog dengan komunitas pesantren, hingga program kontemporer seperti Program

Kampung Iklim (ProKlim). Melalui ProKlim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di tingkat daerah memberikan dukungan teknis dan materiil, seperti pada program pemasangan biopori di Dusun Sangurejo, Yogyakarta. Selain itu, kementerian ini juga berkolaborasi dengan organisasi keagamaan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam menyusun buku panduan praktis "Tingkatkan Taqwa Melalui Kepedulian Lingkungan".

Lembaga negara lain juga turut mendokumentasikan dan menyebarluaskan kearifan ekologis. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di masa lalu menerbitkan hasil penelitian terkait kearifan tradisional masyarakat dalam mengelola lingkungan, seperti studi tentang masyarakat Kampung Naga dan masyarakat pedesaan di Jambi. Termasuk Departemen Kebudayaan dan Pariwisata terdahulu mendokumentasikan kearifan masyarakat nelayan di Sulawesi Utara, yang menunjukkan peran negara dalam melestarikan pengetahuan lokal sebagai aset nasional.

Instrumen filantropi terkait lingkungan yang didukung negara juga dimobilisasi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan gerakan Green Waqf (Wakaf Hijau) yang mencakup program Hutan Wakaf, berhasil menghimpun dana awal lebih dari Rp 410 juta. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menginisiasi program Zakat dan Sedekah Hijau, seperti program Sedekah Hutan yang bekerja sama dengan Hutan Itu Indonesia (HII).

Inisiatif-inisiatif ini mentransformasikan instrumen ibadah individual menjadi alat pembangunan berkelanjutan yang berdampak luas. Pada tingkat simbolik, Masjid Istiqlal sebagai masjid negara menjadi teladan praktik ekoteologi perkotaan. Melalui renovasi yang berfokus pada efisiensi energi dan daur ulang air, Istiqlal menjadi masjid pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) sebagai bangunan hijau pada tahun 2022, menjadikan rumah ibadah sebagai etalase inovasi lingkungan.

Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab memastikan pengelolaan lingkungan yang baik dan sehat melalui kerja sama lintas sektor, termasuk pemberdayaan masyarakat adat dan kearifan lokal, sebagaimana diatur dalam kerangka pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pemerintah pusat, daerah, dan lembaga wajib melakukan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, mencegah pencemaran, serta mengendalikan dampak perubahan iklim.

Tugas ini mencakup perumusan kebijakan, penetapan standar teknis pencegahan pencemaran air, udara, dan tanah, serta penyusunan rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang menjadi tanggung jawab utama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai koordinator. Praktik baik yang diimplementasikan oleh kementerian dan lembaga negara, sebagaimana dirangkum dalam sub-bab ini, bukan hanya inisiatif operasional semata, melainkan manifestasi langsung dari tugas konstitusional pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Praktik baik ekoteologi di tingkat Kementerian/Lembaga negara dapat dirinci sebagaimana tabel 2.

TABEL 2. PRAKTIK BAIK EKOTEOLOGI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA NEGARA

KEMENTERIAN/LEMBAGA	FOKUS/PERAN UTAMA	CONTOH PROGRAM/PRAKTIK BAIK
Kementerian Agama (Kemenag)	Integrasi nilai agama dengan ekologi, penyuluhan agama ramah lingkungan, kurikulum pendidikan agama berbasis ekoteologi.	Gerakan Eco-Pesantren, penyuluhan agama tentang lingkungan, Seribu Kampung Moderasi Beragama yang juga memuat isu ekologi.
Kementerian Kehutanan	Konservasi hutan, edukasi Publik soal Lingkungan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Taman Nasional berbasis partisipasi masyarakat.
Kementerian Lingkungan Hidup	Pengendalian perubahan Iklim	Program Kampung Iklim (ProKlim), Program Adiwiyata (sekolah peduli lingkungan).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Perlindungan ekosistem laut, pemberdayaan masyarakat pesisir.	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut, konservasi mangrove, perlindungan terumbu karang.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)	Pemberdayaan desa dalam pembangunan berkelanjutan berbasis ekologi.	Program Desa Mandiri Energi, pengembangan Desa Wisata Hijau.
Kementerian Pertanian (Kementan)	Ketahanan pangan berkelanjutan, praktik pertanian ramah lingkungan.	Go Organic 2030, Sekolah Lapang Iklim bagi petani, pertanian berkelanjutan.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)	Integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum umum.	Sekolah Adiwiyata (sekolah peduli lingkungan), penelitian ekoteologi lintas ilmu.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Mitigasi bencana ekologi dan edukasi masyarakat.	Program Desa Tangguh Bencana, edukasi berbasis kearifan lokal untuk adaptasi perubahan iklim.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Riset sains-ekologi, termasuk riset berbasis nilai agama dan budaya.	Riset ekoteologi, inovasi teknologi ramah lingkungan, kajian energi hijau.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber praktik baik ekoteologi

2. Organisasi Keagamaan sebagai Infrastruktur Sosial Gerakan

Organisasi kemasyarakatan berbasis agama disingkat ormas keagamaan berfungsi sebagai infrastruktur sosial yang vital. Karena dapat menerjemahkan ajaran teologis tingkat tinggi menjadi aksi kolektif yang mengakar di masyarakat. Dengan jaringan yang luas dari pusat hingga ke tingkat desa, mereka memiliki kapasitas mobilisasi sosial yang tak tertandingi. Terlebih Ketika di dalam tubuh ormas keagamaan ini terdapat spektrum ideologis yang beragam, yang justru menjadi sumber kekuatan dan dinamisme gerakan.

Sebut saja ormas keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kesadaran ekologis yang historis. Hal ini ditandai dengan fatwa Muktamar 1994 di Cipasung yang menyatakan perusakan lingkungan sebagai perbuatan kriminal. Secara kelembagaan, pada tahun 2010, NU membentuk Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI NU) yang menangani isu ini secara terstruktur. Di luar struktur formal, muncul gerakan yang lebih kritis seperti Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) yang menggabungkan nilai-nilai tradisi pesantren dengan analisis keadilan agraria yang lebih radikal.

Kehadiran dua entitas itu bersifat manajerial dan kolaboratif. Satu entitas lagi bersifat advokatif dan kritis menciptakan sebuah dialektika internal yang sehat. LPBI NU dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam program berskala besar, sementara FNKSDA menjaga agar gerakan tidak kehilangan suara profetik dalam mengkritik ketidakadilan struktural. Dinamika ini memungkinkan NU beroperasi di berbagai lini secara simultan, mencegah kooptasi total sambil tetap berkontribusi secara pragmatis.

Ormas keagamaan lainnya adalah Muhammadiyah, yang berlandaskan teologi Al-Ma'un memiliki ekosistem organisasi lingkungan yang paling beragam di Indonesia. Hal ini mencakup lembaga formal seperti Majelis Lingkungan Hidup (MLH) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Ada pula sayap ormas keagamaan perempuannya melalui Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Aisyiyah. Kemudian eksis juga platform lintas imannya, yakni Eco-Bhinneka. Lalu gerakan kader non-formal seperti Kader Hijau Muhammadiyah (KHM). Keragaman ini menunjukkan adanya dinamika internal yang subur dalam menafsirkan dan mempraktikkan panggilan ekologis.

Di samping itu, ada pula Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berperan sentral sebagai pemberi legitimasi normatif. Melalui serangkaian fatwa, MUI telah memberikan landasan syariah yang kuat bagi gerakan lingkungan. Beberapa fatwa kunci meliputi Fatwa No. 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka, Fatwa No. 30 Tahun 2016 yang mengharamkan pembakaran hutan dan lahan, serta Fatwa No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Fatwa-fatwa ini menjadi rujukan otoritatif bagi para dai dan aktivis di masyarakat luas.

Dalam tradisi Katolik, Ensiklik Laudato Si' Paus Fransiskus telah memicu gerakan "Gereja Hijau", menempatkan krisis ekologi sebagai isu iman sekaligus tantangan universal yang melampaui batas agama (Stewart-Kroeker 2019; Steffen 2019; Goncalves Brito 2020). Kegiatan Laudato Si' Indonesia yang melibatkan lintas iman mencakup penanaman mangrove, kampanye Hari Sampah, pelatihan Animator Laudato Si', diskusi ekologi antar-agama, dan pendidikan ramah lingkungan di sekolah-sekolah.

Komunitas Gerakan Laudato Si' Indonesia yang terdiri dari kaum muda Katolik aktif mendorong banyak keuskupan dan paroki di Indonesia, dan bekerja sama dengan kelompok lintas iman dalam kampanye kelestarian lingkungan. Semangat oikumenis (kerjasama antar-gereja) dan dialog antar-agama semakin kuat ketika berbicara soal krisis ekologis, karena semua pihak menyetujui bahwa bumi adalah rumah bersama yang harus dijaga.

Ensiklik ini juga mendorong umat Katolik dan non-Katolik untuk mengubah pola pikir, memprioritaskan pendekatan baru dalam antropologi, ekonomi, dan politik, serta mendorong aksi ekologis kolektif (Messias, 2024).

Pendekatan institusional ini dinilai para peneliti sebagai model yang dapat diadopsi oleh agama-agama besar lainnya (Abumoghli 2023). Di banyak paroki dan jemaat, seperti di Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), pengelolaan sampah menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran lingkungan yang lebih luas melalui kampanye, pembuatan kompos, dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Dalam aktivitas ekoteologi Kekristenan di tingkat nasional, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) secara aktif mendorong gereja anggotanya mengimplementasikan program ramah lingkungan dan melakukan advokasi untuk keadilan iklim. Di aras lokal Pelayanan Pembangunan (Pelpem) Gereja Kristen Batak Karo di Sumatera Utara, yang kini dikenal sebagai Yayasan Ate Keleng/Partisipasi Pembangunan disingkat YAK/Parpem GBKP, memperoleh Kalpataru karena berhasil membangun ekosistem ekoteologi berkelanjutan dan menyejahterahkan hingga kini. Sejak 1974, Alm. Pdt Borong Tarigan, Pdt Selamat Barus dan Pdt Usman Meliala, tiga Pendeta yang melihat keterbelakangan dan kemiskinan di daerah pelayanannya, berinovasi mendirikan koperasi simpan pinjam berbasis jemaat (Credit Union).

Melihat masyarakat harus menempuh jarak 250-meter untuk air minum dan mandi, para tokoh agama ini menginisiasi Program Sarana Air Minum. Belum selesai persoalan air bersih dan kemiskinan, masyarakat juga belum mendapatkan pasokan listrik. Ketiga Pendeta ini akhirnya membangun Pembangkit Listrik Tenaga Laut/Air (PLTL). Kegiatan ini merupakan program bidang infrastruktur yang dilaksanakan GBKP. Pembangkit Listrik Tenaga Laut juga dikenal dengan program Micro Hydro Power (MHP) menciptakan listrik dari air sungai. Unit bengkel Parpem ini juga telah mampu membuat turbin listrik dan pengerjaan mesin lainnya.

Ada enam kabupaten di Sumatera Utara yang menjadi wilayah pengabdian Parpem GBKP dalam hal pembangunan PLTMH yakni Karo, Deliserdang, Simalungun, Dairi, Langkat dan Samosir. Desa di sini sejatinya saling berdekatan dan berada di balik hutan pengunungan Bukit Barisan. Dari beberapa desa di kecamatan Sibolangit, terlihat Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak di sebelahnya. Desa ini juga berdekatan dengan Taman Hutan Raya (Tahura) Sibolangit, dan dikelilingi hutan lindung. Selama 30 tahun bergerak dalam layanan PLTMH, pihak gereja (Parpem GBKP) melihat lingkungan hutan dan sungai di desa yang terdapat PLTMH lebih terjaga. Masyarakat sepenuhnya sadar untuk menjaga kelestarian hutan dan sungai, karena merupakan tangkapan air dan modal bagi keberlangsungan PLTMH.

“Selama puluhan tahun, masyarakat setempat memegang teguh prinsip: menjaga hutan dan menjaga sungai agar tidak rusak demi keberlangsungan hidup yang lebih baik,” kata Guntur. Pernyataan ini merupakan praktik baik yang dilakukan pihak gereja. Saat ini Pelpem GBKP masih eksis hingga kini, dan masih tetap menjalankan Proyek PLTMH pada 9 Desa, Proyek SAM pada 10 Desa, dan mengelola ratusan Credit Union sebagai basis keuangan masyarakat pedesaan (www.repository.uksw.edu).

Kepedulian ekologis telah menjadi titik temu yang mempererat hubungan antara komunitas Katolik dan Protestan di Indonesia. Kedua kelompok ini sering berkolaborasi, baik di tingkat akar rumput maupun pimpinan, untuk merespons krisis lingkungan. Mereka menyadari upaya menjaga ciptaan Tuhan melampaui sekat-sekat denominasi. Pada tahun 2025, contohnya, Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) menjalin kemitraan

dengan organisasi lintas agama GreenFaith Indonesia guna mendorong gerakan "Gereja Ramah Lingkungan" di berbagai jemaat. Kerja sama ini mencakup pelatihan ekoteologi bagi umat, penyusunan panduan rumah ibadah rendah emisi, hingga rencana pemasangan panel surya di gereja.

Banyak contoh nyata, kegiatan ekoteologis di lingkungan Gereja Protestan dan Katolik, menunjukkan bagaimana iman mendorong aksi. Gereja-gereja lokal melihat "Jeritan Ibu Bumi". Mereka turun tangan melalui pendekatan pastoral yang kontekstual. Dari mimbar Gereja hingga aksi bersih pantai, dari doa ciptaan dalam liturgi hingga advokasi kebijakan publik, komunitas Katolik dan Protestan di Indonesia berusaha menjawab tantangan deforestasi, perubahan iklim, sampah plastik, pertambangan, dan isu lingkungan lainnya dengan kreatif dan nyata.

Dengan spirit yang sama, umat dari agama Kristen dan Katolik terus diajak menjalani gaya hidup sederhana dan berkelanjutan sebagai ungkapan syukur atas anugerah alam ciptaan Tuhan. Meskipun tantangan yang dihadapi tidak ringan, langkah-langkah kecil di komunitas lokal ini memberikan harapan: bahwa solidaritas dan kepedulian lintas iman dapat menjadi kekuatan moral untuk menjaga keutuhan ciptaan bagi generasi kini dan mendatang.

Berbagai aksi nyata ekoteologi juga dilakukan oleh kelompok agama Buddha, Hindu, dan Khonghucu dengan afiliasi ormas keagamaannya masing-masing. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta menyebutkan setidaknya ada 192 organisasi atau komunitas lingkungan berbasis agama di Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, agama lokal, dan masyarakat adat (Testriono, dkk, 2024).

Organisasi-organisasi ini aktif merespons isu lingkungan dan perubahan iklim dengan mengartikulasikan etika lingkungan berbasis ajaran agama mereka (Grossman, 2019). Praktik ekoteologi sosial keagamaan di Indonesia misalnya tampak juga dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI). LDII menegaskan, manusia wajib menjaga alam sebagai bagian tugas dakwah, sementara DMI menyatakan, kitab suci memberi mandat langsung untuk merawat lingkungan.

Seruan juga muncul dari tokoh Kristen, misalnya Jhon Victor Kainama dari Sinode Gereja Protestan Maluku yang menekankan kewajiban menjaga lingkungan sebagai ajaran agama. Dengan demikian, pandangan pelestarian lingkungan adalah perintah agama lintas iman, baik Islam, Kristen, Katolik ataupun agama lainnya, dan kebersamaannya semakin menguat.

Sementara itu, perspektif serupa juga hadir dalam komunitas adat dan kepercayaan lokal. Misal, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) menekankan ajaran leluhur tentang pelestarian lingkungan bertujuan menjaga harmonisasi kehidupan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Endang Retno Lastani mencontohkan tradisi bercocok tanam dan ritual adat sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekologi.

Fenomena serupa juga tampak di negara lain. Di Inggris dan Skotlandia, komunitas gereja mengembangkan gerakan lingkungan berbasis narasi agama. Bomberg dan Hague (2018) mencatat, sumber daya budaya gereja memperkuat narasi transenden yang mendorong aksi keadilan iklim, misalnya dalam kampanye "Hentikan Kekacauan Iklim" yang mendukung Paris Agreement 2015. Sumber daya agama dalam hal ini mencakup nilai

TABEL 3. PRAKTIK BAIK EKOTEOLOGI ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN

ORGANISASI KEAGAMAAN	INISIATIF/PERAN UTAMA	CONTOH PRAKTIK/PROGRAM	TAHUN & TEMPAT
Nahdlatul Ulama (NU)	Mengintegrasikan fiqh lingkungan dalam pendidikan pesantren, gerakan sosial berbasis warga NU.	Fiqh al-Bi'ah (Fiqh Lingkungan), Gerakan Eco-Pesantren.	2004, Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur.
Muhammadiyah	Advokasi lingkungan melalui Majelis Lingkungan Hidup, riset dan kebijakan publik.	Gerakan Muhammad-iyah untuk Energi Terbarukan, khotbah Jumat tematik iklim.	2010, Yogyakarta (Pusat Muhammadiyah).
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) – Laudato Si' Indonesia	Mengarusutamakan ekoteologi Katolik sesuai ensiklik Laudato Si' Paus Fransiskus.	Program Laudato Si' Movement Indonesia, eco-parish.	2015 (pasca publikasi Laudato Si'), Jakarta & Keuskupan Ruteng, NTT.
Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)	Ekoteologi Hindu berbasis Tri Hita Karana (harmoni dengan Tuhan, manusia, alam).	Upacara Tumpek Uduh (Hari Pohon), konservasi sumber mata air.	Tradisi sejak abad ke-10, direvitalisasi 2000-an di Bali.
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)	Advokasi ekologi berbasis iman Kristen Protestan.	Gereja Hijau (Green Church Movement).	2012, Jakarta dan Manado.
Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Fatwa dan panduan keagamaan untuk pelestarian lingkungan.	Fatwa MUI No. 04/2014 tentang Pelestarian Satwa Langka, fatwa sampah plastik.	2014, Jakarta (Dewan Fatwa MUI Pusat).
Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia	Jejaring lintas agama untuk melindungi hutan tropis.	Deklarasi perlindungan hutan berbasis iman.	2017, Oslo (global), diluncurkan di Indonesia 2019 – Jakarta/ Kalimantan.
Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN)	Mengembangkan etika lingkungan berdasarkan ajaran Tian (Langit) dan harmoni alam.	Gerakan Lingkungan Harmonis, penanam-an pohon oleh umat Khonghucu.	2018, Semarang dan Jakarta.
WALUBI	Praktik ekoteologi berbasis welas asih & ahimsa.	Sosialisasi Sadar Sampah	2021, DKI Jakarta
PERMABUDHI	Inovasi Hijau yang memiliki prinsip Ekoteologi. Kolaborasi dengan Bimas Buddha dan Kemenko PMK	Pelatihan Eco Enzim eco enzyme secara Nasional dan eco enzyme secara Nasional dan berkala telah mulai Agustus	2023 – hingga saat ini.
Sangha	Penerapan Ekoteologi pada ekosistem Rumah Ibadah	Vihara Hijau	2009, Vihara Borobudur & vihara di Jakarta
Komunitas Buddha Pegiat Budaya	Festival Eco -eligio Cultural antar agama	Tribhuwana Manggala Bhakti	2016, Kulon Progo, DIY

Sumber: Diolah dari berbagai sumber dan keterlibatan langsung dalam aksi bersama

kolektif, identitas bersama, serta simbol-simbol budaya yang membangun solidaritas (Walder 2009; Gamson 1992; Bomberg dan McEwen 2012; Porta dan Diani 2009; Edwards dan Kane 2014).

Dengan demikian, organisasi keagamaan tidak hanya menjadi penyampai etika, melainkan juga aktor penggerak praksis ekoteologi di masyarakat. Mereka menanamkan kesadaran lingkungan melalui ajaran normatif, melembagakannya dalam organisasi, serta menerjemahkannya dalam praktik nyata di tingkat akar rumput. Organisasi keagamaan karenanya berfungsi sebagai lokomotif yang menghubungkan agama, budaya, dan aksi ekologis, serta menjadi basis penting bagi lahirnya gerakan ekoteologi lintas agama di Indonesia.

3. Komunitas Adat sebagai Penjaga Kearifan Ekoteologi yang Hidup

Komunitas adat melalui kearifan lokalnya berperan penting dalam ekoteologi, terutama dalam memperlihatkan bentuk ekoteologi yang hidup (live ecotheology). Bagi komunitas adat, relasi dengan alam tidak sekadar praktik ekonomi atau ekologis, melainkan juga bagian dari keyakinan religius dan identitas budaya. Hal ini terlihat jelas dalam praktik komunitas Muslim Adat Ammatoa Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan komunitas Sangaji di Ternate, Maluku Utara.

Komunitas Ammatoa Kajang dikenal luas sebagai salah satu penjaga hutan terbaik di dunia. The Washington Post menobatkan mereka sebagai “The best forest guardians” pada 2023 karena berhasil menjaga kelestarian hutan adat seluas 314 hektar di Desa Tana Toa. Hutan bagi masyarakat Kajang bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi tanah suci warisan leluhur yang harus dijaga dari generasi ke generasi.

Ajaran Andingingi yang mereka pegang menekankan hidup sederhana tanpa kemewahan (tallase kamase’-mase’), menjaga tanah anugerah Tuhan, dan menghormati leluhur (Heryati, 2011; Testriono, dkk, 2024). Kesederhanaan itu tercermin dalam pakaian hitam khas warga Kajang Dalam, desain rumah seragam yang menolak ornamen, serta larangan penggunaan teknologi modern. Prinsip “ri Kajang tala kulle modern” (di Kajang tidak boleh ada modernisasi – dalam pengertian pembangunan yang merusak alam) menegaskan sikap mereka terhadap alam: menjaga kelestarian lebih penting daripada mengikuti arus kemajuan.

Hukum adat Kajang mengatur dengan ketat pemanfaatan hutan. Warga hanya boleh menebang pohon setelah menanam dan memastikan pohon pengganti tumbuh subur. Empat komoditas utama—kayu, rotan, ikan, dan lebah—dilarang diambil tanpa izin khusus dari lembaga adat Galla Puto. Pelanggaran terhadap aturan ini berakibat pada sanksi adat, mulai dari denda, stigma sosial, hingga pengusiran dari komunitas (Testriono, dkk, 2024). Bagi masyarakat Kajang, merusak hutan adalah dosa terbesar.

Selain menjaga hutan, komunitas Ammatoa Kajang juga mengembangkan tradisi tenun yang menopang perekonomian lokal. Perempuan memegang peran sentral dalam tradisi ini. Kemampuan menenun menjadi syarat utama bagi perempuan yang hendak menikah, sekaligus sarana menciptakan kemandirian ekonomi. Mereka menanam tanaman Tarung, bahan dasar tenun, yang berfungsi ganda sebagai pencegah erosi dan banjir.

Produk tenun tidak hanya memenuhi kebutuhan komunitas, tetapi juga dipasarkan lebih luas dengan dukungan organisasi seperti Aliansi

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kemitraan, dan Dinas Lingkungan Hidup (LH). Tradisi ini memperlihatkan integrasi antara budaya, ekonomi, dan ekologi yang memperkuat posisi perempuan sebagai aktor penting dalam ekoteologi hidup masyarakat Kajang.

Keberhasilan Kajang menjaga hutan tidak lepas dari kombinasi ajaran adat, sanksi sosial, praktik ekonomi berkelanjutan, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, Non-Government Organization (NGO) lingkungan, hingga Bank Sulselbar menunjukkan bahwa kearifan lokal mampu berdialog dengan modernitas tanpa kehilangan identitas. Meski demikian, konservasi di Kajang berakar pada tradisi dan kebutuhan hidup, bukan dari pengetahuan saintifik tentang perubahan iklim.

Jika Kajang menampilkan ekoteologi berbasis hutan, komunitas adat Sangaji di Ternate memperlihatkan ekoteologi berbasis air. Komunitas ini menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui ritual Sigofe Ake Gale (upacara air besar). Ritual tersebut dilakukan untuk memuliakan mata air Ake Gale yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar. Sigofe Ake Gale menggabungkan doa Islam, syair tradisional, dan prosesi adat yang menekankan kesakralan air.

Air tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga simbol keberlanjutan dan keseimbangan kosmos. Tiap tahun, warga membersihkan mata air, berdoa bersama, lalu mendistribusikan air suci kepada masyarakat sebagai simbol berkah dan tanggung jawab kolektif. Prosesi ini menjadi sarana memperkuat identitas komunitas, menjaga solidaritas sosial, sekaligus memastikan kelestarian sumber daya air (Testriono, dkk, 2024).

Komunitas Sangaji memandang bahwa menjaga air sama artinya menjaga kehidupan. Dalam pandangan mereka, kerusakan lingkungan air adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Tuhan dan leluhur. Oleh karena itu, aturan adat melarang pencemaran mata air dan eksploitasi berlebihan. Dengan cara ini, ekoteologi lokal terwujud dalam ritual, norma, dan tindakan nyata yang menjaga sumber daya air.

Baik Ammatoa Kajang maupun Sangaji menunjukkan komunitas adat mempraktikkan ekoteologi bukan dalam wacana teoretis, melainkan dalam tindakan sehari-hari. Hutan bagi Kajang dan air bagi Sangaji adalah ruang sakral yang dijaga dengan adat, ritual, dan solidaritas kolektif. Kedua komunitas ini memperlihatkan bagaimana agama, budaya, dan ekologi berpadu menjadi satu kesatuan.

Contoh-contoh lain dapat memperkaya pemahaman ini. Tengok saja ke masyarakat Kampung Naga di Jawa Barat yang memiliki sistem keyakinan, pantangan, dan larangan kuat dalam mengelola lingkungan hidup mereka. Lalu ada juga masyarakat adat Baduy di Banten Selatan yang menunjukkan bagaimana kearifan lokal secara langsung memengaruhi pola pengelolaan sumber daya alam, sehingga kelestarian lingkungan di wilayah mereka tetap terjaga.

Di Riau, masyarakat adat di sepanjang Sungai Kampar menerapkan sistem “lubuk larangan”, sebuah model pengelolaan sumber daya perikanan berbasis ekosistem. Sistem ini bukan hanya tradisi budaya, melainkan sebuah protokol manajemen ekosistem yang berfungsi. Dengan melarang penangkapan ikan di area dan waktu tertentu, komunitas memastikan siklus

TABEL 4. PRAKTIK BAIK EKOTEOLOGI KOMUNITAS ADAT

KOMUNITAS ADAT	TRANSFORMASI CARA PIKIR (WORLDVIEW)	HABITUASI PRAKTIK NYATA	ADVOKASI & DAMPAK	LOKASI & TAHUN
Adat Ammatoa Kajang	Alam dianggap Borong Karama (hutan keramat) yang sakral, manusia hanya bagian kecil dari kosmos.	Larangan menebang hutan adat, penggunaan pakaian hitam sederhana, hidup selaras dengan alam.	Hutan Adat Kajang diakui pemerintah melalui SK KLHK (2016).	Bulukumba, Sulawesi Selatan – pengakuan hutan adat 2016.
Masyarakat Baduy	Hidup dalam harmoni dengan Buyut Sunda Wiwitan; menolak teknologi modern demi menjaga keseimbangan alam.	Sistem ladang huma tanpa pupuk kimia, larangan kendaraan bermotor di wilayah adat.	Menjadi simbol ekowisata berbasis adat, advokasi hak adat dalam UU Desa (2014).	Lebak, Banten – diakui sebagai Desa Adat 2017.
Adat Dayak Iban Sungai Utik	Alam sebagai "Ibu" yang memberi hidup; hutan adalah sumber identitas.	Pengelolaan hutan adat berbasis tembawang (hutan buah), larangan menebang sembarangan.	Menerima Equator Prize UNDP (2019) untuk pelestarian hutan.	Kapuas Hulu, Kalimantan Barat – 9.500 ha hutan adat dilindungi.
Adat Marind Anim	Alam sebagai saudara kosmik, roh leluhur tinggal di hutan & rawa.	Praktik berburu sagu & ikan berkelanjutan, ritual adat menjaga rawa-rawa.	Advokasi menolak proyek food estate di Merauke.	Papua Selatan – aksi advokasi 2020–2022.
Komunitas Sasi (Maluku)	Prinsip "sasi" = larangan mengambil hasil laut/hutan pada periode tertentu demi regenerasi.	Menutup laut/desa selama bulan tertentu, lalu dibuka bersama setelah panen lestari.	Diakui sebagai praktik community-based natural resource management.	Maluku Tengah, Kei, Seram,praktik abad ke-16, revitalisasi 2005.
Adat Bali (Subak)	Filosofi Tri Hita Karana: harmoni dengan Tuhan, manusia, dan alam.	Sistem Subak (irigasi kolektif) mengatur pembagian air secara adil.	Diakui UNESCO sebagai Warisan Dunia (2012).	Bali – Subak di Tabanan, Gianyar.
Adat Minangkabau	Alam takambang jadi guru (alam sebagai guru hidup).	Pengelolaan sawah & hutan ulayat berbasis musyawarah.	Perda Nagari melindungi tanah ulayat dari alih fungsi.	Sumbar, revitalisasi pasca-Reformasi (1999).

Sumber: Diolah dari berbagai sumber rujukan, dan proses pendampingan bersama

reproduksi ikan tidak terganggu, sehingga stok ikan dapat pulih secara alami. Ini adalah bentuk implementasi konsep zona larang ambil (no-take zones) yang diatur oleh hukum adat dan sanksi sosial, sebuah mekanisme yang sangat efektif dan berbiaya rendah.

Manifestasi paling sempurna dari kearifan ekologis ini ada juga sistem irigasi persawahan tradisional Subak di Bali, yang diakui sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO. Dalam sistem ini, air dipandang sebagai anugerah

Tuhan yang dikelola secara komunal dan adil, diikat oleh serangkaian ritual di pura-pura air yang memperkuat kohesi sosial dan rasa syukur, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian.

Temuan tersebut memperkaya gambaran ekoteologi di Indonesia. Kearifan lokal dalam komunitas adat bukan hanya pelengkap, melainkan salah satu basis penting ekoteologi yang hidup. Mereka menegaskan bahwa agama, tradisi, dan menjaga lingkungan dapat berjalan seiring, bahkan sebelum wacana perubahan iklim menjadi diskursus global.

Tampak jelas bahwa komunitas adat di Indonesia adalah penjaga kearifan ekologis yang hidup. Relasi mereka dengan alam bukan sekadar praktik ekonomi, melainkan bagian dari iman, kosmologi, dan identitas budaya. Kearifan ini memperlihatkan bahwa ekoteologi tidak hanya lahir dari teks keagamaan, tetapi juga dari praktik komunitas yang secara turun-temurun menjaga harmoni dengan lingkungan.

4. Kepeloporan Perempuan dan Paradigma Ekofeminisme

Sebagai bagian dari pemenuhan prinsip GEDSI, memotret gerakan perempuan dalam ekoteologi juga perlu dilakukan. Perempuan di berbagai komunitas keagamaan di Indonesia menempati posisi unik dalam praktik ekoteologi. Mereka menjadi pihak yang paling terdampak oleh krisis ekologis—menghadapi kekeringan, banjir, dan rusaknya sumber daya alam—namun sekaligus tampil sebagai aktor sentral yang mentransformasikan ruang domestik dan komunal menjadi arena spiritual dan ekologis. Dari pengalaman sehari-hari mengelola rumah tangga, perempuan mengembangkan kesadaran ekologis yang berakar pada nilai agama dan kearifan lokal, menjadikan perawatan alam bukan sekadar tugas moral, tetapi bentuk ibadah kolektif yang melindungi kehidupan dan generasi mendatang.

Berakar pada prinsip ekofeminisme, gerakan perempuan menghadirkan wajah keberagamaan yang menebus penderitaan ekologis dengan aksi nyata. Mereka menginisiasi bank sampah, pertanian organik, koperasi hijau, dan ritual religius ramah lingkungan di berbagai komunitas keagamaan. Melalui spiritualitas yang memelihara dan solidaritas sosial, perempuan mengubah kerentanan ekologis menjadi kekuatan transformasi, menjadikan iman sebagai energi kreatif untuk membangun ketahanan sosial-ekologis dan memperjuangkan keadilan bagi bumi yang terluka.

Pada tingkat literasi dan dakwah ekologis, perempuan berperan sebagai penggerak utama internalisasi nilai-nilai lingkungan melalui jaringan sosial dan religius yang mengakar di komunitas. Dalam konteks Islam Indonesia, ulama perempuan memegang peran strategis, tidak hanya sebagai guru agama, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membentuk identitas kolektif perempuan dalam menjaga bumi. Di Aceh, kolaborasi antara Yayasan HAkA (Hutan Alam dan Lingkungan Aceh) dan jejaring ulama perempuan Teungku Inong memperlihatkan bagaimana otoritas religius perempuan dapat memperluas gagasan ekoteologi ke tingkat lokal. Keberhasilan gerakan lingkungan ini, sebagaimana ditunjukkan HAkA, sering lahir ketika ruang peningkatan kapasitas diri perempuan dibuka tanpa mengancam tatanan sosial-politik yang dominan (Clark, 2012; Wickham, 2012).

Berdasarkan data HAkA (2024), lebih dari 300 Teungku Inong dari 14 kabupaten telah mengikuti pelatihan dakwah lingkungan yang mencakup isu deforestasi, perlindungan satwa liar, dan pengelolaan sampah rumah

tangga. Modul dakwah hasil kolaborasi ini kini digunakan dalam ceramah dan khotbah, mengintegrasikan pesan ekologis ke dalam pengajian desa dan majelis taklim. Observasi lapangan menunjukkan bahwa konsep amal jariyah kini dimaknai tidak hanya sebagai pembangunan masjid, tetapi juga sebagai tindakan menanam pohon dan menjaga hutan.

Dakwah lingkungan menyatu dengan tradisi Islam Aceh yang menekankan keseimbangan antara iman dan alam, sehingga perempuan bukan sekadar penyampai pesan, tetapi subjek aktif yang mengubah kesalehan menjadi tindakan ekologis. Melalui kepemimpinan Teungku Inong, spiritualitas diolah menjadi kekuatan sosial: gerakan ekoteologi tumbuh dari dapur, mushalla, dan ruang pengajian, menjadikan iman sebagai energi kolektif untuk menjaga bumi dan keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Dalam ranah advokasi struktural, sosok seperti Mama Aleta Baun dari Mollo, Nusa Tenggara Timur, memperlihatkan bagaimana perlawanan perempuan dapat dilakukan melalui protes budaya. Dengan duduk menenun sebagai simbol perlawanan damai, ia berhasil menghentikan tambang marmer di tanah adatnya dan kemudian mendirikan Mama Aleta Fund untuk memperkuat gerakan perempuan adat.

Di Sumatera Utara, Delima Silalahi memimpin perjuangan masyarakat Batak Toba dalam merebut kembali hutan adat dari perusahaan pulp, membawa advokasi lokal ke ruang nasional dan internasional. Gerakan perempuan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah, juga memperlihatkan militansi ekofeminisme melalui aksi “semen kaki” menolak tambang semen yang merusak kawasan karst sebagai sumber air dan kehidupan.

Dimensi habituasi dan pemberdayaan ekonomi juga terlihat jelas dalam gerakan perempuan. KWT Mekar Wangi di Yogyakarta mengembangkan urban farming, hidroponik, dan green farming yang dipasarkan melalui jejaring digital, sementara program Proklim LDII DIY mendorong perempuan menghasilkan produk ramah lingkungan seperti kain eco-print, eco-enzim, dan komposter rumah tangga. Perempuan Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan menenun kain tarung tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai praktik ekologis karena tanaman tarung berfungsi mencegah erosi dan banjir. Aktivitas menenun yang menjadi kewajiban budaya sekaligus menopang ekonomi lokal memperlihatkan keterpaduan antara tradisi, ekologi, dan pemberdayaan perempuan.

Gerakan serupa terlihat dalam LLHPB ‘Aisyiyah, lembaga yang berdiri sejak 2015 sebagai sayap lingkungan Muhammadiyah. Program Ngaji Lingkungan melahirkan ratusan mubaligah lingkungan yang berdakwah tentang ekologi berbasis al-Qur’an dan hadis. Di Yogyakarta, LLHPB mengembangkan program Green School di TK Aisyiyah, Bustanul Athfal yang mengajarkan anak-anak mengurangi plastik, membuat eco-brick, hingga mengenali tanaman obat melalui aplikasi Motoga.

Kehadiran LLHPB memperluas ruang gerak perempuan Muslim. Dengan cabang di 34 provinsi dan bahkan di luar negeri, Green Aisyiyah menegaskan bahwa dakwah ekologi bisa menjadi strategi dakwah yang berakar pada teks-teks Islam. Program ProKlim LDII DIY, misalnya, melatih perempuan menghasilkan produk ramah lingkungan seperti kain eco-print yang berasal dari daun-daunan. Produk tersebut bernilai ekonomi tinggi, bahkan telah dipasarkan di tingkat internasional.

Di tingkat lokal, Kelompok Wanita Tani di Dusun Sangurejo memperkuat inisiatif ini melalui kegiatan penghijauan, pembuatan eco-enzim, komposter, hingga biopori di jalan kampung. Semangat kolektif inilah yang menjadikan desa sebagai ruang ekoteologi publik. Di Sulawesi Selatan, Komunitas Muslim Adat Ammatoa Kajang menegaskan perempuan menggerakkan ekoteologi dari rumah ke ruang publik. Menenun bukan sekadar pekerjaan, melainkan kewajiban budaya dan syarat untuk menikah.

Di tingkat nasional dan global, sejumlah tokoh perempuan Indonesia memainkan peran penting dalam advokasi lingkungan. Aktivis Muhammadiyah seperti Hening Parlan mendorong berdirinya Green Faith Indonesia. Greenpeace MENA melahirkan jaringan Ummah for Earth di Indonesia. Pertimbangan utama hadirnya organisasi internasional ini adalah posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dengan kekayaan hayati ketiga di dunia, menjadikannya kunci dalam kampanye global penyelamatan lingkungan.

Swietenia Puspa Lestari mendirikan Divers Clean Action untuk melawan polusi plastik di laut. Sementara Yuyun Ismawati melalui BALIFOKUS menginisiasi pengelolaan sampah dan sanitasi komunitas hingga diakui dunia internasional. Figur-figur seperti Khalisah Walid dan Maria Christi Ulinova memperluas advokasi di Greenpeace Indonesia, dan Erna Witoelar dikenang sebagai pendiri WALHI yang menjembatani isu lingkungan, pangan, dan pembangunan berkelanjutan lintas generasi.

TABEL 5. PRAKTIK BAIK EKOTEOLOGI GERAKAN PEREMPUAN

NAMA	PERAN / AKTIVITAS	PRAKTIK NYATA / MEDIA SOSIAL / JEJARING YANG TERTERA
Mama Aleta Baun	Aktivis adat dari Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur	Ia memimpin aksi damai melawan tambang marmer di wilayah adatnya dengan duduk berhari-hari sambil menenun kain tradisional sebagai protes. Setelah itu mendirikan Mama Aleta Fund yang membantu perempuan dan komunitas adat mempertahankan wilayah dan sumber daya alam mereka. https://www.metrotvnews.com
Swietenia Puspa Lestari (Tenia)	Pendiri Divers Clean Action (DCA), advokat untuk pengurangan sampah laut	Aktif di gerakan pemungutan sampah laut, kampanye masyarakat pesisir, dan pendidikan tentang plastik sekali pakai. Diangkat di artikel “Rayakan Hari Hutan Indonesia” sebagai salah satu tokoh perempuan cinta lingkungan. Beautynesia+1
Suswaningsih	Perempuan lokal / petani / penggerak konservasi lahan dan pangan di Gunung Kidul	Melakukan rehabilitasi lahan kritis, pemanfaatan lahan nonproduktif, pengembangan pangan lokal, dan pemberdayaan melalui kelompok wanita tani. Artikelnya menyebut bagaimana ia menggunakan lahan tidak terpakai untuk tanaman pangan dan kayu-kayuan. Indonesia.go.id+2Beautynesia+2

KWT Mekar Wangi / Ketua Rita Ayuwan-dari**	Kelompok Wanita Tani yang menggabungkan aksi lingkungan dengan kewira-usahaan lokal	Memanfaatkan lahan pekarangan untuk budidaya jahe merah, Green Farming, Urban Farming, teknik hidroponik; juga menggunakan media sosial & marketplace untuk pemasaran. Contoh: omset meningkat dari modal kecil; jejaring melalui webinar dan media digital. Dunia Energi
Yuyun Ismawati	Aktivis lingkungan / pengelolaan sampah dan sanitasi berbasis komunitas	Mendirikan BALIFOKUS Foundation; proyek lokal di Bali yang memperkenalkan pemilahan sampah dan sanitasi komunitas. ptali.org
Delima Silalahi	Aktvis hak-hak masyarakat adat / hutan adat Sumatera Utara	Memimpin upaya mengembalikan hutan adat yang dirampas perusahaan pulp, memperkuat hak adat masyarakat Batak Toba; juga advokasi lintas nasional dan internasional. EcoNusa+1
Khalisah Walid ("Alin")	Islam	Aktivis Green Islam — pernah menjadi relawan di WALHI dan sekarang bekerja di Greenpeace Indonesia sebagai Public Engagement and Action Manager serta pemimpin Political Working Group. Alin aktif memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam keputusan kebijakan lingkun-gan. PPIM UIN Jakarta
Maria Christi Ulinova Siahaan ("Kiki")	Kiki (Latar Kristen / Organisasi sekuler)	Koordinator penggalangan dana di Greenpeace Indonesia. Memiliki latar pendidikan Manajemen Sumber Daya Perikanan. Aktif dalam kampanye lingkungan di media publikasi organisasi.
Erna Witoelar	Umum — dikenal lintas agama	Salah satu aktivis lingkungan paling dikenal di Indonesia, pendiri WALHI. Digunakan sebagai contoh kepeloporan perempuan dalam isu lingkungan, pembangunan, dan pangan. PWMU.CO
Agustinus Rumansara	—	Disebut dalam konteks tokoh perempuan dari Indonesia Timur yang aktif dalam lingkungan, pembangunan, dan pangan. PWMU.CO
Perempuan Muda IPPNU – LPBI PBNU	Islam / Nahdlatul Ulama	Perempuan muda (santri) terlibat dalam gerakan lingkungan nyata, misalnya di Pulau Tidung dalam "Eco Dialogue Forum" untuk isu perubahan iklim dan bencana.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber dan pendampingan aksi bersama

Keterlibatan perempuan ini membuat gerakan ekoteologi di Indonesia juga dekat dengan ekofeminisme, yang memandang bumi seperti ibu yang memberi kehidupan. Dalam konteks ini, perempuan yang paling dekat dengan urusan rumah tangga, pangan, dan sumber daya alam juga menjadi pihak yang paling terdampak sekaligus paling aktif menjaga lingkungan.

Dari Aceh hingga Sulawesi Selatan, dari Yogyakarta hingga Jakarta, perempuan menenun narasi baru tentang agama dan lingkungan. Mereka mempraktikkan ekoteologi bukan hanya di ruang privat, tetapi juga mengartikulasikannya di ruang publik melalui dakwah, tenun, ecoprint,

hingga sekolah hijau. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan mengintegrasikan spiritualitas, budaya lokal, dan kepemimpinan sosial. Karena itu, perempuan bukan sekadar pengikut, melainkan penggerak utama yang menyalakan api ekoteologi dari rumah menuju ruang publik.

6. Inovasi Akar Rumput dan Kelembagaan Sosial Lokal

Di luar struktur besar negara dan ormas, lanskap ekoteologi Indonesia diperkaya oleh berbagai inovasi yang lahir dari bawah. Inisiatif-inisiatif ini sering kali berhasil karena kemampuannya secara cerdas memadukan tujuan lingkungan dengan manfaat sosial dan ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat, serta menciptakan sebuah siklus keberlanjutan yang saling menguatkan.

Bank Sampah Emak.ID (banksampahemak.id) di Bandar Lampung adalah contoh model ini. Kegiatannya dikelola dengan sistem pemberdayaan masyarakat. Bank sampah ini tidak hanya mengatasi masalah sampah, tetapi juga meningkatkan ekonomi komunitas dan mengubah limbah menjadi aset. Di Yogyakarta, "Kampung Hijau Gambiran" menjadi studi kasus model collaborative governance, di mana warga, pemerintah, LSM, akademisi, dan pihak swasta bekerja sama mentransformasi lingkungan mereka.

Kemitraan antara akademisi dan komunitas juga terbukti efektif, seperti pelatihan pembuatan suvenir dari ecobrick yang diselenggarakan oleh Agrianita IPB University untuk ibu-ibu warga sekitar, yang memberikan keterampilan baru sekaligus solusi atas sampah plastik. Kisah Tuan Guru Marwan Hakim di Lombok Timur menggambarkan bagaimana seorang inovator lokal dapat menjadi poros bagi perubahan multidimensional. Berangkat dari kepedulian terhadap pendidikan, ia mendirikan sekolah bagi anak-anak di desanya.

Namun, perjuangannya tidak berhenti di situ. Ia juga aktif dalam isu lingkungan melalui gerakan penghijauan dan terlibat dalam upaya menghadirkan akses air bersih bagi warganya. Dengan memadukan perjuangan untuk pendidikan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial, Tuan Guru Marwan menunjukkan solusi yang paling tangguh adalah yang bersifat holistik dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Kiprahnya ini bahkan mendapat pengakuan melalui penghargaan SATU Indonesia Awards.

7. Organisasi Non-Pemerintah (NGO)

Perkembangan ekoteologi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi lembaga-lembaga non-pemerintah yang berperan sebagai penghubung antara gagasan normatif agama dan praktik kebijakan berbasis bukti. Dukungan dari institusi-institusi ini penting karena memastikan bahwa inisiatif ekoteologi tidak berhenti pada level wacana moral, melainkan memperoleh landasan empiris yang dapat memperkuat advokasi kebijakan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Aktivitas ekoteologi di Indonesia juga terkoneksi dengan jaringan internasional. NU dan Muhammadiyah, misalnya, memanfaatkan hubungan mereka dengan lembaga global seperti USAID, AUSAID, Uni Eropa, WWF, dan Conservation International untuk mengarusutamakan isu lingkungan berbasis Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) terlibat dalam Faith Pavilion di COP28 serta berkolaborasi dengan PBB dalam Interfaith for Earth Initiative untuk

TABEL 6. AKTIVITAS EKOTEOLOGI OLEH NGO DI INDONESIA

NGO / YAYASAN	TAHUN, LOKASI	FOKUS UTAMA (PENDIDIKAN – PEMBERDAYAAN – ADVOKASI)
WALHI	1980, Jakarta	Pendidikan ekologi kritis berbasis komunitas; pendampingan masyarakat adat dan petani; advokasi hukum dan kebijakan pro-lingkungan.
Greenpeace Indonesia	1999, Jakarta	Kampanye kreatif dan aksi damai; pemberdayaan komunitas pesisir; advokasi energi bersih dan zero deforestation.
WWF Indonesia	1962, Bogor	Edukasi publik tentang biodiversitas; ekowisata dan rehabilitasi mangrove; kerja sama pemerintah–swasta untuk kawasan lindung.
KEHATI	1994, Jakarta	Literasi biodiversitas; hibah pertanian organik dan konservasi lokal; advokasi kebijakan keanekaragaman hayati.
PEKA Indonesia	2000, Bogor	Riset dan pendidikan konservasi; program pendidikan lingkungan di sekolah; advokasi perlindungan satwa dan hutan.
YKAN	2014, Jakarta	Pendekatan ilmiah dalam konservasi; pengelolaan laut dan hutan bersama masyarakat; advokasi kebijakan berbasis sains.
YAPEKA	2000, Bogor	Pendidikan konservasi alam; pemberdayaan komunitas adat; advokasi partisipasi masyarakat dalam perlindungan ekosistem.
YKL	1996, Makassar	Literasi ekologi laut dan pesisir; teknologi ramah lingkungan untuk nelayan; advokasi pengelolaan laut berbasis masyarakat.
PILI	1995, Bogor	Pusat informasi lingkungan; pelatihan riset konservasi; advokasi kebijakan berbasis data.
YAD Arsari	2005, Jakarta	Pendidikan publik tentang satwa langka; rehabilitasi habitat; advokasi perlindungan satwa endemik.
Burung Indonesia	2002, Bogor	Edukasi pentingnya burung dan ekosistem; konservasi habitat; advokasi kawasan konservasi berbasis burung.
Profauna Indonesia	1994, Malang	Kampanye anti-perdagangan satwa; relawan konservasi; advokasi hukum satwa liar.
Ecosystem Impact Foundation	2015, Maluku	Literasi ekologi laut berbasis komunitas; konservasi penyu dan karang; advokasi perlindungan laut.
Rare Indonesia	2000-an	Kampanye perubahan perilaku konservasi; perikanan berkelanjutan; advokasi kebijakan perikanan ramah lingkungan.
Samdhana Institute	2003, Bogor	Literasi hak adat dan lingkungan; dukungan pengelolaan SDA adat; advokasi hak tanah ulayat.
Forest Watch Indonesia	1997, Bogor	Pendidikan transparansi data kehutanan; monitoring hutan komunitas; advokasi kebijakan kehutanan terbuka.
Hutan Kita Institute (HaKI)	2015, Palembang	Edukasi hutan lestari; kelola hutan berbasis rakyat; advokasi reformasi tata kelola hutan.
Reef Check Indonesia	2005, Bali	Edukasi kesehatan terumbu karang; restorasi karang masyarakat; advokasi perlindungan laut tropis.
Wetlands International Indonesia	1994, Bogor	Literasi pentingnya lahan basah; restorasi mangrove dan gambut; advokasi kebijakan lahan basah.
Eco Camp	1990-an, Bandung	Pendidikan kesadaran ekologis lintas agama; pelatihan kepemimpinan ekologis; advokasi partisipasi publik dalam konservasi.
HAkA	2000-an, Aceh	Perlindungan dan pemulihan Hutan Leuser; pendampingan komunitas adat; advokasi kawasan lindung.
Bali Kembali Berdaya	2010-an, Bali	Literasi keberlanjutan dan kebencanaan; urban permaculture; advokasi kebijakan lingkungan Bali.
Yayasan Harapan Sambi-wayang	2000-an, Grobogan	Literasi keberlanjutan lokal; pertanian organik; advokasi hak petani dan tanah ulayat.
Oemah Planet	2010-an, Jawa Tengah	Edukasi pertanian terpadu; praktik pertanian biodinamis; advokasi pertanian berkelanjutan.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber dan pendampingan aksi bersama

melindungi hutan tropis. PPI UNAS melalui Fachruddin Mangunjaya bekerja sama dengan WWF dalam riset umat Islam dan ekologi. Aktivitas ini belum ditambah dengan program-program yang dilakukan oleh NGO lainnya, baik pada ranah implementing partner lembaga donor ataupun atas inisiatif dan kemandiriannya sendiri.

Gerakan pengelolaan sampah di pesantren berangkat dari perluasan makna thaharah. Jika sebelumnya kebersihan lebih dipahami sebatas urusan fisik dan ritual, seperti sahnya wudhu, kesucian pakaian, serta halaman asrama yang bersih, maka eko-pesantren menggeser perspektif tersebut ke arah tanggung jawab ekologis. Sampah tidak lagi diperlakukan sebagai sesuatu yang "cukup disingkirkan dari pandangan", tetapi sebagai bagian dari siklus kehidupan yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Prinsip iman dan kebersihan bertemu dengan kesadaran ekologis bahwa bumi adalah ruang hidup bersama yang wajib dijaga.

Pergeseran paradigma ini diperkuat oleh ajaran Islam tentang manusia sebagai khalifah fil ardh dan kaidah fikih ad-dlarar yuzal (segala kemudaratan harus dihilangkan). Di tangan para kiai, fikih tidak hanya dibaca sebagai aturan ibadah individu, tetapi panduan etika lingkungan. Sosok seperti KH Sarmidi Husna bersama jejaring P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) mendorong lahirnya kurikulum Fiqh al-Bi'ah di berbagai pondok, sehingga kerja bakti, daur ulang, pengomposan, dan edukasi ekologis bukan sebatas kebiasaan, tetapi amal ibadah bernilai maslahat.

Dampaknya kini terlihat nyata di banyak pesantren, pengelolaan sampah jadi bagian dari pendidikan iman, karakter, dan tanggung jawab sosial. Pondok seperti Al Anwar 2 Sarang, Nurul Falah Serang, Al Fattah Lamongan, Nur Iman Mlangi, Al Ittihad Semarang, API Tegalrejo, Al Muhajirin Purwakarta, Al Muhajirin 3 Jombang, Lirboyo Kediri, dan Buntet Cirebon mengintegrasikan praktik ekologis ke dalam pembelajaran dan budaya harian santri. Inisiatif ini turut diperkuat oleh dukungan P3M dan mitra seperti CCEP Indonesia, sehingga pengelolaan sampah naik derajatnya dari "buang lalu lupa" menjadi gerakan ekologis berbasis spiritualitas. Ekoteologi, dengan demikian, hadir bukan sebagai wacana, tetapi sebagai laku hidup yang meneguhkan peran pesantren sebagai penjaga bumi dan peradaban.

8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai Katalisator Pengetahuan

Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat memiliki peran strategis sebagai katalisator pengetahuan yang menghubungkan hasil riset akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat. Peran ini tidak hanya menghasilkan teori, melainkan juga mentransformasikannya menjadi praktik yang kontekstual dan aplikatif. Dalam isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, konservasi air, pengelolaan sampah, energi terbarukan, dan pelestarian ekosistem, lembaga-lembaga ini menghadirkan kerangka solusi yang relevan sekaligus memperkuat fondasi kebijakan publik.

Transformasi pengetahuan yang dilakukan menjadikan hasil riset lebih mudah diadopsi, sehingga mendorong terciptanya keterhubungan yang erat antara sains, komunitas, dan pengambil keputusan. Lebih jauh, peran habituasi dan advokasi memastikan bahwa pengetahuan ilmiah tidak berhenti pada tataran eksperimental, melainkan menjadi bagian dari kebiasaan kolektif

TABEL 7. AKTIVITAS EKOTEOLOGI LEMBAGA PENELITIAN

RANAH UTAMA	INSTITUSI / KAMPUS / PESANTREN	KEGIATAN / PROYEK	FOKUS / TOPIK	KETERANGAN / DIMENSI ETNOGRAFIS
Literasi Ekologis	PPI UNAS (Universitas Nasional, Jakarta)	Program Dai Konservasi	Konservasi satwa liar & hutan	Melatih 354 dai untuk dakwah konservasi. Literasi ekologis dibangun melalui tafsir ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan.
	PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Riset Sikap Muslim & Lingkungan	Perilaku ekologis berbasis agama	Memetakan 142 komunitas Islam-lingkungan; hasil riset digunakan untuk advokasi kebijakan dan penguatan pendidikan ekoteologi.
	Pesantren Nurul Huda (Lampung Timur)	Eco-Pesantren	Pengelolaan sampah & konservasi	Santri mempraktikkan pertanian organik dan manajemen sampah sebagai ekspresi kesalehan ekologis.
Habituasi dan Inovasi Sistem-Prasarana	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Green Campus Program	Pengelolaan sampah, ruang hijau, energi	Program 3R dan efisiensi energi menjadikan ekologi bagian dari habitus spiritual kampus.
	UIN Antasari Banjarmasin	Prodi Ilmu Lingkungan + Green Campus	Pendidikan lingkungan & pengelolaan sampah	Integrasi antara kurikulum akademik dan praktik ekologis di lingkungan kampus.
	UIN Raden Intan Lampung	Model Pembangunan Berkelanjutan	Energi terbarukan, air, sampah	Penerapan energi bersih dan konservasi air sebagai bagian dari etika keislaman.
	IAIN Palopo	Smart & Green Campus	Lingkungan ramah plastik	Pengembangan kampus digital hijau yang mempromosikan perilaku ekologis modern.
	UMSU (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)	Kolaborasi dengan Jepang	Energi terbarukan & mitigasi iklim	Kolaborasi internasional yang menanamkan semangat jihad ilmiah dalam inovasi energi bersih.
	Universitas Katolik Musi Charitas	PLTS Kampus	Energi terbarukan	Penggunaan energi surya dimaknai sebagai praktik spiritual menjaga ciptaan Tuhan.

Advokasi Lingkungan dan PMD	PPIM UIN Jakarta	Advokasi hasil riset komunitas	Kebijakan publik lingkungan	Menyusun basis data ekologis untuk kebijakan berbasis iman dan keberlanjutan.
	Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW)	KKN Inklusif Lingkungan	Pengelolaan sampah & inklusi disabilitas	Mengintegrasikan hak disabilitas dalam advokasi pengelolaan sampah komunitas.
	IAKN Kupang	Aksi Penanaman Pohon	Eko-teologi & penghijauan	Penanaman pohon sebagai ritus ekoteologis dan simbol iman ekologis.
	ITB Bandung	Pengabdian RW 06 Cikutra	Pengelolaan sampah komunitas	Advokasi ekologis berbasis warga: kompos, eco-enzyme, dan urban farming.
	IPB – PPLH	Riset Konservasi SDA	Konservasi & monitoring ekologi	Menghubungkan riset ekologi dengan kebijakan konservasi nasional.
	UISI (Universitas Internasional Semen Indonesia)	Pengolahan Sampah Jadi Energi (RDF)	Energi alternatif dari sampah	Advokasi industri hijau: mengubah sampah kota menjadi bahan bakar alternatif.
	Lembaga Riset Ekologi (Lemrisko)	Edukasi Konservasi	Rehabilitasi lahan kritis & mangrove	Mendorong advokasi masyarakat pesisir untuk rehabilitasi ekosistem berbasis riset.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber dan pendampingan aksi bersama

serta dasar perumusan kebijakan. Habituasi memungkinkan hasil penelitian terinternalisasi dalam praktik sosial sehari-hari, dan advokasi memperkuat posisi riset dalam proses pengambilan keputusan publik.

Beberapa lembaga penelitian berperan kunci dalam perkembangan ekoteologi. Salah satu pionir dalam bidang ini adalah Pusat Pengajian Islam (PPI) Universitas Nasional (UNAS) yang dipimpin oleh Fachruddin Mangunjaya, seorang akademisi dengan latar belakang aktivisme lingkungan. PPI UNAS berdiri tahun 1985. Sejak Fachruddin Mangunjaya memimpin PPI UNAS, ia telah mengupayakan pelatihan konservasi

TABEL 8. PETA KOMPREHENSIF AKTOR, INISIATIF, DAN MODEL EKOTEOLOGI DI INDONESIA

KATEGORI AKTOR	CONTOH AKTOR KUNCI	INISIATIF/ PROGRAM UNGGULAN	MODEL EKOTEOLOGI DOMINAN	SKALA JEJARING
Negara & Institusi Publik	Kemenag, KLHK, BWI, BAZNAS, Masjid Istiqlal, Kemendikbudristek	Asta Protas, KMA 442 (Eco-Pesantren), Green Waqf, ProKlim, Green Mosque, Dokumentasi Kearifan Lokal	Pilar Visi: Keadilan Antargenerasi & Integrasi Pengetahuan	Nasional, Internasional

Organisasi Keagamaan	NU, MuhammadiyahMUI, LDII, PGI, KAJ	LPBI, MLH, LLHPB 'Aisyiyah, Eco-Bhinneka, Fatwa Lingkungan, Gerakan "Gereja Hijau", Laudato Si' Movement	Pilar Fondasi: Etika-Spiritual; Pilar Visi: Keadilan Antargenerasi	Nasional, Lokal, Internasional
Komunitas Adat	Ammatoa Kajang, Sangaji Ternate, Komunitas Sasi, Masyarakat Baduy, Komunitas Lubuk Larangan	Penjagaan Hutan Adat, Ritual Sigofe Ake Gale, Tradisi Sasi, Sistem Lubuk Larangan	Pilar Fondasi: Etika-Spiritual & Kearifan Lokal (Lived Ecotheology)	Lokal
Kepeloporan Perempuan	Teungku Inong, LLHPB 'Aisyiyah, Kelompok Wanita Tani	Dakwah Ekologi, Ngaji Alam, Green School, Bank Sam pah, Ecoprint	Pilar Aksi: Kolaborasi Partisipatif & Pemberdayaan (Ekofeminism)	Lokal, Nasional
Inovasi Akar Rumput	Bank Sampah Emak.ID, Kampung Hijau Gambiran, Tuan Guru Marwan Hakim	Pemberdayaan Ekonomi Sirkular, Collaborative Governance, Integrasi Pendidikan-Lingkungan-Kesejahteraan	Pilar Aksi: Kolaborasi Partisipatif & Pemberdayaan	Lokal
Masyarakat Sipil & Penelitian	PPI UNAS, PPIM UIN, HAkA, MOSAIC, FNKSDA	Dai Konservasi, Riset Kebijakan, Advokasi, Bengkel Hijrah Iklim, Al Mizan: A Covenant of the Earth	Pilar Aksi & Pilar Visi: Integrasi Pengetahuan & Advokasi	Nasional, Internasional, Lokal

Sumber: Data olahan dari berbagai sumber

keanekaragaman hayati di beberapa wilayah di Indonesia dengan program "Dai Konservasi". Pelatihan tersebut dimulai sejak 2006 hingga kini. Sudah 354 orang dai yang telah mengikuti pelatihan tersebut. Para dai ini sengaja dilatih oleh PPI UNAS yang nantinya diharapkan di masyarakat dapat mendakwahkan pentingnya perlindungan satwa liar di Indonesia (Testriono, dkk, 2024).

Program Dai Konservasi dirancang untuk merespons kelangkaan dan kepunahan satwa dilindungi akibat perburuan dan perdagangan satwa liar (wildlife trafficking). PPI UNAS turut aktif dalam merumuskan manifesto global Islam dan lingkungan: Al-Mizan: A Covenant for the Earth, yang didukung Islamic World Educational, Scientific, and Cultural Organization (ICESCO) dan United Nations Environment Programme (UNEP).

Selain PPI UNAS, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta turut memainkan peran memperkuat ekoteologi dengan pendekatan riset kebijakan yang berorientasi pada pemetaan sikap dan perilaku masyarakat Muslim terkait isu lingkungan. Melalui serangkaian survei dan penelitian kualitatif, PPIM UIN menunjukkan bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat mendorong kesadaran ekologis sekaligus memetakan

tantangan yang dihadapi oleh organisasi atau kelompok yang bergerak di isu agama dan lingkungan di Indonesia.

Kegiatan PPIM juga meliputi penguatan pesantren ramah lingkungan, pendampingan inovasi berbasis komunitas di tingkat akar rumput, serta penyelenggaraan konferensi internasional tentang agama dan lingkungan yang mempertemukan sarjana, pembuat kebijakan, dan aktivis lingkungan.

Keterlibatan lembaga penelitian serta pengabdian masyarakat ini menegaskan bahwa ekoteologi tidak hanya menjadi praktik kultural atau inisiatif moral, tetapi juga bagian dari strategi ilmiah untuk membangun kebijakan berbasis bukti. Dengan mengintegrasikan ketiga prinsip—transformasi pengetahuan, habituasi, dan advokasi—berfungsi sebagai motor perubahan yang menghubungkan pengetahuan dengan tindakan, membentuk perilaku baru yang berkelanjutan, serta memperjuangkan tata kelola lingkungan yang adil dan berpihak pada generasi mendatang.

Berdasarkan pemetaan para aktor, jaringan dan model gerakan ekoteologi di atas, dapatlah diidentifikasi relasinya dalam bentuk tabel (tabel 9), sebagai berikut:

C. Ekoteologi dalam Konteks Global

Untuk memahami sepenuhnya kekhasan dan potensi gerakan ekoteologi, penting untuk menempatkannya dalam dialog dengan gerakan serupa di belahan dunia lain. Perbandingan dengan Amerika Latin, Filipina, dan Tiongkok dapat memberikan lensa kritis mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan arah masa depan gerakan di Indonesia.

1. Teologi Pembebasan: Dialog Keadilan Agraria dengan Amerika Latin

Teologi Pembebasan yang lahir di Amerika Latin pada 1960-an menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk menghubungkan iman dengan perjuangan melawan penindasan struktural. Dengan "pilihan preferensial bagi kaum miskin" sebagai intinya, teologi ini menganalisis mekanisme sosial-ekonomi yang menciptakan kemiskinan dan menyerukan aksi transformatif.

Pada 1980-an, para teolog seperti Leonardo Boff dari Brasil menyadari logika yang sama mengeksploitasi kaum buruh juga merupakan logika yang mengeksploitasi bumi. Dari kesadaran ini, lahirlah ekoteologi pembebasan yang menegaskan "jeritan kaum miskin dan jeritan bumi adalah satu jeritan yang sama". Pendekatan ini yang diadopsi secara signifikan oleh Paus Fransiskus dalam Ensiklik Laudato Si' yang menekankan keadilan ekologis tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial.

Dialog dengan Amerika Latin memberikan refleksi penting bagi Indonesia. Meskipun gerakan ekoteologi arus utama di Indonesia cenderung bersifat kolaboratif dengan negara, tetapi sayap-sayap yang lebih kritis seperti Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) menunjukkan resonansi yang kuat dengan semangat teologi pembebasan. Mereka fokus pada isu-isu keadilan agraria dan konflik sumber daya alam yang seringkali menjadi akar dari kerusakan lingkungan.

Pengalaman Amerika Latin mengajarkan agar ekoteologi menjadi kekuatan transformatif sejati. Ia tidak boleh berhenti pada program penanaman pohon atau pengelolaan sampah semata. Ia harus berani membongkar dan menantang struktur kekuasaan ekonomi-politik yang melegitimasi perampasan tanah, deforestasi skala besar, serta eksploitasi yang mengorbankan masyarakat miskin dan adat.

2. Suara Generasi Muda dan Spiritualitas Ekologis Perspektif Filipina

Filipina, sebagai negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim menawarkan model ekoteologi yang berpusat pada kaum muda dan berfokus pada pembangunan harapan di tengah krisis. Gerakan di sana mengembangkan konsep Kalikhasang Balaan (Alam yang Sakral), sebuah pandangan ekoteologis yang khas bagi kaum muda Filipina. Pandangan ini berpusat pada Tuhan (theocentric), berorientasi pada kebaikan ciptaan, dan menekankan mandat penatalayanan Kristen (Christian stewardship). Pendidikan agama memainkan peran kunci dalam memfasilitasi refleksi teologis ini di kalangan siswa.

Lebih dari itu, gerakan di Filipina menunjukkan aksi lingkungan dapat menjadi sarana mengatasi "kecemasan ekologis" (eco-anxiety), dan membangun kesehatan mental di kalangan anak muda. Organisasi seperti Dulungan Youth yang didirikan oleh pemuda untuk konservasi satwa liar, menjadi ruang komunitas kaum muda yang memiliki kepedulian serupa dapat terhubung, saling mendukung, dan menemukan tujuan hidup. Aksi kolektif ini memberikan mereka perasaan berdaya (agency) dan optimisme. Mereka dapat membentuk masa depan yang lebih baik, sebuah penawar yang kuat terhadap keputusasaan.

Perspektif dari Filipina ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Meskipun program seperti eco-pesantren dan Green School telah melibatkan kaum muda, tetapi masih ada ruang mengembangkan pendekatan yang lebih dalam, yang tidak hanya menjadikan mereka sebagai objek program, namun juga sebagai subjek dan pemimpin spiritual. Gerakan ekoteologi di Indonesia perlu secara eksplisit menjawab kebutuhan psikologis dan spiritual generasi muda yang tumbuh di bawah bayang-bayang krisis iklim, serta memberdayakan mereka menyuarakan teologi mereka dan memimpin aksi dari bawah.

3. Dialektika Tradisi dan Negara: Pelajaran dari Resepsi Ekoteologi di Tiongkok

Pengalaman Tiongkok mengembangkan ekoteologi menawarkan kontras yang tajam dan mencerahkan. Di sana, wacana ekologi sangat dipengaruhi oleh narasi politik negara tentang "peradaban ekologis" (ecological civilization). Akibatnya, pengembangan ekoteologi Kristen harus menavigasi dan berdialog dengan ideologi negara yang dominan ini. Para akademisi dan teolog di Tiongkok berupaya mengembangkan "model sintetis" yang mengintegrasikan teologi Kristen dengan konsep filosofis Tiongkok tradisional tentang keharmonisan antara Langit, Alam, dan Manusia yang berakar pada Konfusianisme dan Taoisme.

Namun, hingga saat ini, ekoteologi yang sepenuhnya kontekstual dan berakar kuat di komunitas gereja lokal belum sepenuhnya muncul. Perbandingan dengan Tiongkok ini secara dramatis menyoroti salah satu kekuatan terbesar gerakan ekoteologi di Indonesia; yakni keberadaan masyarakat sipil yang kuat, otonom, dan beragam. Struktur

"polisentrisme kolaboratif" di Indonesia, di mana berbagai ormas keagamaan, komunitas adat, dan NGO dapat berinisiatif secara mandiri sambil tetap berkolaborasi dengan negara.

Hal ini memungkinkan artikulasi ekoteologi yang jauh lebih otentik, beragam, dan lahir dari bawah. Berbeda dengan di Tiongkok, wacana cenderung bersifat top-down dan akademis. Di Indonesia, ekoteologi adalah sebuah gerakan sosial yang hidup dan berdenyut di tingkat akar rumput. Pengalaman Tiongkok menjadi pengingat betapa krusialnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil bagi berkembangnya gerakan sosial berbasis iman yang otentik dan transformatif.

D. Anatomi Jejaring dan Kolaborasi Ekoteologi

Para aktor ekoteologi tidak beroperasi dalam ruang-ruang yang terisolasi. Kekuatan transformatif gerakan ini justru terletak pada jejaring dan kolaborasi dinamis yang mereka bangun. Jejaring ekoteologi di Indonesia terwujud dalam berbagai bentuk kolaborasi yang melintasi batas sektoral, geografis, dan bahkan keyakinan. Jejaring ini bersifat polisentris dan multi-skala, di mana aksi-aksi lokal sering kali terhubung dengan wacana, sumber daya, dan dukungan di tingkat nasional bahkan global.

Skala jejaring bervariasi dari hiperlokal (bank sampah di Sangurejo), nasional (jaringan NU dan Muhammadiyah), hingga internasional (keterlibatan dalam forum iklim global dan adopsi kerangka kerja PBB). Fenomena ini digambarkan sebagai "polisentrisme kolaboratif," di mana kekuasaan dan inisiatif tersebar di berbagai simpul yang otonom, namun saling bekerja sama. Struktur jaringannya tidak hierarkis, melainkan lebih menyerupai ekosistem yang kompleks dengan banyak pusat inisiatif yang saling terhubung. Bahkan memberikan gerakan itu resiliensi dan adaptabilitas yang tinggi. Artinya, kegagalan pada satu simpul tidak akan meruntuhkan keseluruhan jaringan. Berikut gambaran jejaring kolaborasi ekoteologi:

1. Jejaring Lintas Iman

Kolaborasi ini menjadi bukti krisis ekologi adalah isu universal yang mampu menyatukan berbagai keyakinan. Contohnya adalah gerakan Eco-Bhinneka yang diprakarsai Muhammadiyah, koalisi MOSAIC yang inklusif, serta berbagai aksi bersih sungai dan penanaman pohon bersama di tingkat lokal.

2. Jejaring Negara-Masyarakat

Sinergi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat menjadi kunci pelembagaan ekoteologi. Kolaborasi antara Kemenag dan PPIM UIN Jakarta dalam penyusunan KMA 442, antara KLHK dan PBNU dalam penyusunan buku panduan lingkungan, serta antara Kemenag, BWI, dan MOSAIC dalam gerakan Green Wakaf adalah contoh kebijakan publik dapat diperkaya oleh riset dan inisiatif masyarakat.

3. Jejaring Penelitian-Aksi

Lembaga penelitian tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga secara aktif membangun kapasitas dan menginformasikan advokasi. Keterlibatan PPI UNAS membantu perumusan fatwa MUI dan kolaborasi HAkA dengan Teungku Inong yang didasari pemahaman konteks lokal adalah contoh pengetahuan dan aksi saling menguatkan.

4. Jejaring Kolaborasi Multisektoral (Collaborative Governance)

Model ini menjadi cetak biru bagi solusi masalah lingkungan yang kompleks di tingkat lokal. Kasus "Kampung Hijau Gambiran" adalah contoh utamanya, di mana keberhasilan dicapai melalui kemitraan yang terkoordinasi antara warga, pemerintah lokal, LSM, akademisi, dan pihak swasta. Setiap pihak membawa sumber dayanya masing-masing—warga dengan modal sosialnya, pemerintah dengan legitimasinya, LSM dengan keahlian fasilitasi, dan akademisi dengan pengetahuannya untuk mencapai tujuan bersama.

5. Jejaring Internasional-Lokal

Gerakan ekoteologi di Indonesia terhubung dengan jaringan global melalui proses globalisasi yang efektif. Di satu sisi, wacana dan kerangka kerja global seperti ensiklik Laudato Si' atau program PBB (UNEP, FAO) "diterjemahkan" dan diadaptasi ke dalam konteks lokal melalui jaringan gereja dan program Kemenag. Di sisi lain, inisiatif lokal seperti Al Mizan: A Covenant of the Earth menjadi bagian dari upaya global, menunjukkan aliran pengaruh dua arah.

Dalam konteks para aktor yang berjejaring untuk aksi ekoteologi, dapat dinyatakan bahwa jejaring kolaboratif memiliki pengaruh ganda yang signifikan, baik secara instrumental dalam mengubah kebijakan maupun secara kognitif dalam mengubah cara pandang publik. Pertama, pengaruh instrumental yang terlihat dari advokasi berbasis bukti dan lobi moral dapat secara efektif mengarahkan kebijakan publik. Riset yang dilakukan PPIM UIN Jakarta tidak hanya menjadi bahan bacaan akademis, tetapi secara langsung memberi kontribusi dan pertimbangan substansi terhadap KMA 442 Kemenag.

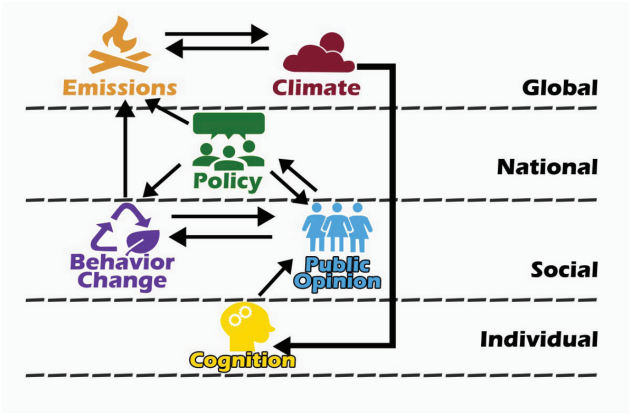

Gambar 5: Model Sistem Iklim-Sosial
Sumber: Adaptasi model sistem iklim-sosial (Moore, dkk., 2022

Ada juga advokasi yang gigih dari HAkA dan mitra lokalnya berkontribusi pada lahirnya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang perdagangan satwa liar. Fatwa-fatwa MUI menjadi rujukan normatif yang diadopsi dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah. Realitas ini menunjukkan ketika aksi masyarakat sipil dan aktivitas lembaga penelitian mampu menyajikan data yang solid dan argumen moral yang kuat, maka mereka dapat menjadi mitra setara bagi negara dalam proses perumusan kebijakan.

Kedua, dan mungkin yang paling fundamental adalah pengaruh kognitif terhadap kesadaran publik. Kekuatan terbesar dari gerakan ekoteologi terletak pada kemampuannya melakukan reframing atau pembingkaian ulang isu lingkungan. Konsep-konsep yang bersifat teknis dan kompleks seperti "jejak karbon" atau "konservasi biodiversitas" sering kali terasa jauh dan abstrak bagi masyarakat awam. Namun, ketika isu tersebut dibingkai ulang sebagai persoalan iman dan moralitas seperti "menjaga amanah sebagai khalifah," "mencegah dosa jariyah," atau "meneladani kasih Santo Fransiskus dari Assisi", isu itu menjadi personal, bermakna, dan mengikat secara moral.

Proses ini secara efektif mengubah "tata bahasa moral" publik mengenai lingkungan. Perilaku merusak lingkungan tidak lagi hanya dilihat sebagai pelanggaran peraturan, tetapi sebagai sebuah dosa atau pengkhianatan terhadap amanah spiritual. Jaringan keagamaan seperti masjid, gereja, dan pesantren merupakan kanal diseminasi yang paling efektif dan terpercaya di Indonesia untuk "perangkat lunak moral" baru ini, sehingga pesan-pesan ekologis memiliki tingkat penerimaan yang jauh lebih tinggi.

Dalam dinamika ekoteologi Indonesia, jaringan para aktor menjadi tulang punggung yang menghubungkan nilai-nilai spiritual dengan aksi nyata pelestarian alam, menciptakan ekosistem kolaboratif yang melampaui batas sektarian, institusional, dan geografis. Bagian ini mengusulkan pembentukan jaringan kerja untuk perubahan iklim dan pelestarian lingkungan yang diadaptasi dari model sistem iklim-sosial (climate-social system model) oleh Moore et al. (2022), di mana aktor-aktor ekoteologi—seperti kementerian negara, organisasi keagamaan, perempuan, komunitas adat, NGO, dan tokoh agama—dipetakan ke enam komponen utama model: emisi (emissions), iklim (climate), kebijakan (policy), opini publik (public opinion), perubahan perilaku (behavior change), dan kognisi (cognition). Model jaringan ini dapat memposisikan ekoteologi sebagai katalisator umpan balik positif, di mana legitimasi agama memperkuat koneksi antar-aktor untuk mengurangi emisi dan membangun ketahanan ekologis.

E. Paradigma Ekoteologi dalam Praktik

Paradigma ekoteologi dalam buku ini dipahami sebagai kerangka konseptual yang menghubungkan dimensi moral-spiritual, keberlanjutan antar-generasi, pengetahuan ekologis, serta dinamika sosial-keagamaan yang hidup di tingkat komunitas. Paradigma ini bukan sekadar gagasan normatif, melainkan landasan praktik lingkungan yang dijalankan oleh para aktor dan jejaringnya. Ia menegaskan tanggung jawab moral dan spiritual menjadi sumber etika ekologis, komitmen menjaga generasi penerus menjadi orientasi jangka panjang, dan integrasi kurikulum berbasis lingkungan menjadi sarana pembentukan kesadaran ekologis.

Dengan fondasi tersebut, praktik lingkungan menemukan basis ideologis sekaligus sosial yang membuatnya hidup dan berkelanjutan. Semua

tradisi agama besar, termasuk kearifan lokal Nusantara, memandang bumi bukan sekadar ruang hidup, melainkan titipan Tuhan (Yafie, 1994; Mawardi, Samidjo, 2021; Suryadi, 2023). Titipan itu menghadirkan tanggung jawab moral-spiritual bagi manusia untuk merawat, bukan mengeksploitasi. Kesadaran ini dapat ditelusuri melalui teks-teks keagamaan dan tradisi filosofis masing-masing agama, yang ternyata menyuarakan pesan ekoteologis serupa meskipun dengan bahasa yang berbeda.

Dalam Islam, konsep al-Mīzān (keseimbangan) yang tercantum dalam QS. Ar-Rahman [55]: 7-9 menegaskan Allah menciptakan alam dengan ukuran yang seimbang, dan manusia dilarang merusaknya. Kerusakan ekologis dalam Islam dipandang bukan sekadar persoalan teknis, melainkan pelanggaran moral terhadap amanah khalifah fil ardh (tugas manusia sebagai penjaga bumi). Beberapa kajian teolog Muslim modern, misalnya Fazlun Khalid (2002) dan Seyyed Hossein Nasr (1996), menekankan bahwa krisis ekologi berakar pada hilangnya kesadaran spiritual tentang kesucian alam. Dari sini lahir gerakan "eco-Islam" di berbagai negara, termasuk di Indonesia melalui inisiatif pesantren ramah lingkungan (Halimatusa'diyah, dkk, 2025), dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pelestarian satwa (lihat Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014).

Dalam Katolik, fondasi spiritual ekoteologi ditegaskan dalam ensiklik Laudato Si' (2015) dari Paus Fransiskus. Dokumen ini menyebut bumi sebagai our common home yang harus dijaga dengan semangat kasih universal (integral ecology). Bumi dipahami sebagai ciptaan Allah yang kudus, bukan objek konsumsi. Literatur akademis (lihat Berry, 2015; Johnson, 2016) menegaskan bahwa Laudato Si' bukan hanya dokumen internal Gereja Katolik, tetapi juga seruan moral global untuk solidaritas ekologis lintas iman.

Dalam Hindu-Buddha, kesadaran ekologis berakar pada pandangan kosmologis tentang kesatuan kosmik. Dalam Hindu, konsep tatanan kosmik menuntut manusia menjaga keseimbangan antara dharma (kebenaran), artha (kesejahteraan), dan kama (keinginan), karena kerusakan alam berarti mengganggu harmoni jagat raya (Sharma, 2017). Dalam Buddhisme, ajaran pratītyasamutpāda (interdependensi) menegaskan bahwa semua makhluk saling terkait: penderitaan lingkungan akan kembali menjadi penderitaan manusia. Literatur Buddhis kontemporer (Kabilsingh 1990; Loy 2019) menyebut fondasi "engaged Buddhism" yang mengikat spiritualitas dengan tanggung jawab ekologis.

Dalam Khonghucu, harmoni Tian-Dao (Jalan Langit dan Bumi) menjadi dasar etika ekologis. Kitab Zhong Yong menekankan bahwa manusia yang berbudi harus menyelaraskan diri dengan langit, bumi, dan sesama makhluk. Peneliti seperti Tu Weiming (1998) menyebut hal ini sebagai "ecological humanism" Konfusianisme, yang menekankan keterhubungan moral antara manusia dan kosmos.

Sementara itu, adat Nusantara menyimpan kosmologi ekologis yang kaya. Bagi masyarakat Dayak, hutan adalah ibu yang memberi kehidupan, sehingga ritual-ritual adat selalu menekankan larangan eksploitatif (Haug, 2017). Di Bali, filosofi Tri Hita Karana menegaskan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam masyarakat Maluku, tradisi sasi melarang pengambilan hasil laut atau hutan pada periode tertentu demi menjaga keberlanjutan ekologi (Zerner, 1994). Penelitian antropologi lingkungan menunjukkan bahwa kearifan lokal ini bukan sekadar tradisi, melainkan

sistem ekologis yang terbukti menopang keberlanjutan selama berabad-abad.

Jika ditarik ke akar, semua agama dan tradisi spiritual menegaskan tiga hal yang sama: (i) Alam adalah ciptaan atau manifestasi Tuhan; (ii) Manusia adalah bagian dari kosmos, bukan penguasa mutlak; dan (iii) Etika keberlanjutan adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan dan penghormatan pada kehidupan. Karena itu, meskipun perbedaan teologis tak terelakkan, tetapi pada tingkat spiritualitas terdalam kita menemukan fondasi bersama. Inilah yang disebut oleh Mary Evelyn Tucker (2003) sebagai interfaith ecological convergence — yakni titik temu lintas iman dalam melihat bumi sebagai rumah bersama. Spiritualitas inilah yang menjadi akar ekoteologi yang tak hanya menginspirasi aksi-aksi lingkungan, tetapi juga mengikat komunitas lintas agama dalam solidaritas ekologis.

Dari penjelasan beragam pengalaman para aktor dan jejaring, dapat disintesiskan sebuah kerangka kerja konseptual yang terdiri dari tiga pilar utama. Model yang diidentifikasi dalam analisis awal dapat dikelompokkan ke dalam pilar-pilar inti, yakni yang secara kolektif menjelaskan motivasi (The Why), mekanisme (The How), dan tujuan (The What For) dari gerakan ekoteologi di Indonesia.

1. Pilar Fondasi: Etika-Spiritual dan Kearifan Lokal (The Why)

   Pilar ini merupakan landasan motivasional dari semua praktik ekoteologi. Ia berakar pada keyakinan fundamental bahwa alam semesta adalah sakral, sebuah titipan atau manifestasi dari Tuhan, sehingga manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang inheren untuk merawatnya. Meskipun berangkat dari doktrin teologis yang berbeda, tetapi semua tradisi agama dan kearifan lokal di Indonesia bertemu pada sebuah etika lingkungan yang serupa: etika relasionalitas dan tanggung jawab.

   Sebagaimana disebutkan pada bab 1 dan 2, pilar ini diwujudkan dengan nilai-nilai ajaran agama yang diyakininya. Dalam Islam misalnya, pilar ini terwujud pada konsep khalifah fil ardh (wakil Tuhan di bumi) dan kewajiban menjaga al-Mizan (keseimbangan kosmik). Dalam Katolik, pilar ini diekspresikan melalui mandat stewardship (penatalayanan) dan konsep integral ecology dalam Ensiklik Laudato Si'. Dalam tradisi adat, seperti pada masyarakat Baduy atau Kampung Naga, alam dipandang sebagai kerabat atau "ibu" yang memberi kehidupan, bukan sebagai objek eksploitasi. Hal ini memungkinkan dialog dan aksi bersama tanpa harus memperdebatkan perbedaan, karena semua bersepakat pada premis dasar yang sama: merawat bumi adalah sebuah panggilan suci.

2. **Pilar Aksi: Kolaborasi Partisipatif dan Pemberdayaan (The How)**

   Pilar ini menjelaskan mekanisme sosiologis atau "rumus" keberhasilan inisiatif ekoteologi di tingkat akar rumput. Keberhasilan tersebut bukan hasil dari satu faktor tunggal, melainkan lahir dari sinergi dinamis antara tiga elemen kunci, yakni Inovator Lokal + Modal Sosial + Legitimasi Institusional = Aksi Transformatif. Berikut penjelasannya:

   1) Inovator Lokal

   Mereka adalah agen perubahan (change agents) bisa seorang aktivis, guru, kiai, pendeta, atau tokoh pemuda yang memiliki visi, legitimasi sosial, dan kapasitas teknis untuk menjembatani gagasan besar dengan praktik sehari-hari yang membumi dan sesuai konteks lokal.

2) Modal Sosial

Elemen ini adalah energi kolektif yang bersumber dari kepercayaan (trust), solidaritas komunitas, dan tradisi gotong royong. Tanpa elemen ini sebuah inisiatif tidak akan mendapat dukungan massa.

3) Legitimasi Institusional

Elemen ini adalah "restu" atau dukungan dari institusi agama atau adat (kiai, pendeta, tetua adat) yang memberikan bobot normatif dan otoritas moral pada sebuah gerakan, membuatnya lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Ketika ketiga unsur tersebut hadir bersama, lahirlah model ekoteologi yang tangguh. Dakwah ekologi di Aceh berhasil karena inovator (HAkA) memanfaatkan modal sosial (jaringan majelis taklim) dan diperkuat oleh legitimasi institusional (otoritas Teungku Inong). Bank Sampah Emak.ID di Lampung berhasil karena para inovatornya mampu menggerakkan modal sosial di antara para ibu dan mendapatkan dukungan komunitas. Model collaborative governance di Kampung Hijau Gambiran menunjukkan formula ini dapat diperluas dengan melibatkan institusi eksternal (pemerintah, universitas) untuk memperkuat legitimasi dan kapasitas teknis.

3. Pilar Visi: Keadilan Antargenerasi dan Integrasi Pengetahuan (The What For)

Pilar ini mendefinisikan tujuan transformatif jangka panjang dari gerakan ekoteologi yang melampaui aksi-aksi konservasi sesaat. Visi ini memiliki dua komponen utama, yakni mewujudkan keadilan antargenerasi dan menciptakan solusi memadukan kearifan spiritual dengan pengetahuan ilmiah. Penjelasan pertama, komitmen terhadap generasi penerus secara cerdas membingkai ulang tindakan lingkungan dari kewajiban saat ini menjadi sebuah investasi spiritual untuk masa depan.

Dalam ajaran Islam misalnya, model ini diekspresikan secara kuat melalui konsep amal jariyah (kebaikan yang pahalanya terus mengalir) dan dosa jariyah (dosa yang dampaknya terus berlanjut). Menanam pohon adalah amal jariyah, sementara membuang sampah plastik yang baru terurai ratusan tahun kemudian adalah dosa jariyah yang akan membebani anak cucu. Kerangka moral ini mengubah kalkulasi etis secara radikal dan memberikan bobot spiritual yang sangat besar pada pilihan-pilihan sehari-hari.

Penjelasan kedua, model ini menekankan etika agama harus diperkuat dengan pengetahuan ilmiah agar relevan dan solutif. Ia menciptakan sintesis produktif antara "wahyu dan ilmu," mencegah ekoteologi menjadi gerakan yang anti-sains atau romantisasi masa lalu. Prinsip keagamaan seperti "tidak berlebih-lebihan" (israf) menjadi lebih operasional saat dihubungkan dengan konsep ilmiah seperti jejak karbon. Gerakan eco-pesantren menjadi laboratorium sempurna untuk sintesis ini, di mana para santri tidak hanya belajar fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah), juga dibekali pengetahuan teknis tentang daur ulang, energi terbarukan, dan konservasi air.

F. Arah dan Tantangan Masa Depan Ekoteologi

Analisis komprehensif terhadap praktik baik ekoteologi di Indonesia menyingkapkan sebuah gerakan yang kaya, polisentris, dan multi-model. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuannya mengakar dalam spiritualitas agama dan kearifan lokal, sambil secara dinamis membangun jejaring kolaboratif yang kompleks dari tingkat lokal hingga global. Para aktor yang beragam dari negara hingga masyarakat adat telah berhasil membingkai ulang isu lingkungan sebagai sebuah imperatif moral dan spiritual, sebuah pencapaian kognitif yang fundamental bagi mobilisasi sosial di negara yang sangat religius.

Model-model yang berkembang, yang berlandaskan pada etika spiritual, aksi kolaboratif, dan visi keadilan antargenerasi, telah terbukti mampu menerjemahkan nilai luhur menjadi aksi yang transformatif. Namun, di tengah berbagai keberhasilan tersebut, tantangan ke depan tetap signifikan dan memerlukan refleksi strategis.

1. **Fragmentasi vs Skalabilitas**

   Banyak inisiatif yang menginspirasi masih berjalan sendiri-sendiri dan berskala lokal. Tantangan utamanya adalah bagaimana meningkatkan skala dampak dari proyek-proyek percontohan ini menjadi perubahan sistemik yang lebih luas, tanpa harus kehilangan konteks lokal dan keotentikan yang menjadi sumber kekuatannya.

2. **Kooptasi vs Kritik**

   Kedekatan dan kolaborasi yang erat dengan negara, meskipun produktif, membawa risiko kooptasi dan greenwashing. Gerakan ini berisiko kehilangan suara kritisnya dan tereduksi menjadi pelaksana program pemerintah, sementara akar masalah ketidakadilan ekologis seperti industri ekstraktif yang didukung oleh kebijakan negara tidak tersentuh. Dialog dengan Teologi Pembebasan Amerika Latin mengingatkan pentingnya menjaga jarak kritis ini agar gerakan tidak kehilangan jiwa profetiknya.

3. **Regenerasi dan Relevansi**

   Untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang, gerakan ini harus terus relevan dan dipimpin oleh generasi berikutnya. Tantangannya adalah bagaimana secara efektif melibatkan kaum muda, tidak hanya sebagai peserta, tetapi sebagai pemimpin dan inovator. Belajar dari pengalaman di Filipina, gerakan perlu secara serius menjawab isu kecemasan ekologis dan memberdayakan kaum muda mengartikulasikan spiritualitas ekologis mereka sendiri.

Arah masa depan ekoteologi Indonesia bergantung pada kemampuannya menavigasi tantangan-tantangan ini. Langkah ke depan menuntut penguatan “jaringan ikat” (NGO dan lembaga penelitian) untuk lebih baik menghubungkan inovator akar rumput dengan pembuat kebijakan. Diperlukan pula penciptaan ruang-ruang dialog kritis yang terinspirasi oleh semangat keadilan agraria memastikan gerakan ini tetap menjadi kekuatan oposisi terhadap ketidakadilan sistemik.

Terakhir, pengembangan program-program yang dipimpin oleh kaum muda yang secara eksplisit mengintegrasikan kesehatan spiritual dengan aksi lingkungan akan menjadi kunci menumbuhkan generasi baru penjaga bumi. Pada akhirnya, tujuannya untuk berevolusi dari sekumpulan “praktik baik” menjadi sebuah kekuatan kolektif yang mampu mendorong transformasi menuju Indonesia yang adil secara ekologis dan berkelanjutan bagi seluruh ciptaan.

BAB IV

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKOTEOLOGI

A. Potensi Penggerak Implementasi Ekoteologi

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) memiliki potensi besar dalam rangka mengimplementasikan ekoteologi secara luas. Sebaran potensi menekankan pada edukasi ekoteologi dengan moderasi beragama secara berkelanjutan yang fokus pada empat pilar utama, yakni Sumber Daya Manusia (SDM), Layanan Keagamaan, Pendidikan Agama, dan kemitraan. Masing-masing pilar tercatat dalam satu data Kemenag yang selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Merujuk data terkini Kemenag dan BPS (cut off 2024-2025), total penduduk beragama di Indonesia tercatat sekitar 279 juta jiwa. Angka ini tentu mencerminkan keragaman spiritual yang kaya. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam mencakup 87,06% atau sekitar 243 juta jiwa, menjadikannya pilar utama komunitas keagamaan nasional. Selain itu, terdapat komunitas Kristen dengan proporsi 10,49% atau sekitar 29,3 juta jiwa, diikuti oleh Katolik dengan 3,12% atau sekitar 8,7 juta jiwa.

Kemudian agama Hindu dianut oleh 1,74% penduduk atau sekitar 4,9 juta jiwa, sementara Buddha mencakup 0,72% atau sekitar 2 juta jiwa. Kelompok agama Khonghucu, meskipun kecil dengan hanya 0,03% atau sekitar 70 ribu jiwa, namun turut melengkapi mosaik keberagamaan di Indonesia. Data ini menunjukkan kekuatan dan harmoni keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Selain kekuatan agama beserta umat beragamanya, secara kelembagaan, Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pemangku kepentingan dalam pembangunan agama di Indonesia memiliki kekuatan yang sangat besar. Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenag mencakup 290.955 personel (210.940 PNS, 50.040 PPPK, dan 30.000 penyuluh/rohaniwan), dengan penurunan PNS 3% akibat pensiun.

Dominasi Islam (>80%), keseimbangan gender (52% perempuan) dan kualifikasi pendidikan tinggi (>90% S1). Jumlah ini belum ditambah dengan keberadaan ustadz di pesantren sebanyak 2.119 orang, dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 1.321.000 orang (termasuk pengawas 4.013). Tabulasi persebaran SDM dapat dilihat pada lampiran bagian ini (Lampiran 1).

Sedangkan untuk layanan keagamaan, Kementerian Agama mengelola 6.497unit kerja daerah dan 1.340.263 rumah ibadah, serta didukung oleh 546 FKUB dan 264 desa sadar kerukunan. Pada 2025 ini, BOS pesantren sebesar Rp196,8 miliar yang menjangkau 590 ribu santri. Sementara pendidikan agama memiliki 199.706 satuan pendidikan (54.047 formal, 145.659 non-formal), 41.220 pesantren, 1.536 lembaga PTK, 471.548 mahasiswa, dan 5 juta santri dengan 1.321.000 guru/ustadz. Jumlah ini belum ditambah dengan keberadaan sekolah-sekolah dan seminari yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok agama lainnya. Jumlahnya pun mencapai ribuan satuan Pendidikan. Untuk mengetahui lebih detail kekuatan sebaran layanan keagamaan, khususnya untuk implementasi potensi aktor gerakan ekoteologi secara luas dan berkelanjutan dapat disimak pada lampiran-lampiran paling belakang buku ini (Lampiran Potensi SDM, Layanan Keagamaan, dan Pendidikan Agama dalam Angka).

B. Menerjemahkan Ekoteologi pada Kebijakan

Potensi kelembagaan dan jaringan sosial Kementerian Agama (Kemenag) sebagaimana disebutkan di atas sangat besar. Namun, potensi ini tidak akan mampu bergerak atau menggerakan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam praktik-praktik ekoteologi sepanjang para pihak tersebut tidak memahami dan tidak mampu menerjemahkan konsepsi ekoteologi dalam praktik-praktik sosial dan kebijakannya.

Oleh karena itu, pemahaman atas konsepsi ekoteologi yang diterjemahkan ke dalam praktik sosial dan kebijakan perlu diperjelas. Alur berpikir ini seperti sedang membangun kerangka teori dalam sebuah karya tulis, sehingga proses pemahamannya dan langkah-langkah teknisnya sudah jelas dan dapat dilaksanakan langsung. Ekoteologi, dalam konsepsi sederhana dimaknai sebagai: menghubungkan pelestarian dan eksistensi lingkungan dengan keimanan dan amal saleh dalam praktik keagamaannya.

Artinya, seseorang dapat dianggap beriman, ketika lingkungan sekitarnya lestari, bersih, dan terjaga dengan baik. Dalam konsepsi lebih luas, ekoteologi tentu dimaknai sebagai paham, landasan ideologis, dan perspektif yang berusaha mendorong adanya kepedulian umat beragama terhadap tata kelola lingkungan dan sumber daya alam secara cermat, holistik dan keberlanjutan dengan kedampakan yang terukur dan mampu dikendalikan.

Gambar 6. Penerjemahan Ekoteologi dari Definisi Operasional Kebijakan
Sumber: Refleksi Penulis (M. Alie Humaedi, 2025).

Konsepsi ini akan mengalami kendala signifikan ketika bertabrakan dengan berbagai kepentingan ekonomi global, di mana modal alam seringkali menjadi modal terpenting dalam industri. Penerjemahan konsep ekoteologi menjadi praktik sosial, gerakan sosial, dan kebijakan perlu didesain sebaik mungkin dengan penguatan dan pemahaman konsep, serta implementasinya dengan memaksimalkan peran para aktor, khususnya tokoh agama, tokoh pendidikan, dan jejaring kelembagaan sosial formal dan informalnya. Berikut ini adalah desain penerjemahan konseptual dalam praktik ekoteologi dalam konteks keindonesiaan.

C. Tujuan Kebijakan Ekoteologi

Dengan skema di atas, ekoteologi nasional bertujuan memperkuat kontribusi sektor keagamaan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan, sekaligus merespons tantangan krisis ekologis global melalui pendekatan sistematis dan berbasis nilai keagamaan. Program ini dirancang selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045, yang menekankan transformasi menuju masyarakat makmur dan lestari, serta mendukung pencapaian Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun sumber daya manusia unggul, mendorong ekonomi hijau berbasis inovasi, dan mewujudkan pemerataan pembangunan lintas wilayah yang inklusif.

Berlandaskan paradigma transformasi sosial-ekologis, gerakan ini difokuskan pada pengarusutamaan prinsip spiritualitas ekologis di seluruh ekosistem kelembagaan Kemenag. Dengan tujuan utama mendorong perubahan pola pikir, sistem nilai, dan praktik hidup masyarakat yang harmonis antara dimensi spiritual dan ekologis. Secara spesifik, ekoteologi nasional ini memiliki tiga tujuan. Berikut penjelasannya:

1. Penumbuhan kesadaran ekologis sebagai manifestasi iman dan tanggung jawab keagamaan, di mana pemahaman pelestarian lingkungan hidup merupakan bagian integral dari pengamalan ajaran agama—seperti konsep khalifah fil ardi dalam Islam, atau harmoni alam dalam Tri Hita Karana Hindu—diinternalisasikan melalui reformasi kurikulum pendidikan keagamaan, penyuluhan lintas agama yang inklusif, khotbah/dakwah tokoh agama serta integrasi isu ekologis dalam praktik ibadah sehari-hari, sehingga kesadaran ini tidak hanya menjadi pengetahuan teoritis tetapi juga sikap hidup yang berkelanjutan.
2. Pembangunan tata nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan keagamaan dan sosial, dengan mengembangkan etika lingkungan sebagai norma operasional utama bagi kelembagaan keagamaan, yang mencakup tata kelola rumah ibadah yang efisien, kegiatan dakwah yang berorientasi ekologis, serta pelayanan keumatan yang bertanggung jawab. Norma ini diharapkan dapat menjadi standar perilaku individu dan institusi yang menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan jejak ekologis, dan komitmen keberlanjutan lintas generasi guna mencegah degradasi lingkungan yang mengancam kesejahteraan umat.
3. Pengembangan praktik hidup hijau sebagai ekspresi keimanan dan ibadah sosial, di mana umat beragama didorong untuk mengadopsi gaya hidup berkelanjutan sebagai wujud iman yang konkret dan berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan, melalui gerakan kolektif lintas agama seperti konservasi energi di masjid dan gereja, pengelolaan sampah terpadu berbasis komunitas, restorasi ekosistem lokal melalui ritual adat, serta penghijauan di lingkungan pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan layanan keumatan. Praktik ini tidak hanya dapat mengurangi emisi karbon, tetapi juga dapat memperkuat solidaritas sosial-religius dalam menghadapi krisis global.

D. Strategi Implementasi Kebijakan Ekoteologi

Implementasi ekoteologi nasional memerlukan kerangka strategis yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis lintas sektor. Strategi bertujuan untuk membangun kesadaran ekologis dan tanggung jawab keberagamaan yang berkelanjutan di seluruh unit Kementerian Agama RI melalui pendekatan kelembagaan, kebijakan, dan kemitraan multiaktor.

Agar gerakan ekoteologi di lingkungan Kementerian Agama berjalan efektif dan berkelanjutan, perlu strategi yang dilakukan dengan penguatan pada lima instrumen utama, yakni:

1. Anggaran – Dukungan finansial menjadi faktor krusial memastikan program ekoteologi dapat diintegrasikan ke seluruh unit kerja Kemenag. Mulai dari pendidikan, penyuluhan, hingga forum kerukunan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, gerakan ini akan berhenti pada tataran wacana.
2. Regulasi – Perlu disusun kebijakan, regulasi, dan pedoman hukum yang menjadi dasar implementasi ekoteologi. Hal ini penting agar gerakan memiliki legitimasi formal dan menjadi bagian dari program nasional Kemenag, bukan sekadar inisiatif sporadis.

3. Konsep – Diperlukan kerangka konseptual yang jelas dan mengaitkan nilai agama-agama dengan kesadaran ekologis. Dengan begitu, setiap agama memiliki titik pijak yang kontekstual dan relevan dengan ajaran serta praktik keagamaannya.
4. Indikator – Penetapan indikator keberhasilan menjadi alat ukur untuk melihat sejauh mana implementasi ekoteologi berjalan di semua level. Indikator ini dapat mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (kesadaran), hingga praksis (aksi nyata) yang dilakukan oleh aktor-aktor keagamaan.
5. Evaluasi dan Award – Dibutuhkan mekanisme pemantauan dan penilaian secara berkala, agar implementasi program dapat dikendalikan dan ditingkatkan. Selain itu, pemberian penghargaan kepada unit atau individu terbaik akan menjadi insentif dan motivasi untuk memperkuat gerakan ini di lapangan.

Dengan demikian, strategi yang dikembangkan adalah aktivasi keterpaduan lima instrumen yang dimiliki oleh Kementerian Agama dalam pengembangan gerakan ekoteologi pada seluruh unit di lingkungannya, dan termasuk kepada jejaring kelembagaan pembangunan bidang keagamaannya.

Gambar 7. Strategi Implementasi Ekoteologi

E. Pilar-Pilar Implementasi Ekoteologi

Gerakan ekoteologi dalam konteks Kementerian Agama RI hanya dapat berjalan secara efektif apabila ditopang oleh pilar-pilar strategis yang menyatukan dimensi birokrasi, pendidikan, layanan keagamaan, dan kemitraan lintas sektor. Keempat pilar ini bukan sekadar instrumen pelaksana, melainkan kerangka transformatif yang menjadikan ekoteologi menjadi bagian integral dari sistem kelembagaan dan kehidupan umat beragama di Indonesia. Berikut penjelasan dari masing-masing pilar implementatif yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI:

1. Pilar Aparatur: ASN sebagai Pionir Transformasi Birokrasi Hijau

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama diarahkan menjadi pionir dalam transformasi birokrasi hijau yang berlandaskan nilai-nilai agama. ASN tidak hanya berfungsi sebagai pelayan publik, melainkan juga sebagai agen perubahan yang menanamkan etika ekologis dalam tata kelola birokrasi maupun kehidupan sosial keagamaan.

Strategi penguatan pilar aparatur ini meliputi:

1) Pengembangan modul pengetahuan mengenai krisis ekologi dan praktik hidup ramah lingkungan yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama;
2) Penyelenggaraan bimbingan keagamaan berbasis dimensi ekoteologi, baik untuk aparatur maupun penyuluh agama. Tujuannya guna memperkuat peran mereka sebagai pembimbing masyarakat dalam membangun tata nilai ekologis dan keberlanjutan gaya hidup;
3) Peningkatan kapasitas pejabat, pegawai, dan penyuluh melalui pelatihan berkala serta sertifikasi ekoteologi;
4) Penyediaan sarana-prasarana ramah lingkungan di kantor-kantor Kemenag, termasuk pengelolaan sampah, efisiensi energi, konservasi air, dan penataan ruang kerja hijau;
5) Penguatan sistem penilaian kinerja ASN dan penyuluh agama dengan memasukkan indikator ekoteologi, sehingga kesadaran ekologis menjadi bagian dari budaya kerja dan etos pelayanan keagamaan.

2. Pilar Pendidikan: Membentuk Generasi Spiritual-Ekologis

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran ekologis yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. Pilar ini menempatkan sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan sebagai laboratorium utama penguatan ekoteologi. Arah strategisnya meliputi:

1) Integrasi kurikulum ekoteologi di seluruh jenjang pendidikan formal dan non-formal;
2) Peningkatan kapasitas pendidik dan peserta didik untuk menginternalisasi pengetahuan dan praktik hidup berkelanjutan;
3) Internalisasi tata nilai ekologis dalam kehidupan sehari-hari, seperti efisiensi energi, pengelolaan sampah, kepedulian terhadap lingkungan, dan tanggung jawab sosial terhadap alam;
4) Penguatan penelitian dan pengabdian masyarakat bertema ekoteologi, khususnya di perguruan tinggi keagamaan;
5) Pembudayaan gaya hidup ekologis yang berkelanjutan melalui teladan pendidik, kebijakan sekolah/madrasah hijau, dan gerakan siswa peduli lingkungan.

3. Pilar Layanan Keagamaan: Umat sebagai Sumber dan Muara Ekoteologi

Layanan keagamaan merupakan wahana strategis untuk mentransformasikan nilai-nilai ekoteologi ke dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas), Kementerian Agama tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, bimbingan, dan pembinaan umat, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak pemberdayaan ekospiritual umat.

Pilar ini menghubungkan dimensi spiritual dengan tanggung jawab ekologis melalui ruang-ruang ibadah, penyuluhan, dan praktik ritual yang ramah lingkungan. Arah strategis penguatannya meliputi:

1) Integrasi ekoteologi dalam kurikulum penyuluh agama dan materi bimbingan keagamaan;
2) Penyusunan petunjuk teknis dan SOP layanan keagamaan berbasis ekoteologi, termasuk protokol ibadah ramah lingkungan;
3) Pelibatan unit-unit bimas serta forum keagamaan nasional seperti Musabaqah Tilawatil Qur`an (MTQ), Pesparawi, Pesparani, dan Dharmasanti dalam kampanye ekoteologi;
4) Pengembangan sarana dan prasarana ibadah ramah lingkungan, mulai dari desain bangunan hemat energi hingga taman edukatif ekologis di rumah ibadah;
5) Penguatan program pemberdayaan umat berbasis ekoteologi, seperti gerakan masjid hijau, pesantren energi terbarukan, dan rumah ibadah sebagai pusat literasi lingkungan.

4. Pilar Kemitraan: Ekoteologi sebagai Gerakan Kolektif

Gerakan ekoteologi tidak dapat berjalan hanya melalui birokrasi dan layanan internal Kementerian Agama, melainkan harus diperluas melalui jejaring kemitraan lintas sektor. Pilar ini menegaskan ekoteologi sebagai gerakan kolektif yang melibatkan aktor-aktor beragam yang telah terbukti berkontribusi dalam praktik pelestarian lingkungan berbasis nilai agama dan kearifan lokal.

Kemitraannya dapat dibangun dengan:

1) Organisasi keagamaan dan tokoh agama, misalnya Nahdlatul Ulama (NU) dengan program eco pesantren, Muhammadiyah dengan green masjid, PGI dengan program penghijauan gereja, Parisadha Hindu Dharma Indonesia dengan gerakan Tri Hita Karana, atau tokoh agama lokal yang menggerakkan komunitasnya menjaga mata air dan hutan.
2) Organisasi masyarakat sipil/NGO, seperti WALHI, KEHATI, Greenpeace, GreenFaith dan komunitas lokal yang mempraktikkan konservasi berbasis agama.
3) Kementerian/lembaga negara, seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan hutan dan energi terbarukan, Kemendikdasmen, Kemenbud, dan Kemendiktisaintek dalam pendidikan lingkungan, Kemenko PMK untuk sinergi pembangunan berkelanjutan.
4) Lembaga penelitian dan perguruan tinggi, yakni PTKIN, UIN, Universitas Katolik, Universitas Hindu, dan lembaga riset independen yang mengembangkan metodologi ekoteologi lainnya.
5) Media Massa, perannya dapat sebagai mitra penyebarluasan literasi ekoteologi, kampanye publik, dan advokasi kebijakan ramah lingkungan.
6) Program CSR yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal, misalnya pembangunan energi bersih, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam.

Strategi penguatan pilar ini meliputi:

1) Penyusunan fatwa, khotbah, dan seruan ekoteologi sebagai pedoman moral;
2) Kampanye bersama dengan media dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas literasi ekoteologi di ruang publik;
3) Penyusunan agenda kerja sama lintas agama, budaya, dan sektor; dan
4) Penerapan standar kemitraan berbasis prinsip keberlanjutan, keadilan ekologis, dan tanggung jawab antar-generasi.

Dengan demikian, diharapkan ekoteologi tidak berhenti pada tataran normatif. Kehadiran visi ini dapat menjadi gerakan kolaboratif yang hidup di tengah masyarakat. Selain itu juga memperkuat solidaritas ekologis dan mendorong perubahan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat luas.

F. Road Map Strategi dan Milestones Implementasi Ekoteologi (2025–2029)

Roadmap Strategi Ekoteologi Nasional dirancang sebagai panduan terstruktur untuk Kementerian Agama RI dalam mewujudkan transformasi sosial-ekologis yang selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Roadmap ini dibagi menjadi enam fase progresif, dari persiapan kebijakan hingga internasionalisasi, dengan fokus pada penguatan kelembagaan, kapasitas SDM, kolaborasi lintas sektor, dan pengukuran dampak terukur.

TABEL 9. ROADMAP & MILESTONE GERAKAN EKOTEOLOGI NASIONAL (2025-2029)

TAHUN	FOKUS UTAMA	KEGIATAN KUNCI	OUTPUT/INDIKATOR
2025 Fase Persiapan & Penguatan Kebijakan	Persiapan Implementasi Ekoteologi : Pembuatan Regulasi, Naskah Kebijakan dan Dokumen Implementasi lainnya.	- Penyusunan KMA Ekoteologi sebagai Program Prioritas - Penyusunan Policy Brief Ekoteologi Kemenag RI - Penyusunan Buku Pedoman Strategi Implementasi Ekoteologi - Penyusunan Buku Ekoteologi Masing Masing Bimas - Penyusunan Kursil Diklat Ekoteologi ASN - Penyusunan Buku Penyuluhan Ekoteologi - Penyusunan Draft Integrasi - Ekoteologi pada Kurikulum - Pendidikan Agama - Penyusunan SOP Redesign - Ekosistem Hijau dan Eco Label - Eco Points Internal Kemenag, - Alat Penanda Standarisasi dan Capaian Kinerja Unit Kerja Titik Awal Eco Award Tahunan - Kampanye Nasional “Iman untuk Penyelamatan Bumi”	- 1 Dokumen KMA Ekoteologi sebagai Program Prioritas - 1 Dokumen Policy Brief - 1 Buku Ekoteologi Kemenag RI, Definisi, Pedoman Implementasi - 1 Buku Ekoteologi pada Direktorat Bimas Agama - 1 Dokumen Kursil - Diklat Ekoteologi - 1 Dokumen Buku Penyuluhan Agama Berbasis Ekoteologi - 1 Dokumen Kurikulum Pendidikan Agama - 1 Event Nasional - Kampanye Nasional Diluncurkan & Diadopsi 34 Provinsi

2026 Fase Penguatan Kapasitas Aktor Keempat Pilar	Pengarusutamaan Ekoteologi: Pelaksanaan DIKLAT TOT, Pelaksanaan Sosialisasi, Kampanye/Konferensi Dialog Nasional Ekoteologi	- Pengukuran Evaluasi Output Implementasi Program Ekoteologi Ecolabel - Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pengarusutamaan Ekoteologi - Diklat ASN dan Penyuluh Agama Pengarusutamaan Ekoteologi - Sosialisasi Ekoteologi pada Tokoh Tokoh Agama dan Mitra Strategis - Pelatihan Guru/Dosen - Integrasi Ekoteologi pada Pendidikan Agama - Workshop Kepemimpinan Ekologis Generasi Muda Indonesia - Pilot Project Sosialisasi SOP Redesign Ekosistem Hijau Dan Eco Label Eco Points Internal	- 1 Dok Evaluasi Tahunan - 1 Dok Rancangan PMA Pengarusuta-maan Ekoteologi - 500 ASN dan 500 Penyuluh Agama Terlatih - 500 Tokoh Agama dan Mitra (Media, KL Lain, Pengusaha) yang Tersosialisasi - 500 Tenaga Pendidik Terlatih Ekoteologi - 500 Generasi Muda (Mahasiswa, Kaum Pemuda Agama, Pemimpin OSIS) Terlatih Ekoteologi - Konferensi Ilmiah Ekoteologi - 20 Kanwil, 50 kantor, 100 KUA, 100 Pesantren, 100 Sekolah Menerapkan Ekosistem Hijau.
2027 Fase Simpul Gerak Ekoteologi Skala Nasional	Evaluasi Outcome dan Jaringan Ekoteologi Nasional Keempat Pilar	- Pengukuran Evaluasi Dampak Implementasi Program Ekoteologi Eco Label pada Keempat Pilar - Jejaring Ekoteologi Lintas Iman - Fatwa Agama-agama Etika Lingkungan - Deklarasi Etika Lingkungan para Pengusaha - Ekosistem Hijau Perkantoran Kementerian, KUA, Lembaga Pendidikan - Tempat Ibadah Ramah Lingkungan -Ecoteologi Award	- Laporan Dampak Ekoteologi Nasional - Jaringan Komunitas Aktif - 3 Fatwa - 1 Deklarasi Lingkungan - 500 Prasarana (Kantor, KUA Dan Sekolah) Eco Label Kementrian Agama - 200 Rumah Ibadah Ramah Lingkungan - 50 Penghargaan Ekoteologi - Apresiasi Terhadap Aktor, Lembaga Pada Keempat Pilar Pengumpul Eco Label Dan Eco Points
2028 Fase Konsolidasi & Inovasi	Inovasi Keagamaan & Integrasi dalam RPJMN	- 10 Inovasi Ekoteologi (Air, Energi Bersih, Sampah), Sabun Eco Enzyme - Konferensi Nasional Ekoteologi - Pengarusutamaan Ekoteologi dalam RPJMN 2030–2034 & RPJMD Daerah - Dokumentasi Gerak Ekoteologi Indonesia	- 10 Inovasi Teruji & Siap Diimplementasi - Konferensi Nasional Hasilkan Roadmap Baru - Ekoteologi Masuk Dokumen RPJMN/ RPJMD - 2 Buku
2029 Fase Kemandirian & Internasio-nalisasi	Ekoteologi Indonesia sebagai Model Global	- Ekspansi Jejaring Internasional (PBB, ASEAN, Mitra Global) - Konferensi Ekoteologi Internasional di Indonesia - Laporan Praktik Baik Ekoteologi Indonesia	- Indonesia Jadi Pusat Rujukan Internasional - Konferensi Internasional Dihadiri 10 Negara - Laporan Indonesia Jadi Referensi Global

Setiap milestone dirancang measurable, achievable, relevant, dan time-bound (SMART), dengan indikator yang berbasis data untuk memastikan akuntabilitas dan adaptabilitas terhadap dinamika krisis iklim. Implementasi akan didukung

oleh lima instrumen strategis (anggaran, regulasi, konsep, indikator, evaluasi dan award), dengan anggaran tahunan dari APBN dan kemitraan swasta, serta evaluasi tahunan oleh BMBPSDM Kementerian Agama.

G. Capaian Sementara Gerakan Ekoteologi

Program ekoteologi Kementerian Agama RI telah menunjukkan langkah konkret dalam menyatukan nilai-nilai agama dengan pelestarian lingkungan, mendukung visi pembangunan berkelanjutan dan target emisi nol bersih 2045 sesuai Asta Protas. Program ini dijalankan melalui empat pilar utama oleh berbagai koordinator, termasuk Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB).
Berikut adalah rincian program yang telah dilaksanakan berdasarkan data terbaru.

Pilar 1: Program Penguatan SDM dan Sarana Prasarana

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam: Melaksanakan gerakan menanam pohon oleh CPNS dan PPPK, menyediakan tanaman pot di kantor, kampanye ekoteologi melalui media sosial, kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan untuk bibit pohon bagi 4.799 madrasah, dan pembangunan green campus di PTKIN.
2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen: Menginisiasi Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa serentak pada Hari Bumi dengan penyuluh agama, dialog dan sosialisasi melalui seminar/lokakarya daur ulang sampah, penulisan materi Ekoteologi dan Cinta Kasih dalam kurikulum penyuluhan, serta pengelolaan sarana ibadah ramah lingkungan dengan penghijauan.
3. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu: Melakukan sosialisasi pengelolaan sampah plastik di rumah ibadah, program Green Pura dengan penanaman pohon Kamboja, Cempaka, Kenanga, Kelapa, Matoa, dan Alpokat, serta pelepasan ikan, burung, tukik, dan penyu pada Tumpek Uye.
4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: Mengadakan Seminar Nasional dan Deklarasi Istiqlal: “Menjaga Bumi, Merawat Keberagaman Perspektif Lintas Agama”, Webinar Nasional “Spirit Deklarasi Istiqlal dalam Mewujudkan Masjid Ramah Lingkungan”, Seminar Nasional tentang Toleransi, Seminar “EcoHarmony” di Sulawesi Utara, Webinar “Spirit Deklarasi Istiqlal dalam Mewujudkan Masjid Ramah Keragaman”, Dialog dan Deklarasi Lintas Iman Sai Bumi Ruwa Jurai, Expo Eco Masjid, International Conference on Religion and Environment, dan FGD diseminasi etika lingkungan.
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha: Melaksanakan public campaign kesadaran lingkungan, gerakan penanaman pohon oleh CPNS dan PPPK, gerakan sejuta pohon oleh ASN memperingati Hari Bumi, kegiatan mindfulness for work engagement untuk pembinaan pegawai

terkait kepedulian lingkungan, dan implementasi core value berakhlak untuk ASN. Institut Nalanda Jakarta menyelenggarakan webinar transformasi limbah organik rumah tangga menjadi eco enzyme, STAB Maitreyawira mengadakan webinar pelatihan pembuatan sabun padat eco enzyme, dan STABN Raden Wijaya melaksanakan penanaman pohon dan fang shen sekaligus pembukaan rangkaian acara Waisak.

6. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu: Belum ada program khusus untuk tempat ibadah dan Perguruan Tinggi Khonghucu berwawasan ekoteologi, namun telah bekerja sama dengan Interfaith Rainforest Initiative (IRI) untuk menyusun buku terkait ekoteologi.
7. Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB): Menyusun Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) dan melaksanakan aksi nyata ekoteologi, seperti penanaman pohon di Pura dan pembersihan masjid di Bogor, Jawa Barat.

Pilar 2: Integrasi Ekoteologi dalam Pendidikan Agama dan Ekosistem Pendidikan

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam: Menyusun Kurikulum Berbasis Cinta (KBC), berpartisipasi dalam lomba sekolah/madrasah Adiwiyata, dan menerapkan pembiasaan spiritual-ekologis.
2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen: Mengintegrasikan materi Ekoteologi dan Cinta Kasih ke dalam buku bahan materi bimbingan dan penyuluhan yang sedang dalam proses pencetakan.
3. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu: Melaksanakan Gerakan Penanaman Pohon pada Hari Tumpek Wariga oleh PTKH, pengangkatan isu Teo-Ekologi Hindu dalam penelitian, Gerakan Pembersihan dan Pemuliaan Sumber Mata Air dengan pelepasan benih ikan dan penyu, pelepasan burung pada Tumpek Uye, Gerakan Sekolah/Kampus Bebas Plastik (Zero Waste) dengan kampanye tumbler dan beach cleanup, penanaman pohon wajib mahasiswa baru September 2025, program spesifik PTKH seperti pelepasan benih ikan di berbagai danau, serta implementasi Kurikulum Cinta di Widyalaya dengan konsep Tri Hita Karana.
4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik: Menyusun panduan kurikulum berbasis cinta dan ekoteologi sejak Maret 2025, modul ajar untuk SMAK dengan fokus rumah bersama, diskusi virtual 7 Agustus 2025, pendampingan panduan mata pelajaran, penerbitan buku “Menjadi Saksi Keselamatan” tahun 2020, ekoteologi sebagai mata kuliah di PTK Katolik, dan praktik menanam di asrama.
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: Menggelar Seminar Nasional Bali Interfaith Movement 2024 dengan tema “Semangat Deklarasi Istiqlal untuk Resolusi Konflik Perspektif Agama-Agama”.
6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha: Mengintegrasikan ekoteologi melalui penanaman pohon di sekolah formal keagamaan Buddha (Nava, Mula, Muda, Uttama Dhammasekha), planting dan pembersihan lingkungan di Nava Dhammasekha, edukasi cinta lingkungan, aksi nyata ramah lingkungan, kegiatan kreatif dari barang bekas, kegiatan Buddhis bernuansa ekologis, gaya hidup berkesadaran, penggunaan bahan recycle untuk membuat art (seperti koran bekas dan roll tissue), serta mengajarkan anak-anak menanam biji kacang hijau yang disiram setiap hari di Nava

Dhammasekha, ditambah doa bersama sebelum makan di lingkungan sekolah tersebut.

7. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu: Melaksanakan penghijauan/ penanaman pohon di SETIAKIN Bangka Belitung dan menyisipkan insersi ekoteologi dalam kurikulum, modul, dan materi ajar.

Pilar 3: Implementasi Ekoteologi dalam Layanan Keagamaan

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen: Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan kesadaran lingkungan oleh penyuluh agama di Poso.
2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu: Menjadikan penyuluh agama sebagai duta lingkungan dengan edukasi berbasis Tri Hita Karana, Tumpek Wariga, dan filosofi "Tat Tvam Asi" hingga tingkat desa.
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam: Menerapkan digitalisasi layanan untuk pelestarian hutan, pengurangan emisi, dan gerakan zero waste di madrasah dengan larangan botol plastik, pemilahan sampah, dan bebas kertas.
4. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu: Melaksanakan penanaman pohon Matoa di rumah ibadah pada Hari Bumi, 22 April 2025.
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: Menginisiasi "Harmoni untuk Kemanusiaan dan Lingkungan" sebagai amplifikasi Deklarasi Istiqlal.
6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha: Mendukung fang shen (pelepasan makhluk hidup) di berbagai daerah oleh penyuluh Agama Buddha, pengurus organisasi, majelis, dan pengurus tempat ibadah, penanaman pohon oleh penyuluh, gerakan ekoteologi oleh pengurus organisasi, majelis, dan pengurus tempat ibadah, pembangunan Sumur Resapan (SURES) berkolaborasi dengan Yayasan Relief Islami Indonesia, gerakan eco theologi penanaman pohon untuk menyambut Tri Suci Waisak (Vesakha Sananda), serta "Satu Hati untuk Kemanusiaan dan Alam" di Kepulauan Bangka Belitung dengan penanaman 90 pohon dan pengumpulan 88 kantong darah oleh Panitia Vesakha Sananda 2569 BE/2025.

Pilar 4: Penguatan Implementasi Ekoteologi melalui Kemitraan

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam: Bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk Gerakan Tanam Sejuta Pohon memperingati Hari Bumi dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara berbasis ekoteologi di Kulon Progo, melibatkan 330 mahasiswa dari 34 PTKI.
2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen: Menandatangani MoU dengan Sinode Gereja Anugerah Bethesda untuk penanaman 10.000 pohon, kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Purbalingga untuk program "Eco Office" dan Adiwiyata, serta kolaborasi dengan KLH dan Kemenhut untuk wakaf hutan.
3. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu: Belum ada kerja sama mitra eksternal, hanya himbauan/sosialisasi melalui khotbah atau buku.

4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: Menggelar Deklarasi Komitmen Bersama Tokoh dan Penyuluh Lintas Agama, FGD lintas agama, Eco-Harmony and Social Inclusion Festival, Hijrah Hijau Festival, dan talkshow menuju Bali Interfaith Movement.
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha: Berkolaborasi dengan Relief Islami Indonesia dalam pembangunan Sumur Resapan (SURES).

Program ekoteologi Kemenag RI telah berkembang dari tahap awal menuju implementasi nyata pada 2025, dengan kontribusi aktif dari seluruh koordinator untuk mendukung target program prioritas Menteri Agama.

H. Rencana Program Strategis Ekoteologi

Program ekoteologi Kementerian Agama Republik Indonesia ke depan dirancang secara menyeluruh untuk memperkuat sinergi antara nilai-nilai agama dan pelestarian lingkungan, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan serta target emisi nol bersih pada tahun 2045 sesuai Asta Protas. Program ini dikembangkan berdasarkan lima dimensi ekoteologi yang menjadi kerangka kerja utama, yakni:

TABEL 10. PENJABARAN DIMENSI, TUJUAN, INDIKATOR DAN RENCANA PROGRAM EKOTEOLOGI

NO.	DIMENSI (ASPEK)	TUJUAN	INDIKATOR
1. Dimensi Nasionalisme: Kedaulatan Tanah, Air, dan Udara	Penumbuhan rasa cinta tanah, air, dan udara yang ditunjukkan melalui upaya menjaga lingkungan tanah, air, udara, dan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta penguatan identitas nasional melalui kesadaran ekologis	- Tingkat pemahaman masyarakat dan umat beragama terhadap potensi lingkungan sekitar yang mendukung kehidupan berkelanjutan (diukur melalui skor survei 1-10 per provinsi) - Jumlah aksi advokasi lokal yang dilakukan oleh komunitas keagamaan untuk melawan ancaman kedaulatan tanah, air, udara, dan sumber daya (misalnya deforestasi, pencemaran sungai	- Program Penanaman Pohon untuk Siswa TK-SD: Inisiatif di sekolah keagamaan Khonghucu untuk menanamkan cinta tanah, air dan udara sejak dini melalui kegiatan penanaman pohon secara rutin setiap semester, dilengkapi dengan edukasi tentang potensi lingkungan lokal (Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu). - Gerakan Nasional Majelis Taklim Peduli Bumi: Penanaman pohon serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota melalui kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat, dilengkapi dengan kampanye kesadaran terhadap ancaman lingkungan seperti illegal logging (Ditjen Bimas Islam). - Kemitraan dengan Pemda, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan: Program rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengembangan wakaf hutan di berbagai wilayah, melibatkan gereja lokal untuk advokasi kedaulatan

2. Dimensi Keadaban Alam: Penghormatan terhadap Ciptaan	Penciptaan habitus perilaku individu, kolektif, dan kelembagaan yang mencerminkan penghormatan serta penghargaan terhadap ciptaan Tuhan melalui pelestarian lingkungan sebagai wujud ibadah	Persentase umat beragama yang menunjukkan kesadaran tinggi dalam pelestarian lingkungan sekitar (berdasarkan survei tahunan) Jumlah program komunitas hijau yang diinisiasi oleh lembaga keagamaan, termasuk kegiatan penanaman, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam	Pelatihan Spesifik Penyuluh Kristen: Pelatihan "Green Evangelism" untuk penyuluh agama Kristen, dilengkapi praktik pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan fasilitas gereja (energi, air, sanitasi, sampah) di 500 gereja prioritas, dengan target pengurangan emisi 20% (Ditjen Bimas Kristen). Standar Layanan Ramah Lingkungan di KUA: Edukasi calon pengantin tentang pelestarian lingkungan melalui sesi edukasi, program tanam pohon, sertifikat ramah lingkungan, dan pengelolaan sampah pernikahan di 1.000 KUA (Ditjen Bimas Katolik). Program Hari Suci Ekologis: Inisiatif Tumpek Wariga (penanaman pohon), Tumpek Uye (pelepasan ikan, burung, tukik), dan Hari Raya Kuningan (kampanye green temple) oleh komunitas pendidikan Hindu, dengan target partisipasi 10.000 peserta per acara (Ditjen Bimas Hindu).
3. Dimensi Kearifan Lokal: Mengangkat nilai-nilai dan praktik baik kearifan lokal untuk mendukung ekoteologi	Pemahaman mendalam dan pemberian ruang yang memadai bagi nilai-nilai tradisi serta kearifan lokal dalam pengembangan ekoteologi yang relevan dengan konteks masyarakat setempat	Persentase adopsi tradisi dan kearifan lokal (seperti Tri Hita Karana, filosofi adat Papua) dalam program ekoteologi di wilayah tertentu Jumlah kolaborasi lintas budaya antara agama dan komunitas lokal untuk mendorong wacana serta praktik ekoteologi	Penguatan Filosofi Hindu: Pengintegrasian Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, Tat Twam Asi, Satyam Siwam Sundaram, dan Vasudhaiva Kutumbakam sebagai landasan utama pendidikan lingkungan dalam kurikulum agama Hindu di 500 sekolah dan PTKH (Ditjen Bimas Hindu). Sosialisasi kepada Pengusaha Khonghucu: Kampanye kepada umat Khonghucu yang berprofesi sebagai pengusaha untuk membatasi produksi kemasan plastik dan menyediakan anggaran daur ulang, dengan pendekatan kearifan lokal dalam bisnis berkelanjutan (Pusat Bimbingan Khonghucu). Pembelajaran Kontekstual: Penggunaan pura, hutan, sungai, dan laut sebagai laboratorium ekoteologi melalui field study dan green service learning untuk mahasiswa Hindu, dengan target 1.000 mahasiswa terlibat per tahun (Ditjen Bimas Hindu).

1) Nasionalisme (kedaulatan tanah, air, dan udara),
2) Keadaban Alam (penghormatan terhadap ciptaan Tuhan),
3) Kearifan Lokal (penguatan nilai tradisi dan praktik lokal),
4) Nilai Kemanfaatan Lingkungan (pengarusutamaan manfaat lingkungan),
5) Kebijakan (integrasi ekoteologi dalam regulasi dan program pembangunan).

4. Dimensi Nilai Kemanfaatan Lingkungan	Pengarusutamaan nilai kemanfaatan lingkungan dalam setiap aspek pengembangan dan pembangunan, memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan ekosistem	- Persentase program Kemenag yang mengadopsi desain tata kelola dan pelestarian lingkungan (misalnya green building, zero waste) - Jumlah insentif atau imbal jasa lingkungan yang diberikan kepada komunitas atau lembaga yang mendukung wilayah lestari	- Majelis Taklim Kreatif: Workshop untuk mengembangkan produk ramah lingkungan (seperti kerajinan dari limbah) yang bernilai ibadah dan ekonomi, menargetkan 500 majelis taklim sebagai aktor pemberdayaan ekonomi (Ditjen Bimas Islam). Pengelolaan Sampah di Madrasah/ Pesantren: - Dorongan kepada madrasah, pesantren, dan PTKI untuk mengelola sampah/limbah menjadi sumber ekonomi, dengan target pengurangan limbah 30% dan pendapatan tambahan di 200 institusi (Ditjen Pendidikan Islam). - Green Campus dari SBSN/PHLN: Implementasi kampus hijau dengan pendanaan SBSN atau PHLN, termasuk pemanfaatan imbal jasa lingkungan seperti kredit karbon, menargetkan 50 PTKI (Ditjen Pendidikan Islam).
5. Dimensi Kebijakan: Pemanfaatan kerangka kerja ekoteologi dalam berbagai kebijakan dan program	Perembesan nilai-nilai ekoteologi ke dalam kebijakan, program, aturan, dan kegiatan lintas sektor pembangunan untuk menciptakan tata kelola yang berkelanjutan	- Jumlah dokumen kebijakan, regulasi, dan program di sektor pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan yang mengintegrasikan ekoteologi - Persentase keputusan dan perizinan yang mempertimbangkan prinsip ekoteologi (misalnya izin bangunan ramah lingkungan)	Kurikulum Ekoteologi Wajib: Penyusunan kurikulum dan bahan ajar ekoteologi sebagai mata kuliah wajib di PTK Katolik dan PTKI, dengan target integrasi di 100 institusi pada 2026 (Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Pendidikan Islam). - Kemitraan Media dan Sertifikasi: Kolaborasi dengan media untuk kampanye digital (dokumenter “Gereja & Lingkungan”, podcast, konten sosial) dan kerja sama dengan KLHK untuk pendampingan “Rumah Ibadah Ramah Lingkungan” di 1.000 lokasi. Ada harapan besar kegiatan pendampingan ini dapat berkontribusi pada upaya sertifikasi bangunan hijau dari Green Building Council Indonesia (GBCI), serta sertifikasi internasional seperti LEED dan EDGE (Ditjen Bimas Kristen). - Revisi Kurikulum Hindu: Pengembangan kurikulum PAUD, jenjang menengah, dan PTKH dengan integrasi ekoteologi, termasuk pelatihan guru dan dosen, menargetkan 80% sekolah Hindu mengadopsi pada 2027 (Ditjen Bimas Hindu).

Rencana program yang akan dilaksanakan oleh berbagai koordinator, termasuk Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) agama (Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha), Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, dan Direktorat Jenderal Kerukunan Umat Beragama (PKUB), dikomunikasikan secara terperinci dengan indikator masing-masing dimensi. Pemetaan ini bertujuan untuk memastikan setiap program memiliki dampak nyata terhadap pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat identitas keagamaan dan budaya nasional.

Berikut tabel pemetaan yang lebih panjang dan mendetail:

TABEL 11. STRATEGI KERJA EKOTEOLOGI DALAM PILAR SDM (APARATUR) KEMENTERIAN AGAMA

DIMENSI (ASPEK)	TUJUAN	INDIKATOR (TARGET 2025–2029)	RENCANA PROGRAM DAN KOORDINATOR
Literasi Ekologis	Penguatan literasi yang mentransformasi kesadaran ekologis	- 99% ASN skor literasi ≥9/10. - 1 modul diklat - 1 modul pembinaan ASN - 1 Modul inovasi hijau, kantor dan rumah. - 1 kursil 5 tahunan dan 5 - Modul Penyuluhan agama bimas agama. - 500 modul ASN di distribusikan - 1 juta impresi media sosial. - 1 juta views webinar, - 500.000 unduh app “EcoAgama”.	- Diklat pra-jabatan CPNS/PPPK dengan simulasi VR krisis iklim (BMBPSDM) - Modul ekoteologi adaptif per agama (Islam: khalifah fil ardi, Kristen: Cinta Kasih) via e-book dan app gamifikasi (Bimas Agama) .- Webinar Bulanan “ Pembinaan Ekoteologi, Inovasi Hijau ASN” dengan zoom YouTube (BMBPSDM, BIMAS dan Kanwil). - Kampanye #ASNHijau di X, Instagram Reels tutorial eco-enzyme, podcast Spotify “Suara Ekoteologi” (Humas Kemenag). - Billboard kota, mural kantor, radio RRI (Humas Kanwil). - Kompetisi esai dan video literasi ASN (Humas Kmenagri)
Sikap dan Nilai Ekologis	Membangkitkan sikap dan tata nilai berorientasi nilai ekologis	- Indeks sikap ASN naik 45% (survei BPS). - 4.000 forum diskusi diadakan. - 2 juta views podcast “Iman Hijau”. - 4 juta impresi X, 1 juta pengguna AR filter TikTok.	- Kode etik birokrasi zero waste dan integrasi core value “Berakhlak” (BMBPSDM). - Deklarasi etika lingkungan di ASN (Itjen, Biro Ortala). - Forum diskusi Penyuluh lintas agama Bulanan via zoom, YouTube (Ditjen Bimas Kanwil). - Kampanye #EkoteologiKeren di X, Instagram Stories polling sikap, podcast Apple Podcasts (Humas Kemenag). - Pelatihan soft skills dan role-playing sikap (Balai Diklat). - Award “Gaya hidup Hijau ASN” disiarkan TVRI (Sekjend). - Media cetak opini di Kompas, mural kota, billboard etika (Humas Kemenag).

Praktik Hidup Ekologis	Membangun habituasi dan praktik hidup ekologis, inovasi, gaya kerja, bangunan, sistem hidup ekologis	- 98% kantor unit kerja hijau. - inovasi (eco-enzyme, - Penampungan air hujan, Penghijauan kantor), emisi turun 35 - Pengukuran dampak Hijau ASN pada wilayah kerja dan tempat tinggal	- Redesign kontekstualisasi 200 unit kantor kerja/sekolah/ KUA dengan standar Ekoteologis (BMBPSDM, Biro Umum, Kanwil, Kandepag,KUA Ditjen Bimas). - Inovasi eco-enzyme dan sumur resapan (Badan Litbang Diklat). - Program "Jumat Hijau" dan zero waste harian - Agroforestry bekerjasama dengan KLH dan Kehutanan di kantor dan rumah (Ditjen Bimas). - App "EcoAgama" untuk tracking praktik (PUSDATIN). - Expo inovasi ASN di YouTube, X challenges #JumatHijau, Instagram tutorial (Humas Kemenag). - IoT sensor emisi dan AI dashboard di SIKNA (Puslitbang Teknologi).

Lima dimensi ekoteologi yang dipetakan di atas dapat diturunkan menjadi indikator terukur yang menjadi instrumen penilaian utama bagi pemangku kepentingan, dengan fokus pada persoalan signifikan seperti kedaulatan sumber daya alam, penghormatan ciptaan Tuhan, kearifan lokal, kemanfaatan lingkungan, dan integrasi kebijakan.

TABEL 12. STRATEGI KERJA EKOTEOLOGI DALAM PILAR PENDIDIKAN KEMENTERIAN AGAMA RI

DIMENSI (ASPEK)	TUJUAN	INDIKATOR (TARGET 2025–2029)	RENCANA PROGRAM DAN KORDINATOR
Literasi Ekologis	Penguatan literasi yang mentransformasi kesadaran ekologis	- 5 Buku Pendidikan agama dari berbagai agama terintegrasi dengan Ekoteologi - 100% kurikulum revisi di PAUD hingga PT, kesadaran naik 50% (survei BPS). - 500 buku/modul didistribusikan. - klub ekoteologi di kampus - 1 juta views festival pendidikan.	- Revisi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBC) dengan konten ekoteologi: PAUD (cerita ayat ekologi), dasar (gambar alam), menengah (diskusi), SMA/MA (analisis), PT (penelitian), pesantren (tafsir lintas agama seperti Q.S. Al-Baqarah: 30, Tri Hita Karana) (Ditjen Pendis dan BMPPSDM). Diklat untuk 5000 guru/pendidik dengan e-book interaktif dan Hybrid Webinar Ekoteologi bulanan untuk santri/siswa di YouTube, adaptif per agama Kampanye #GenerasiHijau di X, Instagram Reels tutorial untuk PAUD, podcast "Generasi Ekoteologi" untuk SMA (Humas Kemenag). Klub ekoteologi di sekolah/pesantren, kampus Festival pendidikan di TVRI, mural sekolah PAUD, radio kampus PT (Humas Kanwil). Kompetisi esai/video untuk santri/siswa semua agama (Kiai NU, Guru Khonghucu).

Sikap dan Nilai Ekologis	Membangkitkan sikap dan tata nilai berorientasi nilai ekologis	Jurnal ekoteologi Pembinaan siswa/santri/mahasiswa Pembinaan 4 juta guru/karyawan 5 juta views podcast. Ekosistem Sekolah dan kampus yang hijau, gedung, kantin, taman Evaluasi Integrasi Program Ekoteologi dalam Pendidikan agama	**Program** teladan guru/pendidik dengan diskusi etika: PAUD (cerita moral), dasar (permainan nilai), menengah (debat), SMA/MA (refleksi), PT (seminar), pesantren (tausiyah) (Ditjen Bimas). Integrasi sikap Ekoteologi pada nilai siswa/santri **Kampanye** #EkoteologiKeren di Tiktok, X, Instagram Stories polling untuk siswa mahasiswa, (Humas Kemenag). **Jurnal** refleksi siswa dan kompetisi poster untuk karyawan sekolah (Pendis, BMBPSDM) **Pelatihan** ekoteologi dengan kearifan lokal untuk kantin, taman. **Award** pendidik hijau di TVRI (Humas). **Media** cetak opini Tempo untuk PT, mural kampus PAUD, AR TikTok polling menengah (Humas Kemenag). **Evaluasi** analisis sikap untuk guru/staf, siswa (PENDIS, BMBPSDM)
Praktik Hidup Ekologis	Membangun habituasi dan praktik hidup ekologis, inovasi, gaya kerja, bangunan, sistem hidup ekologis	**Pembinaan** Inovasi sabun Ecoenzym, pengelolaan sampah, gaya hidup hijau di sekolah/pesantren/rumah tersertifikasi Adiwiyata. **KKN** tematik ekoteologi untuk mahasiswa/santri **Kolaborasi** CSR dan kementerian kehutanan untuk pembinaan generasi muda bhakti alam **Festival** "Murid Cinta Tanah Air Inovasi, aktor dan program ekoteologi di Lembaga pendidikan	**"Sekolah Hijau"** dengan bank sampah di kantin (PAUD/ dasar), eco-enzyme (menengah/SMA), agroforestry (pesantren) **Kampanye** #SekolahHijau di X, Instagram tutorial untuk guru, YouTube expo untuk karyawan (Humas Kemenag). **Penghijauan** sekolah, kampus/kantin (Sinergi Kehutanan) **Pelatihan** hijau dan hackathon teknologi untuk karyawan sekolah (Balai Diklat). Festival Pendidikan sekolah/Pesantren

Indikator ini dirancang berbasis kerangka logis (logframe) yang menghubungkan input (sumber daya), output (aktivitas), outcome (perubahan perilaku), dan impact (dampak jangka panjang), dengan pengukuran melalui survei tahunan, observasi lapangan, dan data digital dari Sistem Informasi Keagamaan Nasional (SIKNA)

Kemenag RI. Evaluasi dilakukan setiap semester oleh tim independen melibatkan akademisi dan ormas keagamaan, sementara monitoring real-time menggunakan dashboard berbasis Artificial Inteligence untuk deteksi dini hambatan, memastikan transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip good governance.

1. **Strategi Kerja Ekoteologi dalam Pilar SDM (Aparatur) Kementerian Agama**

   Dengan mempertimbangkan potensi SDM di seluruh unit Kementerian Agama RI, maka ada beberapa strategi kerja yang dapat dikembangkan sebagaimana tabel di bawah ini.

TABEL 13. STRATEGI KERJA EKOTEOLOGI DALAM PILAR LEMBAGA KEAGAMAAN

DIMENSI (ASPEK)	TUJUAN	INDIKATOR (TARGET 2025–2029)	RENCANA PROGRAM DAN KORDINATOR
Literasi Ekologis	Meningkatkan kesadaran ekologis umat melalui	- Buku modul penyuluhan ekoteologi lintas agama - 95% umat mencapai literasi tinggi (survei BPS). - 4 juta sesi penyuluhan/khotbah. - 15 juta impresi media sosial. - 6 juta views webinar. - 1 Buku tokoh ekoteologis Indonesia	- Integrasi ekoteologi ke khotbah rutin di rumah ibadah lintas agama (Ditjen Bimas Islam/Hindu/Kristen/Buddha/Khonghuc). - Distribusi e-book lintas agama (misalnya, Q.S. Al-Isra: 44, nilai Tri Hita Karana) via kemenag.go.id (Pusat PKUB, Ditjen Bimas Agama agama). - Webinar Bulanan "Ekoteologi Kemenag Menyapa" di YouTube Kemenag, RRI, TV. - Kampanye #ImanUntukBumi di X, Instagram Reels dakwah, podcast "Harmoni Alam" di Spotify (Humas Kemenag). - Sapa Penyuluh Agama bulanan bekerja sama radio, televisi, media sosial dan zoom (Pokja Penyuluh, Ditjen bimas Agama, Humas) - Integrasi tema ekoteologis dalam MTQ, Pesparawi, Pesparani, - Penyusunan buku tokoh agama yang telah mengabdikan dirinya sebagai tokoh ekoteologis dalam bangsa indonesia
Sikap dan Nilai Ekologis	Menumbuhkan sikap dan nilai ekologis melalui deklarasi lintas agama dan bimbingan spiritual umat	- Sikap ekologis umat naik 40% (survei). - 5 deklarasi lintas agama oleh FKUB/ormas. - 4 juta views podcast nilai. - 7 juta impresi X.	- Deklarasi lintas agama "Harmoni Bumi" di 546 FKUB, seperti Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung (Pusat PKUB). - Fatwa ulama lintas agama (MUI, PGI, Parisadha Hindu, KWI, WALUBI) tentang pelestarian alam (Ditjen Bimas) - Kampanye #EkoteologiKeren di X, Instagram polling sikap - Podcast Spotify "Nilai Iman Bum" (Humas Kemenag). - Awards tokoh agama (Sekjen, BMBPSDM). - Kompetisi poster nilai ekologis, cinta kasih lintas umat - Dakwah atau khotbah Penyuluh agama - Opini di Media cetak Kompas - Konten ekoteologi Penyuluh agama, tokoh agama TikTok polling (Humas Kemenag).

Praktik Hidup Ekologis	Membangun habituasi dan praktik hidup ekologis melalui rumah ibadah hijau, inovasi lingkungan, dan ritual ekologis	- 1000 rumah ibadah hijau, emisi turun 30%. - 3.000 gerakan inovasi (bank sampah, penanaman). - 15 juta views media. - 6 juta partisipan expo.	- Program "Rumah Ibadah Hijau" dengan panel surya, manajemen air dan udara, bank sampah di masjid, gereja, pura (Ditjen Bimas Kristen). - Ritual ekologis seperti fang sheng Buddha dan penanaman Matoa Poso (Green Pura Bali). - Festival rumah ibadah di TVRI, mural masjid, AR TikTok tutorial (Humas Kanwil). - Kolaborasi CSR dan KLH untuk restorasi ekosistem rumah ibadah' - Kompetisi inovasi dan video ekologis tokoh agama dan oramas agama - Perayaan hari besar keagamaan yang mengangkat tema Ekoteologi. - Forum internasional ekoteologi Pemuka Agama - Penghargaan aktor ekoteologi Indonesia

2. Strategi Kerja Ekoteologi dalam Pilar Pendidikan Kemenag RI

Strategi lanjutan ini melihat konteks potensi di lingkungan Kementerian Agama. Harapannya, dapat menggerakkan 1.321.000 guru/ustadz/pendidik, 5 juta santri/siswa, 471.548 mahasiswa, karyawan (staf, tukang kebun), dan sarana seperti kantin di 199.706 satuan pendidikan (PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, PT, berbagai model lembaga pendidikan semua agama).

3. Strategi Kerja Ekoteologi dalam Pilar Lembaga Keagamaan

Dengan memperhatikan konteks lembaga keagamaan di Indonesia, usulan strategi ini diharapkan dapat menggerakkan tokoh agama, 279 juta umat, 1.340.263 rumah ibadah (masjid, gereja, pura, vihara, klenteng), dan 546 FKUB lintas agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu). Beberapa contoh paling nyata gerakan ekoteologi di tahun 2025, yaitu Deklarasi Istiqlal, Green Pura Bali, fang sheng Buddha, MADADA FEST Jakarta, Satgas Ekoteologi STQH Kendari, webinar Bali Interfaith, penanaman Matoa Poso, dan deklarasi Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung.

4. Strategi Pilar Ekoteologi dalam Pilar Kemitraan Kemenag RI

Strategi pilar kemitraan Kementerian Agama RI perlu mempertimbangkan konteks kemitraan yang sudah dibangun. Hal ini diharapkan dapat menggerakkan KLH, Kemenhut, IRI, NGO internasional/nasional, media nasional/cetak, hotel/bank/pihak ketiga, duta besar luar negeri, dan pengusaha Indonesia untuk gerakan kolektif ekoteologi. Beberapa contoh gerakan kemitraan ekoteologi pada tahun 2025 dapat disebutkan, seperti: Buku IRI, konferensi Bali, wakaf hutan MOSAIC, penanaman sejuta pohon KLH, Kemenhut, Hijrah Hijau Festival, Eco-Harmony Sulut, dan talkshow Bali Interfaith.

TABEL 14. STRATEGI PROGRAM EKOTEOLOGI DALAM PILAR KEMITRAAN KEMENAG RI

DIMENSI (ASPEK)	TUJUAN	INDIKATOR (TARGET 2025–2029)	RENCANA PROGRAM DAN KORDINATOR
Literasi Ekologis	Meningkatkan kesadaran ekologis melalui standarisasi MoU dengan hotel/bank/pihak ketiga, strategi media, dan kolaborasi kementerian/ NGO/duta besar/ pengusaha	- 10 MoU dengan mitra bisnis/ NGO/kementerian, jangkauan - 10 konferensi/webinar kolaboratif. - 1 juta impresi media sosial. - 1 juta views expo/ talkshow.	- Standarisasi MoU dengan hotel (eco-hospitality dan bank (green financing seperti BCA) untuk modul literasi ekologis (Pusat PKUB). - Kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan (Penanaman Pohon) - Strategi dengan media nasional/cetak seperti Kompas/TVRI untuk kampanye literasi (Humas Kemenag). - MoU NGO internasional/nasional (IRI, Greenpeace, Kementerian lingkungan Hidup) untuk e-book kolaboratif (Sekjen) - Talkshow dengan duta besar luar negeri (misalnya, Duta Besar AS untuk diplomasi hijau) di YouTube (Biro Luar negeri). - Kampanye #ImanUntukBumi di X, Instagram Reels, podcast global “Bumi Harmoni” (Humas)
Sikap dan Nilai Ekologis	Menumbuhkan sikap dan nilai ekologis melalui advokasi kolaboratif dengan kementerian, NGO, media, duta besar, dan pengusaha untuk etika lingkungan	- 1 Deklarasi ekoteologis Pengusaha/UMKM Indonesia - 6 juta views podcast nilai. - 1000 konten ekoteologi kemenag	- Deklarasi ekoteologis Pengusaha/ UMKM Indonesia - Forum budaya kearifan lokal dengan NGO internasional/nasional (Ketua IRI, Greenpeace). - Seruan bersama duta besar luar negeri untuk diplomasi Indonesia hijau (BMBPSDM) - Deklarasi global dengan pihak ketiga (Ketua)
Praktik Hidup Ekologis	Membangun habituasi dan praktik hidup ekologis melalui program CSR dengan hotel/ bank/pihak ketiga, inovasi bersama kementerian/NGO/ duta besar/pengusaha	- Seribu lahan, pekarangan dan hutan untuk wakaf green - penanaman 1 juta pohon emisi turun 30%. - 1 juta views media. - 1 juta partisipan expo.	- Program wakaf lahan, pekarangan hutan pohon Penanaman sejuta pohon dengan mitra (Kementerian, semua mitra, media, NGO nasional/ internasional Inovasi energi bersih (panel surya) dengan hotel/bank (Humas Kemenag) - Kompetisi inovasi lingkungan di TVRI, poster kota, AR TikTok tutorial (Humas Kanwil). - Award mitra ekoteologis kemenag kolaborasi hijau di TVRI (Sekjen, BMBPSDM)

I. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Ekoteologi

Kebijakan ekoteologi Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah satu langkah strategis yang menegaskan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan agenda pelestarian lingkungan hidup. Ekoteologi menjadi satu dari delapan prioritas program Kementerian Agama yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 244 Tahun 2025 tentang Asta Protas, sebuah arah kebijakan yang menempatkan agama sebagai kekuatan moral dan sosial untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Fokus utamanya adalah menumbuhkan kesadaran kolektif umat beragama bahwa menjaga bumi adalah bagian dari ajaran dan tanggung jawab spiritual. Hal ini diwujudkan melalui pendidikan agama yang berwawasan ekologi, gerakan rumah ibadah ramah lingkungan, hingga inisiatif fatwa keagamaan yang mendukung perlindungan bumi.

Kebijakan ini bukan hanya agenda sektoral Kemenag, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Penyusunannya merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025, yang merupakan tahap awal implementasi RPJPN 2025–2045 menuju visi Indonesia Emas 2045. Salah satu agenda besar RPJMN adalah memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi, yang sejalan dengan Prioritas Nasional (PN) ke-8, yakni: “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama.”

Dengan demikian, ekoteologi memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai kebijakan sektoral, tetapi juga sebagai pilar pembangunan nasional jangka panjang. Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Kemenag merancang sistem pemantauan (monitoring) dan evaluasi (evaluation) yang berbasis prinsip good governance: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas.

Sistem di atas tidak hanya bersifat administratif, melainkan berfungsi sebagai instrumen analisis untuk mendorong continuous improvement dan memperkuat mekanisme evidence-based policy making. Pemantauan dilakukan dengan pendekatan berlapis: mulai dari pusat hingga daerah, memadukan data internal Kemenag melalui Sistem Informasi Keagamaan Nasional (SIKNA), data eksternal dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta audit independen dari akademisi dan masyarakat sipil.

Kerangka pemantauan ini mengacu pada lima dimensi ekoteologi yang telah dirumuskan Kemenag: (i) Nasionalisme, (ii) Keadaban Alam, (iii) Kearifan Lokal, (iv) Nilai Kemanfaatan Lingkungan, dan (v) Kebijakan Publik. Setiap dimensi diturunkan dalam bentuk indikator proses, keluaran, hasil, dan dampak agar dapat diukur secara sistematis.

1. Indikator Keluaran

Indikator keluaran mencerminkan hasil langsung dari berbagai kegiatan dan program ekoteologi yang telah dirancang Kemenag RI. Keluaran ini berupa produk, jasa, dan layanan konkret yang dapat diukur dalam jangka pendek. Salah satu tolok ukur utama adalah jumlah rumah ibadah yang berhasil dikembangkan sebagai pusat praktik ramah lingkungan.

Program “Rumah Ibadah Ramah Lingkungan” ditargetkan menghasilkan 1.000 unit Masjid Hijau, Gereja Ramah Lingkungan, Pura Lestari, dan Vihara Ekologis yang tersertifikasi pada tahun 2026, sebagaimana ditetapkan dalam Kepmenag Nomor 123 Tahun 2024. Target ini sekaligus menegaskan ruang ibadah bukan hanya sarana spiritual, tetapi juga pusat edukasi ekologi umat.

Selain itu, kebijakan ini juga menargetkan integrasi kurikulum ekoteologi di seluruh satuan pendidikan keagamaan, seperti madrasah, sekolah teologi, pasraman, dan seminari. Pada 2027, diharapkan 70% lembaga pendidikan agama telah mengadopsi kurikulum berwawasan ekologi, sesuai mandat Perpres Nomor 18 Tahun 2022 tentang RPJMN. Upaya ini diperkaya dengan produksi konten ekoteologi yang menyasar masyarakat luas melalui penyuluh agama, khutbah, dakwah, ceramah, hingga media digital. Setiap tahun ditargetkan lahir 10.000 konten digital ekoteologi, berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 09/SE/2025.

Lebih jauh, pembentukan komunitas hijau keagamaan menjadi indikator penting keluaran. Program ini melibatkan pesantren, majelis taklim, dan kelompok keagamaan lain dalam aktivitas nyata seperti pengelolaan limbah, konservasi air, reboisasi, dan praktik energi terbarukan. Hingga 2026, ditargetkan ada 500 komunitas aktif yang beroperasi secara berkelanjutan, sesuai arahan Kepmenag Nomor 45 Tahun 2023. Dengan demikian, indikator keluaran tidak hanya terukur secara kuantitatif, tetapi juga memberi gambaran langsung tentang ekosistem sosial-keagamaan yang mendukung gerakan ekoteologi di Indonesia.

2. Indikator Hasil

Indikator hasil dirancang untuk menilai dampak antara pada tingkat masyarakat dan kelembagaan, khususnya dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku ekologis. Peningkatan literasi ekologis umat beragama menjadi fokus pertama. Survei tahunan yang dilakukan oleh Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Agama bekerja sama dengan BPS ditargetkan mampu menunjukkan kenaikan 25% per tahun, sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029.

Selain itu, perubahan perilaku keagamaan diukur melalui peningkatan jumlah komunitas keagamaan yang menerapkan praktik hidup hijau. Praktik tersebut meliputi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penerapan bank sampah berbasis rumah ibadah, penggunaan energi terbarukan, hingga sistem pengelolaan air secara berkelanjutan. Target yang ditetapkan adalah 50% komunitas keagamaan telah mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan pada tahun 2027, mengacu pada Kepmenag Nomor 123 Tahun 2024.

Sementara itu, adopsi pesan ekoteologi dalam kegiatan pendidikan dan dakwah menjadi salah satu tolok ukur utama. Pada 2026, diharapkan 80% khotbah, pengajian, dan pelajaran agama telah memasukkan dimensi ekologis, sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 45 Tahun 2023. Hal ini penting untuk memastikan nilai ekologi benar-benar menjadi bagian integral dari penyampaian ajaran agama sehari-hari. Untuk menjamin konsistensi program, skor indeks kinerja unit kerja Kemenag

dalam implementasi ekoteologi juga ditetapkan sebagai indikator, dengan target minimal 80 dari 100 poin pada tahun 2027, sesuai dengan mekanisme evaluasi kinerja birokrasi dalam Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2021.

3. Indikator Dampak

Indikator dampak memberikan gambaran tentang kontribusi jangka panjang kebijakan ekoteologi terhadap pembangunan nasional, keberlanjutan lingkungan, dan diplomasi global. Aspek penilain dampak tertuju pada kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi fokus utama, khususnya pada TPB 13 (Aksi Iklim), TPB 15 (Kehidupan di Daratan), dan TPB 16 (Kelembagaan Tangguh). Kemenag menargetkan kontribusi nyata sebesar 10% terhadap capaian nasional dalam ketiga tujuan tersebut pada tahun 2030, sebagaimana termuat dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2022.

Dampak juga diukur melalui pemulihan ekologi lokal. Program binaan Kemenag diharapkan mampu meningkatkan tutupan vegetasi, kualitas tanah, dan keanekaragaman hayati sebesar 15% di 500 desa binaan pada tahun 2028. Selain itu, Kemenag menargetkan peningkatan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional melalui partisipasi aktif pada lima forum internasional per tahun, termasuk COP UNFCCC dan Interfaith Rainforest Initiative, hingga 2030. Indikator lain adalah perubahan persepsi publik, dengan target peningkatan 30% pada indeks persepsi lingkungan berbasis agama pada tahun 2029 berdasarkan survei BPS–Kemenag.

4. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan ekoteologi dirancang dengan prinsip keterbukaan, partisipatif, independen, dan digitalisasi. Pemantauan dilakukan secara semesteran oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenag, yang kemudian melaporkan hasilnya ke Biro Perencanaan dan BMBPSDM untuk dilakukan analisis tren dan perbaikan dini. Ketentuan ini berlandaskan Kepmenag Nomor 123 Tahun 2024.

Untuk menjamin objektivitas, evaluasi tahunan dilakukan oleh panel independen yang terdiri dari akademisi lintas bidang, tokoh agama lintas iman, serta perwakilan masyarakat sipil. Hasil evaluasi dipublikasikan secara daring dan terbuka, sehingga dapat diakses publik untuk mendorong transparansi. Ketentuan ini sesuai dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2022.

Dari sisi teknologi, sistem pemantauan terintegrasi dalam Dashboard SIKNA, dilengkapi dengan fitur pelaporan mandiri dan early warning system berbasis indikator warna (merah–kuning–hijau). Fitur ini membantu mendeteksi hambatan implementasi, misalnya rendahnya partisipasi masyarakat di daerah terpencil atau keterbatasan sumber daya lokal, sebagaimana diatur dalam SE Menteri Agama Nomor 09/SE/2025.

Prinsip keterbukaan data dijamin melalui publikasi laporan tahunan yang dapat diakses publik. Laporan ini dilengkapi mekanisme feedback loop,

sehingga masukan masyarakat dapat diterjemahkan langsung ke dalam kebijakan baru yang lebih adaptif. Mekanisme ini sekaligus mendorong terciptanya inovasi berkelanjutan dalam penguatan ekoteologi nasional, sebagaimana mandat PMA Nomor 45 Tahun 2023.

Dengan desain pemantauan dan evaluasi yang sistematis dan terukur, Kemenag RI menegaskan posisinya sebagai pionir dalam mengintegrasikan nilai agama dengan pelestarian lingkungan. Sistem ini memastikan setiap program ekoteologi tidak hanya memiliki akuntabilitas administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata pada transformasi sosial.

BAB V

PENUTUP

Buku ini, yang disusun secara sistematis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) sebagai bagian dari implementasi Asta Protas 2025–2029, berfungsi sebagai rujukan konseptual dan operasional bagi pemahaman dan pengintegrasian ekoteologi dalam dinamika keagamaan dan pembangunan nasional. Ekoteologi muncul sebagai respons teologis yang mendalam terhadap krisis ekologi global dan nasional yang semakin akut, dengan menegaskan bahwa tanggung jawab ekologis bukan sekadar imperatif moral, melainkan esensi integral dari praktik keimanan dan ibadah.

Ibarat batu yang dilemparkan ke laut, akan menghasilkan riak gelombang. Demikian titik tolak program prioritas Ekoteologi adalah kesadaran kognitif dan spiritual sedangkan gelombang yang dihasilkannya adalah getaran sikap ekologis dan kebiasaan hidup (habituasi) yang meluas, menggerakkan perubahan nyata dalam perilaku manusia terhadap lingkungannya. Melalui cara pandang ini, program ekoteologi tidak overlapping dengan Kementerian Lingkungan Hidup, bahkan membentuk jejaring kebijakan ekologis yang berakar pada nilai-nilai keagamaan dan etika spiritual bangsa.

Sebagai instrumen kebijakan negara, buku ini menggarisbawahi harmonisasi antara ajaran agama, kearifan lokal, dan prinsip pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Struktur buku terbagi menjadi empat bagian utama: krisis lingkungan dan daya tahan teologis, konseptualisasi dan framework ekoteologi, analisis pengalaman empirik di Indonesia, serta strategi penguatan dan pelembagaan dalam kerangka kebijakan ekoteologi nasional. Tujuan akhir kebijakan ini mengarah pada peningkatan ketahanan ekologi nasional melalui nilai-nilai spiritual keberagaman. Empat poin penting tersebut dapat dijabarkan ringkasannya sebagai berikut:

1. **Daya Tahan Teologis di Tengah Krisis Ekologis**

   Bagian pertama ini mengidentifikasi beragam krisis ekologis yang dihadapi manusia dan sumber daya lingkungan saat ini. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia. Bab ini menguraikan keterkaitan antara krisis ekologis global dan krisis spiritual manusia modern. Skema global telah banyak dibuat untuk menghadapinya. Namun, tanpa dukungan moral yang tersimpan dalam agama dan kepercayaan, kegagalan berbagai skema tersebut adalah sebuah keniscayaan. Nilai-nilai agama yang terinternalisasi dalam individu akan menjadi pengarah penting praktik baik pelestarian dan tata kelola lingkungan yang baik, berkeadilan dan berkelanjutan. Pada bagian pertama ini, landasan filosofis dan kosmologis ciptaan menjadi bagian tidak terpisahkan untuk menjadi bahan penting daya tahan teologis di tengah krisis ekologis.

   Pada bagian pertama ini, ada pesan mendalam terkait kesadaran ekologis dalam ritual keagamaan dan kelakuan ekologis dalam pengurangan jejak karbon, integrasi nilai harian (gaya hidup sederhana, pelestarian biodiversitas), serta partisipasi kolaboratif dalam inisiatif ekoteologis, yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Perpres 59/2017. Keseluruhan bagian menunjukkan bahwa penyelesaian krisis ekologis tidak dapat hanya bersandar pada instrumen teknokratik atau kebijakan lingkungan, melainkan memerlukan revitalisasi nilai-nilai spiritual dan moral yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, daya tahan teologis menjadi dasar penting bagi perubahan paradigma: dari eksploitasi menuju keberlanjutan, dari dominasi menuju harmoni, dan dari sekadar wacana keagamaan menuju praksis iman ekologis yang nyata

2. **Konseptualisasi dan Framework Ekoteologi**

   Bagian kedua menyajikan fondasi teoritis ekoteologi sebagai disiplin interdisipliner yang mengintegrasikan teologi dengan etika ekologis. Ekoteologi didefinisikan sebagai studi teologis mengenai interelasi ajaran agama dengan tanggung jawab ekologis, di mana pelestarian alam menjadi manifestasi ibadah. Konsep ini bersinergi dengan ekospiritualisme yang mencakup agama formal, kepercayaan non-formal administratif, serta kearifan lokal berbasis budaya. Nilai-nilai inti meliputi kebaikan dan perlindungan ciptaan Tuhan, kemanfaatan berkelanjutan sebagai amal jariah, serta terjemahan keimanan ke dalam keberagaman ekologis, semuanya berpijak pada sumber primer seperti kitab suci dan ajaran spiritual.

   Rujukan utama nilai-nilai ekoteologis ini sangat kuat. Dalam Islam, QS Ar-Rum:41 menekankan khalifah fil ardhi dan larangan perusakan; Kristen (Kejadian 2:15) menugaskan pemeliharaan bumi; Hindu melalui Bhumi Puja

menghormati Bumi; dalam Buddha, Tripitaka (Sa yutta Nikāya 12:62) konsep Bhuvana Smrti (Pali: Bhuvana Sati) merupakan pendekatan ajaran Buddha melalui prinsip hukum sebab akibat saling bergantungan yang menjadi landasan kesadaran manusia terhadap kelestarian dan keselarasan dengan alam semesta. Demikian juga dengan Khonghucu yang melansirkan pada ajaran hubungan Tian, manusia dan alam secara utuh dan baik. Setidaknya semua agama dan kepercayaan ini terikat pada tanggung jawab iman terhadap kelestarian dan tata kelola lingkungan yang baik, seimbang, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada bagian 2 ini juga diungkapkan terkait definisi substantif dan operasional dari ekoteologi yang dibangun dari nilai-nilai formal yang ditarik berdasarkan landasan nilai keagamaan dan tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat Indonesia. Landasan nilai ini kemudian dikembangkan untuk membangun tujuh prinsip dan landasan hukum dasar ekoteologi yang di dalamnya sarat dengan tujuan membangun keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Aspek pengungkapan dimensi beserta indikator yang didasarkan pada penerjemahan prinsip pun dilakukan secara utuh dan komprehensif. Bagian ini menjadi framework dan memandu proses penerjemahannya menjadi kebijakan dan program ekoteologi yang bersifat nasional dan dijalankan oleh kementerian Agama RI.

3. Pengalaman Empirik Ekoteologi

Analisis pada bagian ketiga berusaha menguraikan praktik empirik ekoteologi di Indonesia, yang mencerminkan akulturasi nilai keagamaan dengan kearifan lokal. Inisiatif seperti “masjid hijau” mengadopsi efisiensi energi, pengelolaan air, dan pelestarian vegetasi; komunitas adat menerapkan tata kelola bijak melalui spiritualitas, seperti sasi di Maluku yang membatasi eksploitasi sumber daya berdasarkan konsensus adat, dan subak Bali yang menjunjung harmoni air. Komunitas lintas agama terlibat dalam reboisasi, pengelolaan sampah kolektif, dan pertanian organik berbasis spiritual, menunjukkan ekoteologi sebagai ekspresi keimanan kolektif.

Tantangan utama mencakup resistensi terhadap transformasi gaya hidup konsumtif, defisit literasi ekologi dalam kurikulum keagamaan, serta keterbatasan regulasi dan kelembagaan; pandangan dikotomis antara isu lingkungan dan keagamaan sering memposisikannya sebagai agenda sekuler. Buku ini menegaskan bahwa pelestarian alam merupakan manifestasi mendalam keimanan, sebagaimana diamanatkan dalam KMA 244/2025 tentang Asta Protas.

4. Strategi Penguatan dan Implementasi Ekoteologi

Pada bagian terakhir, ada upaya keras untuk merumuskan strategi terstruktur untuk pelembagaan ekoteologi sebagai kebijakan nasional. Sosialisasi gagasan melalui pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag, pengintegrasian dalam pendidikan agama siswa, dan koordinasi dengan tokoh-organisasi keagamaan. Pelembagaan mencakup: integrasi ekoteologi dalam etika kerja pegawai, standar kerjasama kemitraan, standar operasional prosedur (SOP)

sarana prasarana Kemenag, komitmen bersama lembaga keagamaan-pemerintahan, serta pembentukan kelembagaan sosial peduli nilai ekoteologi. Integrasi perencanaan nasional melalui penyertaan dalam RPJMN dan flagship kementerian untuk dukung pembangunan berkelanjutan, dilengkapi fasilitasi dialog lintas agama guna proyek lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

Akhirnya, buku ekoteologi, sebagai produk kebijakan Kementerian Agama RI ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun harmoni antara keagamaan dan lingkungan. Ekoteologi bukanlah milik satu tradisi, melainkan gerakan kolektif yang mewujudkan kehidupan rukun dan berkelanjutan, dengan internalisasi nilai keagamaan sebagai landasan etis berbangsa-bernegara di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, industri, dan teknologi. Melalui praksis ini, Indonesia dapat mewujudkan visi kedaulatan tanah, air, dan udara yang lestari, selaras dengan Pancasila dan konstitusi negara.

LAMPIRAN

A. Pilar Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenag RI

TABEL A.1. PROFIL PNS KEMENTERIAN AGAMA (TOTAL: 210.940, -3% DARI 2024)

KATEGORI	JUMLAH	RINCIAN UTAMA
Total PNS	210.940	Penurunan karena pensiun/mutasi.
Jenis Kelamin	Laki-laki: 98.339 Perempuan: 112.601	Perempuan dominan (53%).
Unit Kerja	Kantor Pusat: 2.335 Kanwil: 2.787 PTKN: 22.827 Balai & Loka: 8.824 UPT Asrama Haji: 2.089	Fokus PTKN/Balai.
Agama	Islam: 203.056 Kristen: 6.440 Katolik: 3.288 Hindu: 2.151 Buddha: 737 Konghucu: 4	Mayoritas Islam (96%).

TABEL A.2. JUMLAH PPPK KEMENTERIAN AGAMA (TOTAL: 50.040)

KATEGORI	JUMLAH	RINCIAN UTAMA
Total PPPK	50.040	Kantor Wilayah: 45.400.
Jenis Kelamin	Laki-laki: 22.502 (45%) Perempuan: 27.538 (55%)	Perempuan dominan.
Agama	Islam: 30.554 Kristen: 5.250 Katolik: 1.562 Hindu: 871 Buddha: 360 Konghucu: 15	Proporsi mirip PNS.

TABEL A.3. RINGKASAN PENYULUH/GURU/USTADZ PER BIMAS/AGAMA

BIMAS/AGAMA	PNS/PPPK	NON-PNS (ROHANIWAN/PENYULUH)	TOTAL	USTADZ/SANTRI (PESANTREN)
Islam	206.148	7.551 + Ustadz 2.119	215.818	Santri: ~5 juta (total nasional)
Kristen	28.860	3.048	31.908	-
Katolik	8.570	3.048	11.618	-
Hindu	4.786	~1.151	~5.937	-
Buddha	1.978	~1.147	~3.125	-
Konghucu	80	~170	~250	-
Total	250.422	~16.115	~268.656	Ustadz: 2.119, Santri: 5 juta

B. Pilar Layanan Keagamaan Kemenag RI

TABEL B.1. WILAYAH ADMINISTRASI (BASIS LAYANAN)

TINGKAT	JUMLAH	LUAS WILAYAH
Kabupaten/Kota	514	-
Kecamatan	8.401	-
Desa/Kelurahan	87.754	1.892.413 km²
Total	96.669	-

TABEL B.2. UNIT KERJA DAERAH

JENIS UNIT	JUMLAH
Kanwil Provinsi	34
Kankemenag Kab/Kota	514
Balai Litbang	9
Balai Diklat	5
Loka Diklat	8
KUA	5.917
LPMQ/UPQ	10
Total	6.497 (update 2025)

TABEL B.3. UNIT KERJA PUSAT

TINGKAT PUSAT
INSPEKTORAT JENDERAL
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
DITJEN BIMAS ISLAM
DITJEN BIMAS KRISTEN
DITJEN BIMAS KATOLIK
DITJEN BIMAS HINDU
DITJEN BIMAS BUDDHA
BADAN LITBANG DAN DIKLAT

TABEL B.4. FKUB DAN KERUKUNAN

KATEGORI	JUMLAH
FKUB Provinsi/Kab/Kota	546
Sekretariat Bersama	260
Desa Sadar Kerukunan	264

TABEL B.5. RUMAH IBADAH

AGAMA	JUMLAH UNIT	SUMBER
Islam	1.248.448	Ditjen Bimas Islam
Kristen	67.921	Ditjen Bimas Kristen
Katolik	13.925	Ditjen Bimas Katolik
Hindu	8.610	Ditjen Bimas Hindu
Buddha	1.189	Ditjen Bimas Buddha
Konghucu	170	Pusbindik Khonghucu
Total	**1.340.263**	**Kemenag 2025**

C. Pilar Pendidikan Agama Kemenag RI

TABEL C.1. SATUAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN AGAMA

JENIS	FORMAL	NON-FORMAL	TOTAL
Islam (Madrasah/ Pesantren)	41.220 (pesantren) + 3.914 (MIN/MTsN/ MAN)	145.659 (PDF/MDT/ TPA)	190.793
Kristen	1.175	1.956	3.131
Katolik	66	73	139
Hindu	45	83	128
Buddha	4	4	8
Konghucu	1	1	2
Total	**54.047**	**145.659**	**199.706**

TABEL C.2. GURU/USTADZ DAN PESERTA DIDIK/SANTRI

AGAMA	GURU/USTADZ	PENGAWAS	PESERTA DIDIK/ SANTRI
Islam	300.780 + 2.119 ustadz	2.943	~5 juta santri
Kristen	232.128	1.966	1.843
Katolik	7.544	80	1.666
Hindu	1.567	24	522
Buddha	278	0	80
Konghucu	70	0	24
Total	1.321.000	4.013	~5.2 juta

TABEL C.3. PTK (PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN) KEMENTERIAN AGAMA

AGAMA	LEMBAGA	MAHASISWA
Islam	1.436 (UIN 28, IAIN 26, STAI 4)	463.000
Kristen	74	6.335
Katolik	24	2.130
Hindu	2	80
Buddha	0	0
Konghucu	0	0
Total	1.536	471.548

TABEL C.4. AKTIVITAS PENDIDIKAN (TAHSIN, AL-QURAN, AL AY)

AKTIVITAS	PERSENTASE/DISTRIBUSI	CATATAN
Tahsin Al-Quran	5-10%	Fokus pesantren/diniyah
Al-Quran	10%	Integrasi kurikulum
Al Ay (Gender)	Laki: 40%, Perempuan: 60%	Non-formal

Daftar Pustaka

1. **Andrianos, Louk A., et. al. (2021)**. Contemporary Ecotheology, Climate Justice and Environmental Stewardship in World Religions: Ecothee Volume 6th-Orthodox Academy of Crete Publication. Embla Akademisk.
2. **Asad, Talal. (1993)**. Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Johns Hopkins University Press.
3. **Baring, R., & Molino, J. (2023)**. Kalikhasang Balaan: Elements of a Youth Specific Ecotheology in the Philippines. Religions, 14(6), 768. https://doi.org/10.3390/rel14060768
4. **Batchelor, Stephen, et al. (2022)**. Buddhism and Ecology: Living the Dharma in a Time of Crisis. A Tricycle E-Book.
5. **Bruner, Daniel L., Butler, J. L., & Swoboda, A. J. (2014)**. Introducing Evangelical Ecotheology: Foundations in Scripture, Theology, History, and Praxis. Baker Academic, Washington.
6. **Conradie, Ernst M., Bergmann, S., Deane-Drummond, C., & Edwards, D. (2014)**. Christian Faith and the Earth: Current Paths and Emerging Horizons in Ecotheology. Bloomsbury Publishing Plc, London.
7. **Dalton, A. M., & Simmons, H. C. (2010)**. Ecotheology and the Practice of Hope. State University of New York Press.
8. **Edelglass, William.** "Buddhism and the Environment". The Oxford Research Encyclopedia of Religion. Juni 2021.
9. **Efendi, D., & Mukti, R. A. (2020)**. Kampung Hijau Gambiran: Praktik Tata Kelola Lingkungan Hidup berbasis Collaborative Governance. Yogyakarta: Samudra Biru.
10. **Great Transition Initiative. (2025)**. Liberation Ecology. https://greattransition.org/publication/liberation-ecology
11. **Harvard ReVista. (2025)**. A Review of Liberation Theology and Praxis in Contemporary Latin America. As it Was in the Beginning? https://revista.drclas.harvard.edu/a-review-of-liberation-theology-and-praxis-in-contemporary-latin-america-as-it-was-in-the-beginning/
12. **Jasmine, L. F., Saharuddin, Murdianto, & Abdulkadir, M. (2023)**. Perilaku masyarakat adat terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (Kasus: Masyarakat Adat Baduy). Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, 7(2), 249–265. https://doi.org/10.29244/jskpm.v7i2.951
13. **Kementerian Lingkungan Hidup. (2003)**. Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan. Jakarta: KLH.
14. **Kementerian Lingkungan Hidup & Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2011)**. Tingkatkan Taqwa Melalui Kepedulian Lingkungan (Peduli Lingkungan dalam Perspektif Islam). Jakarta: KLH & PBNU.
15. **Leese, J. J. Johnson. (2018)**. Christ, Creation and the Cosmic Goal of Redemption: A Study of Pauline Creation Theology as Read by Irenaeus and Applied to Ecotheology. Bloomsbury Publishing Plc, London.
16. **MDPI. (2025)**. Reconsidering Ecological Civilization from a Chinese Christian Perspective. Religions, 11(5), 261. https://www.mdpi.com/2077-1444/11/5/261
17. **MDPI. (2023)**. Kalikhasang Balaan: Elements of a Youth Specific Ecotheology in the Philippines. Religions, 14(6), 768. https://www.mdpi.com/2077-1444/14/6/768

18. **Murad, A. T., & Tavares, S. S. (2023)**. Latin American and Caribbean ecotheology: A kaleidoscope. Religions, 14(12), 1500. https://doi.org/10.3390/rel14121500
19. **Muryani. (2017)**. Ekofeminisme: Perempuan dan Permasalahan Lingkungan (Buku 1). Yogyakarta: Indomedia Pustaka.
20. **Naess, A. (t.t.)**. The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary. Inquiry, 16(1), 95-100. 10.1080/00201747308601682
21. **Nasr, S. H. (1996)**. Religion and the Order of Nature. Oxford University Press.
22. **Nasr, S. H. (2007)**. Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man. ABC International Group.
23. **Prianto, E., Jhonnerie, R., Oktorini, Y., & Fauzi, M. (2024)**. Kearifan lokal masyarakat adat dalam mengelola sumber daya perikanan berbasis ekosistem di Sungai Kampar Provinsi Riau: Studi kasus Lubuk Larangan. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 16(1), 27–36.
24. **ProQuest Documents. (2025)**. Agrianita dan Departemen ESL IPB University Ajarkan Warga Manfaatkan Sampah Jadi Souvenir. .
25. **Rappaport, M. B., & Christopher J Corbally** . "An Ecotheology for Human Settlement of the Inner Planets: Dominion, Despoilment, and a Chance for Re-Dedication". Theology and Science. Vol. 21, No. 1, Januari 2023.
26. **Rochana, E., Sari, Y. R., Mahmud, I., & Sidemen, I. G. (2024)**. Community empowerment-based garbage bank management system in Bandar Lampung (Case Study of Emak.ID Garbage Bank). IICIS 2023. https://doi.org/10.4108/eai.2-11-2023.2343304
27. **Roszak, Piotr.** "Sacramental View of Creation: Denis Edwards on God's Presence in Natural World". HTS Teologiese Studies/Theological Studies, Vol. 77, No.3, Juli 2021.
28. **Sadewo, Y. D., & Purnasari, P. D. (2021)**. Entrepreneurial development of "Ojek Sampah" (OJAH) through android applications. I.J. Information Engineering and Electronic Business, 4, 20–29. https://doi.org/10.5815/ijieeb.2021.04.02
29. **Saint Louis University. (2023)**. Greening the Faith: Challenges to Religious Education – The 11th National Conference in Catechesis and Religious Education. https://www.slu.edu.ph/2023/07/01/greening-the-faith-challenges-to-religious-education-the-11th-national-conference-in-catechesis-and-religious-education/
30. **Siti Maria, Rosyadi, Dewi Indrawati, & Renggo Astuti. (1995)**. Sistem Keyakinan pada Masyarakat Kampung Naga dalam Mengelola Lingkungan Hidup (Studi tentang Pantangan dan Larangan). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
31. **Spencer, A. J**. (tanpa tahun). Beyond Christian environmentalism: Ecotheology as an over-contextualized theology. The Gospel Coalition, 40(3).
32. **Suarjana, N. (1998)**. Cerita Lingkungan Hidup Rakyat Bali. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
33. **Tanpa nama. (2025)**. Ecotheology from Youth Environmental Attitudes: Possibilities for Religious Education. NCCRE Journal. https://hitik-journal.reapph.org/NCCRE/article/view/52
34. **Tanpa nama. (2025)**. How Connecting Over Environmental Action Can Improve Mental Wellbeing and Biodiversity. BirdLife International. https://www.birdlife.org/news/2023/10/12/how-connecting-over-environmental-action-can-improve-mental-wellbeing-and-biodiversity/
35. **Tanpa nama. (2025)**. Liberation Theology, https://en.wikipedia.org/wiki/Liberation_theology
36. **Tanpa nama. (2025)**. Theology in Latin America. Scottish Association for the Study of Theology, https://www.saet.ac.uk/Christianity/TheologyinLatinAmerica
37. **Tim Penyusun. (2007)**. Kearifan Tradisional Masyarakat Nelayan Kampung Batunderang yang Berkaitan dengan Pemeliharaan Lingkungan Alam di Kabupaten Kepulauan Sangihe – Sulawesi Utara. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.
38. **Umar, N. (2013)**. Ekoteologi Islam: Melestarikan Jagat Raya sebagai Ibadah. Paramadina.
39. **Umar, N. (2015)**. Rethinking Islamic Spirituality. Prenada Media.
40. **Zhang, H. (2024)**. Diversity, complementarity and synergy: The reception of ecological theology in China. HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 80(1), a10245. https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.10245
41. **Zulvita, E., Harun, N., & Fetriatman. (1993)**. Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup di Daerah Propinsi Jambi. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
2025

Jika iman harus diamalkan, lingkungan pun harus dilestarikan. Mempertemukan iman dan lingkungan dalam aksi nyata adalah panggilan kembali tujuan penciptaan manusia. Iman bukan sekadar niat atau pernyataan terucap, tetapi aktualisasi dalam praktik hidup yang melestarikan alam. Relasi antara iman dan tanggung jawab lingkungan, inilah yang disebut ekoteologi. Di tengah berbagai teori, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Ekoteologi sebagai arah dan kerangka kerja kebijakan yang memungkinkan lansiran teologis agama-agama dan kepercayaan terimplementasikan pada internalisasi nilai (iman), penumbuh-kembangan kesadaran (ilmu), dan praktik baik (amal) dalam tata kelola dan pelestarian lingkungan.

Penerapan ekoteologi dalam berbagai aksi nyata menjadi contoh baik ruang moderasi dan kerukunan umat beragama serta pembelajaran baik kurikulum berbasiskan cinta terhadap Tuhan, manusia, dan alam seutuhnya. Buku "Ekoteologi: Mengamalkan Iman, Melestarikan Lingkungan" ini bukan sekadar panduan perumusan program, kegiatan dan strategi pelestarian lingkungan berbasiskan iman sebagaimana ditetapkan Asta Protas Kementerian Agama Tahun 2025-2029 dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia 2024-2029, tetapi juga menjadi bentuk hadir dan komitmennya Kementerian Agama dalam menjawab krisis lingkungan secara global, nasional dan lokal.

ISBN 978-602-293-281-9
9 786022 932819